

**PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP  
PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KECAMATAN DEPOK  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



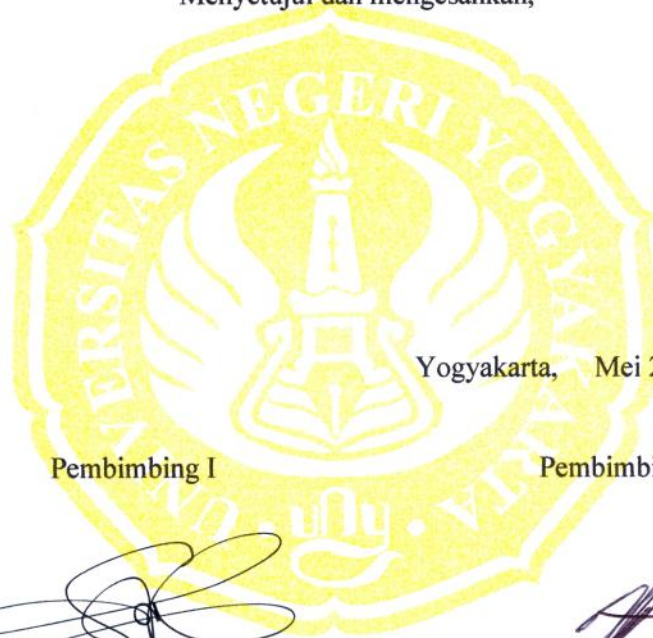
**Oleh:  
Defie Lastriana  
NIM. 05101244004**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
JUNI 2010**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN ” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Menyetujui dan mengesahkan,



Yogyakarta, Mei 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

**Setya Raharja, M.Pd**

NIP. 19651110 199702 1 001

**Nurtanio Agus P, M. Pd**

NIP. 19760807 200112 1 006

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Defie Lastriana

NIM : 05101244004

Prodi : Manajemen Pendidikan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya/pendapat yang ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan/kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Tanda tangan yang tertera dalam lembar pengesahan asli. Apabila ternyata terbukti tanda tangan dosen penguji palsu, maka saya bersedia memperbaiki dan mengikuti yudisium satu tahun kemudian.

Yogyakarta, Mei 2010

Yang menyatakan,



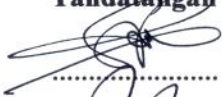



Defie Lastriana

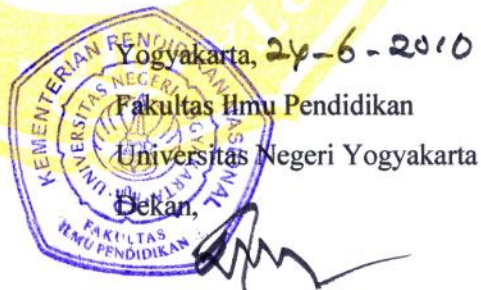
NIM. 05101244004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN “ ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 8 Juni 2010 dan dinyatakan lulus.

### TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Setya Raharja, M.Pd	Ketua Penguji		21 Juni 2010
MM. Wahyuningrum, MM	Sekretaris Penguji		16 Juni 2010
Dr. Sugeng Bayu Wahyono	Penguji I		16 Juni 2010
Nurtanio Agus P, M. Pd	Penguji II		16 Juni 2010



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M. Hum  
NIP. 195502051981031004

## **MOTTO**

*“ ‘Mukjizat’ dan pertolongan Sang Khaliq, terkadang datang secara tidak terduga, namun selalu tepat, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah datang terlambat.”*

*Billi S. Lim*

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini kupersembahkan untuk Ayah dan Mama' ku tercinta....*

*Kelembutan cinta, kasih sayang, perjuangan dan air mata serta untaian doa yang terukir dalam sujudmu akan selalu menjadi penerang dalam setiap langkahku,*

*kau selalu menjagaku saat aku mulai lelah, kau selalu mendukungku ketika aku terpuruk dan selalu ada saat semuanya meninggalkanku.*

*Tak kan ada yang bisa menggantikanmu, tanpamu aku bukanlah apa-apa.*

*Tiada kata yang mampu ku ucap tuk ungkapkan betapa aku sangat menyayangi kalian.*

*Terima kasih Ayah dan Mama', aku sangat ingin membahagiakan kalian.*

PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN  
PROFESIONALITAS GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

Oleh:  
Defie Lastriana  
NIM. 05101244004

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai: (1) pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK Kecamatan Depok Kabupaten Sleman; (2) profesionalitas guru SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman; (3) pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitiannya adalah guru di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di kecamatan Depok kabupaten Sleman. Variabel independen pada penelitian ini adalah desentralisasi pendidikan, sedangkan variabel dependennya adalah profesionalitas guru. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode angket, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase dan statistik uji regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Pelaksanaan desentralisasi pendidikan sub variabel otonomisasi sekolah dengan pencapaian 46,4% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta dengan pencapaian 56,8% dan demokratisasi sekolah dengan pencapaian 54,2% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta dengan pencapaian 49,9% rata-rata menjawab setuju, maka pelaksanaan desentralisasi pendidikan SMK di Kecamatan Depok kategori cukup baik, karena keterbatasan kebutuhan materil untuk mengoptimalkan desentralisasi di sekolah. (2) Profesionalitas guru SMK di Kecamatan Depok dikatakan baik dapat dilihat dari kompetensi pedagogik dengan pencapaian 60,6% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta dengan pencapaian 64,1%, kompetensi kepribadian dengan pencapaian 60,5% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta dengan pencapaian 62,5%, kompetensi profesional dengan pencapaian 53,8% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta dengan pencapaian 62,5%, dan kompetensi sosial dengan pencapaian 59,5% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta dengan pencapaian 62,9% keempat kompetensi tersebut rata-rata menjawab setuju. (3) Pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sangat kecil yaitu 13,5% untuk SMK Negeri sedangkan SMK Swasta adalah 6,5%. Hal ini dapat bermakna 86,5% dari SMK negeri, 93,5% SMK Swasta antara lain dipengaruhi kebutuhan untuk dimotivasi, dihargai dan disejahterakan serta sarana-prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata kunci: *desentralisasi pendidikan, profesionalitas guru, guru SMK.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga skripsi yang berjudul “PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum selaku Dekan FIP UNY, yang telah memberi izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sudiyono, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Administrasi Pendidikan dan Bapak/Ibu Dosen Administrasi Pendidikan, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis.
3. Bapak Setya Raharja, M.Pd dan Bapak Nurtanio Agus. P, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh Kepala Sekolah dan Guru SMK Negeri dan swasta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atas kesediannya membantu dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Luthfie KA. Rasyid dan Ibunda Nurhayati terima kasih atas segala curahan kasih sayang dan do’a serta dukungan yang selalu dan tak pernah berhenti.



6. Kakakku (kak Uci, kak Inda, kak Ema, bang Dedi, & kak Liza) terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini serta keponakan yang cantik dan lucu-lucu (Ira, Vien-vien, Egy & Faldaz). Senyum kalian adalah semangat untukku dan do'a kalian adalah cahaya yang menerangi langkahku.
7. Mas Adi tersayang yang setia mendengarkan keluh-kesahku, memberi solusi atas permasalahanku dan memberikan semangat serta ada di saat aku rapuh.
8. Teman *in Bangka Island* (Resty & Fina) walaupun kalian jauh, kalian selalu memberi semangat untukku.
9. Teman-temanku yang di Yogya dan teman AP 2005 , terima kasih atas dukungan kalian.
10. Teman-teman kost Samirono dan kost As-syifa (Vera, O', Chieci, Afni dan Oet), terimakasih menjadi keluargaku selama di Yogya
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Mei 2010

Defie Lastriana

NIM. 05101244004

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. BatasanMasalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9

## BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Desentralisasi Pendidikan .....	10
1. Manajemen dan Pengembangan kurikulum dalam Desentralisasi Pendidikan Pada Tingkat Sekolah .....	13
2. Pembelajaran yang Demokratis .....	20
3. Profesionalitas Guru dalam Pendidikan yang Demokratis .....	22
B. Hakikat Profesi Guru.....	26
C. Profesionalitas Guru.....	31
1. Pengertian Profesionalitas Guru .....	31
2. Pengembangan Profesionalitas Guru .....	34
3. Karakteristik Guru Profesional .....	37

D. Kompetensi Mengajar Guru .....	40
1. Pengertian Kompetensi .....	40
2. Kompetensi Guru .....	42
E. Kerangka Berfikir .....	43
F. Pengajuan Hipotesis .....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	46
B. Tempat dan waktu Penelitian .....	46
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	48
E. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Teknik Pengembangan Data .....	50
1. Instrumen Penelitian .....	50
2. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Uji Coba Instrumen .....	53
1. Uji Validitas .....	54
2. Uji Reabilitas .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
1. Uji Prasyarat Analisis .....	56
a. Uji Normalitas .....	56
b. Uji Linearitas .....	57
2. Analisis Deskriptif .....	57
3. Uji Hipotesis .....	59

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	60
1. Deskripsi Setting Penelitian .....	60
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	63
a. Desentralisasi Pendidikan .....	63
1) Otonomisasi .....	67
2) Demokratisasi .....	70
b. Profesionalitas Guru .....	74
1) Kompetensi Pedagogik .....	77

2) Kompetensi Kepribadian .....	82
3) Kompetensi Profesional .....	87
4) Kompetensi Sosial .....	90
3. Pengujian Prasyarat Analisis Regresi .....	94
a. Uji Normalitas .....	94
b. Uji Linearitas.....	95
4. Pengujian Hipotesis .....	96
a. Uji Hipotesis I .....	96
1) Persamaan Garis Regresi .....	96
2) Koefisien Determinasi .....	96
3) Pengujian Signifikansi Korelasi dengan Uji t.....	97
b. Uji Hipotesis I .....	97
1) Persamaan Garis Regresi .....	98
2) Koefisien Determinasi .....	98
3) Pengujian Signifikansi Korelasi dengan Uji t.....	98
B. Pembahasan .....	99
1. Desentralisasi Pendidikan .....	99
2. Profesionalitas Guru .....	103
3. Pengaruh Desentralisasi Pendidikan terhadap Profesionalitas Guru SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman .....	105
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Keterbatasan Penelitian .....	110
C. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Desentralisasi Pendidikan.....	12
2. Jumlah Guru SMK sebagai Populasi Penelitian .....	48
3. Jumlah Guru SMK sebagai Sampel Penelitian .....	50
4. Skor Jawaban Pertanyaan Angket.....	50
5. Kisi-kisi Penelitian Variabel Desentralisasi Pendidikan .....	51
6. Kisi-kisi Penelitian Variabel Profesionalitas Guru .....	52
7. Interpretasi nilai $r$ .....	56
8. Data Tingkat Pendidikan Guru .....	61
9. Data Status Kepegawaian Guru .....	62
10. Distribusi Frekuensi Otonomisasi Sekolah (SMK Negeri).....	67
11. Distribusi Frekuensi Otonomisasi Sekolah (SMK Swasta) .....	68
12. Distribusi frekuensi Demokratisasi Sekolah (SMK Negeri).....	71
13. Distribusi frekuensi Demokratisasi Sekolah (SMK Swasta) .....	72
14. Distribusi frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru SMK Negeri.....	78
15. Distribusi frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru SMK Swasta .....	80
16. Distribusi frekuensi Kompetensi Kepribadian Guru SMK Negeri.....	83
17. Distribusi frekuensi Kompetensi Kepribadian Guru SMK Swasta .....	85
18. Distribusi frekuensi Kompetensi Profesional Guru SMK Negeri .....	87
19. Distribusi frekuensi Kompetensi Profesional Guru SMK Swasta .....	89
20. Distribusi frekuensi Kompetensi Sosial Guru SMK Negeri .....	91
21. Distribusi frekuensi Kompetensi Sosial Guru SMK Swasta .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir .....	45
Gambar 2. Histogram Distribusi Tingkat Pendidikan Guru .....	62
Gambar 3. Histogram Distribusi Status Kepegawaian Guru .....	63
Gambar 4. Histogram Desentralisasi Pendidikan SMK Negeri.....	65
Gambar 5. Histogram Desentralisasi Pendidikan SMK Swasta .....	66
Gambar 6. Histogram Distribusi Otonomisasi Sekolah (SMK Negeri).....	68
Gambar 7. Histogram Distribusi Otonomisasi Sekolah (SMK Swasta) .....	70
Gambar 8. Histogram Distribusi Demokratisasi Sekolah (SMK Negeri).....	72
Gambar 9. Histogram Distribusi Demokratisasi Sekolah (SMK Swasta) .....	74
Gambar 10. Histogram Profesionalitas Guru SMK Negeri .....	75
Gambar 11. Histogram Profesionalitas Guru SMK Swasta.....	76
Gambar 12. Histogram Distribusi Kompetensi Pedagogik Guru SMK Negeri.....	79
Gambar 13. Histogram Distribusi Kompetensi Pedagogik Guru SMK Swasta .....	81
Gambar 14. Histogram Distribusi Kompetensi Kepribadian Guru SMK Negeri .....	84
Gambar 15. Histogram Distribusi Kompetensi Kepribadian Guru SMK Swasta.....	86
Gambar 16. Histogram Distribusi Kompetensi Profesional Guru SMK Negeri.....	88
Gambar 17. Histogram Distribusi Kompetensi Profesional Guru SMK Swasta .....	90
Gambar 18. Histogram Distribusi Kompetensi Sosial Guru SMK Negeri .....	92
Gambar 19. Histogram Distribusi Kompetensi Sosial Guru SMK Swasta.....	94

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Angket Penelitian
2. Pertanyaan Wawancara
3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrument
4. Data Hasil Penelitian SMK Negeri dan Swasta
5. Item Hasil Penelitian SMK Negeri
6. Item Hasil Penelitian SMK Swasta
7. Stastistik Deskriptif SMK Negeri
8. Stastistik Deskriptif SMK Swasta
9. Uji Prasyarat analisis SMK Negeri
10. Uji Prasyarat analisis SMK Swasta
11. Uji Hipotesis SMK Negeri
12. Uji Hipotesis SMK Swasta
13. Surat Izin Penelitian
14. Surat Keterangan Selesai Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kelangsungan hidup suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang utama dalam pembangunan suatu bangsa. Salah satu komponen yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut adalah pendidikan, sedangkan dalam pendidikan itu sendiri pastilah dibutuhkan para pendidik.

Secara formal, menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 39 ayat 2 dan pasal 40 ayat 2b), Undang-undang Republik Indonesia no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 8, 9 dan 10) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 3) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 74 tahun 2008 tentang Guru (pasal 1 ayat1 dan 2) menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S<sub>1</sub> atau D<sub>4</sub> dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pebelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S<sub>1</sub> atau D<sub>4</sub> dibuktikan dengan ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan tinggi dan persyaratan relevansi dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi



sebagai agen pembelajaran (Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial) dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik.

Sebagai tanggung jawab profesi, maka setiap guru secara pribadi berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di samping pemerintah sebagai institusi juga berkewajiban untuk mendukung usaha peningkatan kualitas ini, sebagaimana UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 44 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah (pemda) wajib membina dan mengembangkan pendidik (guru) serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah”. Melalui UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 50 ayat 4 dan 7, kebijakan-kebijakan pelaksanaan pendidikan tidak lagi ditentukan oleh pusat semata, akan tetapi diserahkan kepada wilayah masing-masing, bahkan sampai pada tingkat sekolah melalui kepala sekolah dan guru.

Sejalan dengan hal tersebut menurut UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 ayat 1, 2 dan pasal 13 ayat 1f untuk mengatur berbagai kebijakan daerahnya masing-masing termasuk dalam bidang pendidikan. Undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembinaan dalam bidang pendidikan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, salah satunya adalah

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dari berbagai kegiatan pendidikan, sarana, prasarana, ketenagakerjaan serta program pembelajaran yang direncanakan sekolah.

Sebagaimana telah disebutkan oleh Fasli Jalal, (2002: 302) Guru merupakan orang atau pihak yang terlibat dan berhubungan langsung dan jalannya proses pendidikan. Oleh karenanya tidak berlebihan bila guru dianggap ujung tombak wahana investasi peningkatan sumber daya manusia. Hal demikian diakui banyak pihak, termasuk pihak Bank Dunia yang menyoroti kondisi guru di Indonesia khususnya. Bank Dunia menegaskan bahwa guru merupakan salah satu “faktor kunci” dalam pengembangan sumber daya manusia.

Diterapkannya sistem pendidikan Indonesia yang sentralistik pada masa lalu telah memunculkan manajemen sekolah yang bersifat *top-down* (Tilaar, 2002b: 31) yang membuat seluruh kebijakan diterapkan oleh pusat, sehingga sekolah tidak dapat mengelola dirinya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat tetapi hanya sebagai pelaksana berbagai kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Demikian pula kurikulum yang bersifat nasional diterapkan diseluruh jenjang dan jenis pendidikan di seluruh daerah, membuat proses pembelajaran dilakukan secara seragam sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat. Iklim demikian telah menciptakan dan membentuk guru sebagai seorang yang tidak pernah kreatif dan selalu menunggu perintah dari atasan. Dalam sistem sentraslistik, seorang

guru akan disalahkan oleh pengawas sekolah karena memiliki prakarsa baru yang berbeda dengan pedoman yang telah digariskan dalam juklak dan juknis, meskipun prakarsa tersebut sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolah maupun daerah.

Namun dengan terjadinya reformasi pendidikan tersebut, maka guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan saat ini telah memiliki kewenangan yang luas serta tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan menentukan proses pembelajaran sesuai perubahan paradigma pendidikan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi pendidikan. Berbagai hambatan yang sebelumnya memasung kreatifitas dan kemandirian guru telah direformasi. Dengan adanya berbagai Undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, telah membuka kesempatan yang luas bagi daerah maupun sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah maupun guru untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan sesuai harapan masyarakat.

Persoalannya sekarang apakah sistem desentralisasi pendidikan saat ini guru dapat meningkatkan profesionalitasnya dan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Jawabannya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun dengan diterapkan sistem desentralisasi pendidikan (Tilaar, 2001: 9), maka setidaknya lebar dalam usaha meningkatkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bila guru sebagai “pencetaknya” kurang berkualitas bila guru-guru yang berkualitas dan profesional adalah mutlak diperlukan.

Berdasarkan pernyataan dari Zamroni, (2002: 55), peningkatan profesionalitas guru dalam kerangka sistem desentralisasi pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan yang telah jauh tertinggal. Baik bagi para pelaksanaan pendidikan seperti guru maupun bagi masyarakat sebagai *user* berbagai *output* pendidikan. Karena itu perubahan sistem pendidikan yang terdesentralistik merupakan dukungan sekaligus tuntutan pada guru untuk dapat meningkatkan profesionalismenya secara nyata.

Profesi guru sebagai jabatan profesional, maka secara pribadi berkewajiban untuk melakukan tanggung jawabnya, di samping pemerintah sebagai institusi juga berkewajiban untuk mendukung usaha peningkatan kualitas ini, sebagaimana UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 44 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik (guru) serta tenaga kependidikan pada suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Tuntutan Undang-undang kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan di atas, mendorong pemda provinsi dan kabupaten termasuk kabupaten Sleman, untuk memajukan sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Hal ini antara lain melalui pemberian kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di Kabupaten Sleman, (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2009) hingga akhir tahun 2008, kualifikasi akademik dari jumlah 3.517 guru SMA dan SMK 83%

adalah  $S_2$ - $S_1$  dan 17% nya adalah sarjana muda ( $D_3$ ,  $D_2$ , dan  $D_1$ ) dan SMA/SMK akan tetapi sarjana muda dan lulusan sekolah menengah ini sedang melanjutkan studi untuk penyetaraan pendidikan sedangkan untuk guru yang telah senior mendapatkan sertifikasi dengan menunjukkan portofolio. Bagi guru yang mengikuti penyetaraan pendidikan mendapat anggaran dana untuk peningkatan kualifikasi akademik telah disebutkan dalam PP Guru nomor 74/2008 pasal 14 ayat 3 dan 4.

Berdasarkan data yang diperoleh (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2009), di Kabupaten Sleman terdapat 49 Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari 8 SMK Negeri dan 41 SMK Swasta. Kualifikasi akademik dimana jumlah 1.906 guru SMK di Kabupaten Sleman 18% guru masih berijazah  $D_3$  bahkan masih ada yang berijazah SMA/SMK akan tetapi sebagian dari guru sedang mengikuti studi untuk penyetaraan pendidikan, akan tetapi masih ada guru yang belum melanjutkan studi dikarenakan keterbatasan pendanaan.

Dengan kondisi yang kurang mengembirakan ini, semua pihak prihatin. Akan tetapi keprihatinan saja tidaklah cukup bila tidak ditindak lanjuti dengan usaha memperbaiki hal tersebut. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang tidak dapat diperbaiki dan ditingkatkan, selama semua pihak-baik dari pemerintah daerah, Dinas atau Instansi yang terkait, pihak sekolah, dewan guru sebagai pelaksana pendidikan serta masyarakat pada umumnya mempunyai misi yang sama untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk di dalamnya kualitas aktor pendidik (guru).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah dapat dilihat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat guru yang belum dapat memenuhi kualifikasi pendidikan minimum Sarjana ( $S_1$ ) atau Diploma empat ( $D_4$ ).
2. Guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan pendidikan akan tetapi profesionalitas sebagian guru rendah.
3. Rendahnya perhatian guru terhadap peserta didik dan pembelajaran yang dilakukan cenderung hanya berorientasi pada transfer ilmu yang tentu saja akan menghambat perkembangan psikologi dan mental peserta didik.
4. Belum diketahui apakah dengan perubahan paradigma dan kebijakan pendidikan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dapat dengan serta merta langsung meningkatkan profesionalitas guru untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
5. Sistem desentralisasi pendidikan di Kabupaten Sleman khususnya telah dilaksanakan guru SMK tetapi belum diketahui, apakah sesuai dengan tuntutan reformasi pendidikan dalam hal otonomisasi sekolah serta demokratisasi pendidikan sebagaimana harapan masyarakat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang teridentifikasi di atas, cukuplah luas. Idealnya semua permasalahan tersebut dipecahkan secara komprehensif. Akan tetapi karena berbagai keterbatasan penelitian ini akan membatasi diri dengan mengambil beberapa hal dari masalah yang teridentifikasi tersebut, yaitu dengan memfokuskan diri pada profesionalitas guru dalam konteks telah ditetapkannya kebijakan desentralisasi pendidikan pada SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana profesionalitas guru di SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru di SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2. Profesionalitas guru di SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
3. Pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru di SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian tentang manajemen peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan, khususnya profesionalitas guru.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang desentralisasi pendidikan, khususnya bagi pengelola pendidikan agar masing-masing daerah tahu akan kewenangan dan kebutuhan sekolahnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR**

#### **A. Desentralisasi Pendidikan**

Menurut UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Pemerintah pusat hanya menagani kewenangan yang bersifat pengarah, perumusan, kebijakan dan pengawasan. Dengan demikian pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan penuh untuk mengatur sendiri segala urusan yang telah diserahkan oleh pusat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta kehendak daerah yang bersangkutan.

Daerah yang memiliki kewenangan desentralisasi disebut daerah otonom (Daulay, 2004: 64), yaitu daerah yang mempunyai kewenangan luas, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan serta evaluasi dalam hal penetapan anggaran dana berdasarkan aset yang dimiliki daerah. Bidang-bidang cakupan daerah menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan.

Diungkapkan oleh Walke (Rosyada, 2004:13) Reformasi pendidikan adalah refleksi pemikiran untuk melakukan berbagai pembaharuan dengan perubahan-perubahan komprehensif sebagai respon terhadap perubahan yang sedang terjadi, dan atau hasil analisis prediktif yang dilakukan secara seksama dan cermat. Kemudian reformasi juga ada kalanya dilakukan dalam bentuk-bentuk parsial dari

keseluruhan aktivitas pendidikan ada juga yang dilakukan dalam skala yang besar atau bahkan perubahan yang holistik.

Penerapan sistem desentralisasi pendidikan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang dalam masyarakat yaitu mewujudkan pembangunan pendidikan yang lebih demokratis dengan menekankan pada kebinekaan, partisipasif, akuntabilitas serta persaingan yang sehat dan kerjasama antar daerah yang tumbuh dalam suasana keterbukaan komunikasi. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, karena daerah tidak lagi terlalu tergantung dan menunggu kebijakan pusat.

Dari perbandingan pelaksanaan sistem pendidikan sentralistik dan sistem pendidikan desentralistik maka kita dapat melihat beberapa kelemahan dan keuntungan sistem desentralistik pendidikan. Beberapa kelemahan dan keuntungan dimaksud adalah sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1 Keuntungan dan Kelemahan Sistem Desentralisasi**

<b>Keuntungan</b>	<b>Kelemahan</b>
Dapat mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pendidikan	Menurunkan rasa Nasionalisme
Mendorong timbulnya kreativitas, inovasi dan profesionalisme pendidikan	Kemampuan daerah tidak sama, sehingga berpotensi timbulnya kesenjangan antar daerah
Meningkatkan kompetensi positif antar daerah dalam mencapai standar Nasional bahkan Internasional	Kualitas pendidikan tiap daerah tidak sama
Hasil pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Mobilitas antar daerah rendah sehingga berpotensi meretakan integritas bangsa
Kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah	Kesenjangan ekonomi antar daerah semakin besar
Pembelajar adalah subyek pendidikan	Timbulnya kerancuan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah setempat
Memberikan iklim yang kondusif terhadap berkembangnya demokrasi pendidikan	Timbulnya permasalahan untuk sekolah diperbatasan
	Rentang waktu pencapaian kurikulum standar nasional tidak dapat ditentukan dari pusat sehingga penyusunan program berikutnya tiap daerah tidak sama

Fasli Jalal (2002: 128)

Sementara itu keberhasilan pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan menurut Fasli Jalal (2002: 128) dapat ditunjukkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan; 2) sistem pendidikan yang mandiri; 3) otonomi pengelolaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang desentralistik; 4) relevansi program-program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan 5) pendidikan yang akuntabel.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan otonomisasi sekolah dan pemberian kewenangan yang luas pada guru serta memberi ruang

pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengevaluasian sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta harapan dari masyarakat sebagai *stakeholders* sekaligus *client* dalam pendidikan.

Bergesernya sistem pendidikan sentralisasi menjadi sistem pendidikan desentralisasi melahirkan tuntutan pendidikan yang demokratis sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Namun pendidikan yang demokratis bukanlah pendidikan yang serba bebas dan tidak terarah, tetapi juga bukan pendidikan yang terpaku secara otoriter pada pola tertentu, melainkan pendidikan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara bijak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembelajaran. Karena itu profesionalitas guru juga harus diubah sesuai dengan paradigma baru dalam sistem desentralisasi pendidikan yang memberi ruang partisipasi yang luas bagi guru maupun pembelajaran, bersifat terbuka dan akuntabel serta menghargai perbedaan namun tetap dalam kerangka tujuan pendidikan nasional.

### **1. Manajemen dan Pengembangan Kurikulum dalam Desentralisasi Pendidikan Pada tingkat Sekolah**

Sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pendidikan yang sentralistik menjadi sistem yang desentralistik maka penyelenggaraan pendidikan nasional yang selama ini dilakukan secara birokratik-sentralistik pun berubah. Sebelumnya sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan

birokrasi yang mempunyai jalur tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan mamajukan lembagannya termasuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pengembangan sekolah sebagai sebuah pendekatan perubahan pendidikan lewat desentralisasi, setidaknya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, meningkatkan prestasi siswa, dan *kedua*, penguatan dorongan kapasitas sekolah. Perubahan ini antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan (Harris, 2002: 38) sebagai berikut:

- 1) pendekatan *power coercive*, yaitu apabila anggota organisasi atau sebuah institusi dalam hal ini sekolah melakukan perubahan karena adanya “tekanan” yang kuat.
- 2) pendekatan *rational empirical*, yaitu apabila anggota organisasi atau sebuah insitusi melakukan perubahan karena memahami secara logis dan rasional perlunya perubahan.
- 3) pendekatan *normative/re-educative*, yaitu apabila anggota organisasi atau sebuah insitusi melakukan perubahan karena terdorong secara emosi dan secara pribadi.

Proses peningkatan mutu pendidikan tidak bisa terhindar dari terjadinya perubahan. Dalam konteks pendidikan Nasional, (Suyanto, 2000: 37) perubahan dilakukan dalam kerangka setidaknya mencapai 4 empat) hal yang sangat fundamental. *Pertama*, mengoptimalkan nilai layanan kepada peserta didik. *Kedua*, sekolah harus menargetkan untuk mencapai hasil yang luar biasa. *Ketiga*, sekolah harus meningkatkan produktivitas, baik produktivitas pengelolaan

sekolah. *Keempat*, sekolah berusaha mengkonsolidasikan fungsi-fungsi yang ada dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, sehingga organisasi sekolah menjadi efisien.

Atas dasar itulah dalam sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional (2001: 23), mendesentralisasikan kewenangan ke tingkat sekolah yang meliputi:

- 1) pendekatan dan evaluasi,
- 2) pengelolaan kurikulum,
- 3) pengelolaan proses belajar-mengajar,
- 4) pengelolaan ketenagaan,
- 5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan,
- 6) pengelolaan keuangan,
- 7) pelayanan pembelajaran,
- 8) hubungan sekolah dan masyarakat,
- 9) pengelolaan iklim sekolah.

Sementara menurut Abu Duhuo (2002: 18) kewenangan pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi pada tingkat sekolah adalah kebijakan-kebijakan yang secara langsung pada kegiatan belajar-mengajar. Kewenangan-kewenangan tersebut meliputi:

- 1) pengetahuan: desentralisasi keputusan berkaitan dengan kurikulum, termasuk keputusan mengenai tujuan dan sasaran pendidikan;
- 2) teknologi: desentralisasi keputusan mengenai sumber, media, alat atau sarana belajar-mengajar lainnya;
- 3) kekuasaan: desentralisasi kewenangan dalam membuat keputusan;
- 4) material; desentralisasi keputusan mengenai penggunaan fasilitas, pengadaan dan peralatan alat-alat sekolah;
- 5) manusia: desentralisasi keputusan mengenai sumber daya manusia, termasuk peningkatan profesionalisme dalam hal-hal berkaitan dengan proses belajar-mengajar;
- 6) waktu: desentralisasi keputusan mengenai alokasi waktu yang digunakan;
- 7) keuangan: desentralisasi keputusan mengenai alokasi keuangan.

Kewenangan yang diberikan pada tingkat sekolah tersebut mengisyaratkan sebagai pemberian otonomi pada sekolah secara penuh. Dengan demikian dalam sistem desentralisasi pendidikan (Depdiknas: 2001), dilakukan reorientasi dalam penyelenggaraan pendidikan dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menjadi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yaitu model, manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah, karyawan dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan otonomi yang lebih besar tersebut maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya. Dengan demikian sekolah lebih mandiri dan lebih berdaya sehingga

mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhannya dan melibatkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu sekolah.

Selain merubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah, otonomi sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan, kurikulum menempati posisi yang sangat menentukan, karena kurikulum merupakan seperangkat rancangan pengetahuan dan keterampilan sebagai target utama dalam kegiatan belajar-mengajar. Menurut Rosyada (2004: 26), kurikulum tidak lagi bermakna rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa, tetapi seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik dibawah arahan bimbingan sekolah.

Kurikulum yang dikembangkan dalam sistem desentralisasi pendidikan adalah model penyusunan kurikulum yang mengacu pada kebutuhan daerah karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi pendidikan juga membawa implikasi terhadap sistem dan penyelenggaraan pendidikan termasuk peningkatan dan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu:



- 1) diversifikasi kurikulum, merupakan proses penyesuaian, perluasan, pendalaman materi pembelajaran agar dapat melayani keberagaman kebutuhan dan tingkat kemampuan pembelajaran serta kebutuhan daerah setempat dengan kompleksitasnya;
- 2) penetapan standar kemampuan, dimaksudkan untuk menetapkan ukuran keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh pembelajaran pada setiap tingkatan secara maju dan berkelanjutan sebagai upaya kendali dan jaminan mutu;
- 3) pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonomi merupakan pijakan utama lebih memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan.

Kurikulum Berbasis kompetensi merupakan pelaksanaan desentralisasi dari otoritas pusat kepada otoritas daerah dan sekolah, dimana dalam kurikulum ini pemerintah hanya menyusun kompetensi standar, sedangkan elaborasi *sylabus*-nya diserahkan pada daerah yang selanjutnya diserahkan pada sekolah dan gurunya. Dengan demikian kurikulum tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara tepat. Pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jadi KTSP (Mulyasa, 2007: 12) adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Penyusunan kurikulum dan desentralisasi pendidikan menurut beberapa hal, antara lain sebagaimana ditegaskan Tilaar (2002: 374) sebagai berikut:

- 1) dunia sebagai obyek untuk dikenal oleh pembelajar sendiri,
- 2) dunia kehidupan yang dialami pembelajar merupakan dunia historis dan dunia kebudayaan sebagai realitas,
- 3) pembelajar menghubungkan diri di dalam proses individualisnya dengan realitas,
- 4) realitas yang dihadapi oleh pembelajar mempunyai berbagai kemungkinan untuk mengubah keberadaannya. Dengan mengetahui dunia yang nyata, maka pembelajar juga akan menemukan berbagai keseimbangan di dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu tidak mungkin suatu program kurikulum dibuat statis dan searah sebagaimana yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan sentralistik.

Merespon berbagai kebijakan pemerintah di satu sisi dan kebutuhan daerah di sisi lain seperti dipaparkan di atas, sekolah dituntut mampu menterjemahkan esensi kebijakan serta memahami kondisi lingkungannya. Sekolah memformulasikan ke dalam kebijakan mikro, yaitu dalam bentuk program-program sekolah melalui strategi pelaksanaan program menurut skala prioritas dan dievaluasi oleh sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dengan demikian berbagai kebijakan dan inovasi pendidikan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

## 2. Pembelajaran yang Demokratis

Menurut Rosyada (2004: 91) mengatakan bahwa mengajar adalah sebuah tindakan dari seseorang yang mencoba untuk membantu orang lain untuk mencapai kemajuan berbagai aspek seoptimal mungkin sesuai potensinya. Pandangan ini didasarkan pada paradigma bahwa keberhasilan mengajar bukan terletak pada banyaknya ilmu yang disampaikan guru tetapi seberapa besar guru memberi peluang pada siswa untuk belajar dan memperoleh segala sesuatu yang ingin diketahuinya.

Merujuk pada pengertian mengajar tersebut maka suatu proses pembelajar akan menempatkan siswa sebagai pembelajar aktif. Namun dalam kenyataan proses belajar yang selama ini terjadi cenderung bersifat pembelajaran pasif, dimana guru menjadi aktor paling aktif sebagai pembelajar ilmu dan siswa sebagai penerima ilmu. Paulo Freire (2004: 89) menyebutnya dengan pendidikan bergaya baik, pendidikan model deposito dimana guru mendepositokan pengetahuan serta berbagai pengalaman pada siswa dan sebaliknya siswa hanya menerima, mencatat dan mem-*file*-kan. Model ini menurutnya sebagai bentuk penindasan yang menghambat kreativitas dan pengembangan potensi siswa. Bahasa yang senada Mosston dalam buku Rosyada (2004, 89) menyebutkan sebagai pendidikan yang komando, yang mengembangkan prinsip distribusi sebuah keputusan harus dilakukan secara hierarkis, dari atas ke

bawah, dari guru ke siswa. Gaya ini mendapat kritik keras karena mematikan kreativitas siswa, tidak menghargai siswa dan kurang peduli pada keragaman siswa.

Kritik terhadap model pembelajaran pasif juga disampaikan Jerome Bruner yang diterjemahkan oleh Nana Sudjana (1991: 47). Bruner berpendapat yang paling tepat adalah model *discovery learning* (belajar menemukan), sehingga memungkinkan siswa mengembangkan informasi dan keterampilan baru yang telah dipelajari sebelumnya.

Pengembangan berbagai model pembelajaran sampai pada pelibatan dan pemberian kesempatan siswa untuk melakukan eksplorasi keilmuan sendiri memperlihatkan trend pada pola dan model belajar yang berpusat pada siswa. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa memiliki tingkat pelaksanaan demokrasi yang tinggi, meskipun tidak dapat diartikan sebagaimana demokrasi dalam politik yang berarti pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Tetapi substansi dari semangat demokrasi itu dalam model pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam mencari sekaligus menentukan ilmu pengetahuan, sementara guru berperan lebih sebagai fasilitator.

Pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi hal yang dianggap sebaliknya, yaitu pembelajaran yang otoriter dan tidak demokratis di segala bidang kehidupan membawa implikasi terhadap guru untuk memahami dan menyadari paradigama ini. Praktek-prakek

pembelajaran masih didominasi oleh guru dan guru seperti memiliki otoritas memaksakan siswa untuk memenuhi semua yang diinginkan. Namun, ke depan guru yang demikian akan dianggap tidak profesional dan ditinggal oleh masyarakat karena kualitas pendidikan yang dicapai melalui model pembelajaran yang demikian terbukti kurang memuaskan dan peserta didik merasakan keterpaksaan dalam belajar yang berarti bertentangan dengan semangat demokrasi.

### **3. Profesionalitas Guru dalam Pendidikan yang Demokratis**

Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah membawa semangat demokratis dan otonomisasi dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan juga di dalam kelas. Penyelenggaraan pendidikan yang demokratis di sekolah, paling tidak mencakup tiga fokus. *Pertama*, pendidikan yang demokratis dalam penyusunan, peningkatan dan implementasi kurikulum di sekolah; *kedua*, pendidikan yang demokratis dalam proses pembelajaran; dan *ketiga*, pendidikan yang demokratis dalam pengelolaan atau manajemen sekolah.

Zamroni (2001: 9) mengartikan demokrasi di sekolah sebagai: “interaksi dan kerjasama berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain, berfikir kreatif, menemukan solusi atas problem yang dihadapi bersama”. Secara implisit berarti pendidikan di sekolah yang demokratis dapat mendorong dan memberikan kesempatan kepada semua (guru, siswa serta semua yang

terlibat) punya komitmen untuk menjadi agen sosial dalam pemberdayaan ke arah yang lebih baik.

Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang memenuhi tuntutan demokratis tersebut, selain dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi akademik sebagaimana disyaratkan UU no 14 tentang guru dan dosen tahun 2005, guru juga harus seorang yang memiliki jiwa yang demokratis. Dalam hal ini Daulay (2004: 102) memberikan ilustrasi bahwa “seorang pengajar pertukangan harus meyakinkan siswanya bahwa dia memiliki keahlian yang meyakinkan di bidang pertukangan bukan sekedar teori seorang yang mengajar piano harus terampil main piano, seorang pengajar PMP harus seorang yang mempercayai betul ideologi Pancasila sebagai ideologi yang tangguh...”. Dengan demikian seorang yang akan mengajar dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dalam sikap kesehariannya.

Guru profesional dalam pendidikan yang demokratis juga harus dapat menciptakan suasana dan iklim demokratis dalam kelasnya, guru harus mampu mengembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi serta kerjasama diantara peserta didik dan antara peserta didik dengan gurunya, disamping itu guru juga harus siap dievaluasi, diberi masukan dan kritisi secara positif, baik oleh siswa maupun orang tua siswa, sehingga mereka benar-benar menjadi profesional bukan seorang tokoh yang feodal.

Menurut Paul Suparno (2004: 37) unsur-unsur yang selama ini kurang mendukung iklim demokrasi harus diminimalkan bahkan ditinggalkan dalam proses pembelajaran di sekolah demokratis. Unsur-unsur dimaksudkan antara lain seperti: (1) anggapan pembelajar sebagai “tabularasa”; (2) metode mengajar “*banking system*” (guru memberi, pembelajar menerima); (3) bahan pelajaran hanya diambil dari diktat; (4) indoktrinasi sifat guru; (5) suasana yang homogen; (6) kurikulum dari pusat; serta (7) kegiatan belajar hanya di lingkungan sekolah, sebaliknya guru harus berani memberikan kebebasan secara demokratis kepada siswa maupun dirinya untuk melakukan dan mencoba ide-ide baru, hal-hal baru dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat serta kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam pemikiran Paulo Freire (2000: 69), pendidikan yang demokratis didominasi oleh keinginan untuk membuat nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan berfikir dan kebebasan mengutarakan pendapat, karena pendidikan yang cenderung membangkitkan ketidakpuasan akan menurunkan motivasi, menyebabkan huru-hara dan keputusasaan pembelajar. Sejalan dengan itu Neil Postman (1995: 162) mengungkapkan bahwa sekolah akan kehilangan maknanya sebagai wahana pendewasaan bagi pembelajar, jika ruang-ruang kelas lebih mirip dengan kerangkeng-kerangkeng, sehingga pembelajar tidak mempunyai kebebasan sama sekali. Inti dari pemikiran Paulo

tersebut mengisyaratkan guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang menghargai *human dignity*, kebersamaan dan kebebasan melalui sikap yang menyenangkan, hangat dan penuh keakraban, serta tidak ada batas hierarkis yang kaku antara guru dengan siswa.

Sementara itu Zamroni (2001: 74) mengatakan kendala lain yang kurang memberikan dukungan berkembangnya iklim demokratis dalam pendidikan adalah masih terlalu banyaknya kebijakan pendidikan yang bersifat teknis yang tidak harus mampu menghayati apa dan bagaimana yang terjadi di ruang kelas serta seakan-akan meragukan kemampuan guru, juga banyaknya tuntutan beban pelajaran yang sama untuk semua pembelajar padahal kemampuan dan latar belakang tidak sama. Ini menyebabkan pembelajar tidak dapat menikmati proses persekolahannya, sekolah hanya dijalani untuk memperoleh ijazah sehingga guru tidak mempunyai ruang gerak dan kebebasan untuk melakukan improvisasi dalam proses pendidikan maka jadilah materi pelajaran kering, tidak menarik dan tidak relevan dengan realitas kehidupan yang dihadapi pembelajar sehingga akan menurunkan motivasi pembelajar.

Selain itu juga masih banyak guru yang tidak tercermin karakteristik pekerjaannya, guru yang masuk kelas tanpa perencanaan sama sekali karena menganggap mengajar merupakan pekerjaan yang



rutin yang setiap hari dikerjakan dengan karakter murid sama setiap tahunnya, serta kurikulum dan bahan ajar yang juga sama.

Kendala-kendala yang ada tersebut akan dapat di atasi dengan mudah apabila guru, kepala sekolah dan masyarakat sebagai *stakeholder* sekaligus *client* memiliki persamaan persepsi, visi dan misi yang sama dalam menciptakan pendidikan yang demokratis dengan membangun model sekolah demokratis.

## **B. Hakikat Profesi Guru**

Secara terminologi tertentu, “Profesi“ dapat diartikan sebagai suatu pendidikan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Ibrahim Bafadal (2003: 4-6) menyebutkan ciri suatu “ Profesi “ antara lain: (1) adanya pengetahuan khusus, (2) adanya kaidah atau standar moral yang tinggi, (3) mengabdikan pada kepentingan masyarakat, (4) ada izin khusus untuk melaksanakan suatu profesi, (5) biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Hal di atas berbeda dengan apa yang disampaikan Oemar Hamalik (2002: 1) yang mengatakan bahwa profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Dengan memperhatikan definisi atau batasan profesi tersebut. Profesi merupakan suatu pekerjaan dapat juga sebagai jabatan yang menuntut

keahlian tertentu dan memiliki etika khusus menghidupi kehidupannya. Dengan demikian seorang profesional berarti seseorang yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan syarat-syarat, dan tuntutan dari profesi yang disandangnya. Sifat dan sikap profesional yang dimiliki seseorang terkait dengan profesinya disebut “profesionalisme” atau “profesionalitas”. Dalam konteks seperti ini kadang juga hanya disebut “profersional” yang umumnya berarti merujuk pada orang yang menyandang suatu profesi, atau merujuk pada kinerja (*performance*) seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Sudarwan Danim, 2002: 21) profesionalisme dan profesionalitas dalam konteks guru sebagai pekerjaan ditegaskan dalam UU RI no 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Hal demikian disebutkan pada pasal 5 ayat 1: “profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip profesionalitas....”. Dengan demikian, guru sebagai profesi menuntut penyandanginya memiliki keahlian dan kompetensi serta tuntutan kerja profesioanal yang diisyaratkan oleh profesinya sebagaimana profesi lain. Dengan kata lain, sosok guru yang profesional bukan hanya sekedar mampu untuk menyampaikan materi pelajaran semata, akan tetapi memerlukan standar kompetensi tertentu, salah satunya sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang yang sama pasal 10 ayat 1:

“ kompetensi guru sebagaimana dimaksudkan pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Sejalan dengan hal ini, Suyanto (2003) dalam dialog interaktif tentang peran profesionalitas guru di LPM-UNY menyatakan gambaran sederhana tentang profesionalitas guru, sebagai berikut:

“keterampilan profesional yang perlu dimiliki oleh guru agar ia bisa memenuhi amanah Undang-undang tentu banyak sekali. Akan tetapi aspek profesionalitas dalam konteks pemberdayaan pendidikan di berbagai satuan dan jenjang yang sangat penting dimiliki guru mencakup persoalan kepemimpinan, keterampilan profesionalitas mewujudkan sekolah yang efektif dan keterampilan profesional dalam proses pembelajaran”.

Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang memiliki peran sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi sekolah serta mengembangkan pembelajaran secara optimal mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu keberadaan guru yang profesional merupakan hal yang sangat penting seperti di ungkapkan Shapero (Ibrahim Bafadal, 2003: v) bahwa pelaku pekerja profesional merupakan sumber daya yang sangat penting pada setiap aktivitas profesional, kendati memang semua sumber daya tanpa kecuali mempunyai peran dalam menghasilkan *performance* profesionalitas tertentu.

Sehubungan dengan profesionalitas guru, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga Kependidikan

(Dirjen Dikdasmen) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas,

2004: 6) menetapkan standar kompetensi guru SMK yang meliputi:

- a. komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan yang terdiri dari 2 sub-komponen kompetensi.

*Pertama*, sub-komponen pengelolaan pembelajaran, yaitu:

- 1) menyusun rencana pembelajaran,
- 2) melaksanakan pembelajaran,
- 3) menilai prestasi belajar peserta didik,
- 4) melaksanakan tindak lanjut penilaian prestasi peserta didik.

*Kedua*, sub-komponen kompetensi wawasan kependidikan, yaitu:

- 1) memahami landasan kependidikan,
- 2) memahami kebijakan pendidikan,
- 3) memahami tingkat perkembangan siswa,
- 4) memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi,
- 5) pembelajarannya,
- 6) menerapkan kerjasama dalam pekerjaan,
- 7) memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan.
- b. komponen kompetensi akademik/vokasional, yaitu menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran.
- c. komponen kompetensi pengembangan profesi, yaitu mengembangkan profesi keguruan.

Menurut Depdiknas (2004: 5-6), selain tiga kompetensi itu guru sebagai pribadi yang utuh juga harus memiliki sikap dan kepribadian yang positif yang senantiasa melengkapi dan melekat pada setiap komponen kompetensi yang menunjang profesi guru.

Hal di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dauly (2004: 102) yang mengelompokkan kompetensi tersebut: (1) kompetensi penguasaan keilmuan, seorang guru harus menguasai ilmu yang akan diajarkan dengan baik dan sesuai dengan tingkat pada siapa ilmu itu diberikan, mencintai ilmu dan senantiasa giat menambah ilmu; (2) kompetensi kemampuan mengkomunikasikan ilmunya, termasuk di

dalamnya adalah kemampuan persiapan mengajar, penguasaan kelas, penguasaan metode mengajar yang tepat untuk mata pelajaran tertentu, kemampuan sumber/media, kemampuan hubungan interpersonal dan lain-lain; (3) kompetensi moral akademik, kemampuan mentranfer nilai, sebagai panutan atau teladan. Sebagai teladan ini, merupakan kompetensi moral yang terkait dengan perilaku guru yang menjadi sumber moral bagi anak didiknya.

Berbeda dengan yang Djohar (1991: 44) ungkapkan bahwa guru yang profesional harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai dan menganalisis hasil belajar. Untuk mendukung kemampuan tersebut, seorang guru profesional setidaknya memiliki 10 kompetensi kemampuan dasar, yaitu: (1) menguasai bahan; (2) mengelola program; (3) mengelola kelas; (4) menggunakan media dan sumber mengajar; (5) menguasai landasan kependidikan ; (6) mengelola interaksi belajar; (7) menilai prestasi pembelajaran untuk kepentingan pengajaran; (8) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengadakan penelitian untuk peningkatan pengajaran; dan (10) mengembangkan profesi keguruan.

Dengan memperhatikan berbagai pendapat di atas, hal yang paling mudah teramati dari profesionalitas guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Intreraksi yang terjadi dalam peristiwa belajar-mengajar mempunyai materi pelajaran, tetapi juga mampu membuat perencanaan pembelajaran yang realistis dan

pencapaian target setiap program dengan jelas, melakukan inovasi pendidikan dan menggeser peran pembelajaran dari peran sebagai “konsumen” seperti: menyalin, mendengar dan menghafal, ke peran sebagai “produsen” seperti: bertanya, meneliti, mengarang, menulis kisah sejarah, presentasi hasil pengamatan dan lain-lain. Dengan kata lain kegiatan pembelajaran, harus difokuskan pada model “pemberdayaan” dan “pengkoordinasi” dari pada model *drill* dan pemaksaan (*indoktrinasi*) sekaligus menanamkan sikap dan nilai, memberikan dorongan atau motivasi kepada pembelajar serta dapat dijadikan suri teladan “ing ngarso sungtolodo, ing madyo mangukarsa, tut huri handayani”.

### **C. Profesionalitas Guru**

#### **1. Pengertian Profesionalitas Guru**

Moh. Uzer Usman (2002: 14) mengartikan profesionalitas sebagai suatu pekerjaan yang sifatnya profesional sehingga memerlukan beberapa bidang ilmu yang harus dipelajari dan diaplikasikan untuk kepentingan umum. Jadi profesionalitas menuntut adanya pengetahuan yang luas untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan seseorang. Menurut Sudarwan Danim (2002:23) profesionalisme atau profesionalitas dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2005: 789) mendefinisikan profesionalitas adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalitas disini didasarkan atas mutu dan kualitas seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Sedangkan menurut Maister dalam bukunya *True Professionalism* sebagaimana dikutip oleh Suparlan (2005: 180), *professionalism is predominantly an attitude, not a set of competencies*. Jadi profesionalisme tidak hanya terikat pada kompetensi melainkan pada sikap. Sikap yang dimaksud adalah sikap untuk mau dan mampu menjadi profesional melalui upaya pengembangan dan pembinaan guru.

Dari pendapat beberapa tokoh di atas memperlihatkan adanya keberagaman pandangan dalam mengemukakan pengertian dari profesionalitas. Sebagian tokoh memandang profesionalisme atau profesionalitas sebagai suatu komitmen terhadap pekerjaan sedangkan sebagian tokoh hanya memandang profesionalitas sebagai sikap dan kemauan untuk mengembangkan dirinya. Akan tetapi dari beberapa pengertian di atas memiliki beberapa kesamaan yaitu berkaitan dengan pekerjaan yang menuntut adanya keterampilan, kemampuan, dan keahlian khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan pengertian profesionalitas adalah suatu komitmen dan sikap dimana seseorang memandang pekerjaannya merupakan pekerjaan profesional yang menuntut adanya pengetahuan yang luas agar dapat

menunjukkan mutu dan kualitas dalam menjalankan pekerjaan dalam profesinya serta selalu berupaya mengembangkan dirinya.

Istilah guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Dalam PP No. 74 tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (2005: 32) mendefinisikan guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Zakiyah Daradjat yang dikutip oleh Suparlan (2005: 13) menyatakan guru adalah pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut terdapat beberapa pandangan yang berbeda antar definisi guru. Sebagian tokoh mendefinisikan guru dari sudut pandang pendidikan dan yang lain berdasarkan pada tugas yang dilakukan. Secara umum pengertian dari guru adalah orang yang bertugas dan memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan



dasar dan pendidikan menengah yang menuntut keahlian dan kemampuan khusus sehingga dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dimiliki guru kepada anak didiknya.

## **2. Peningkatan Profesionalitas Guru**

Peningkatan profesional guru (Ibrahim Bafadal, 2003: 44) adalah membentuk guru yang belum matang menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi, yang belum profesional menjadi profesional. Dengan demikian seorang guru bukan seorang yang mengajar saja tetapi juga profesi yang menurut dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat, selalu meningkatkan dan merubah dirinya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial dalam masyarakat baik melalui insitusi maupun secara pribadi.

Profesi guru bukan merupakan profesi yang sudah jadi karena guru sebagai seorang profesional harus menjalankan profesinya berdasarkan profesionalitas bukan secara amatir. Tilaar (2002: 384) menyatakan seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan karyanya secara sadar melalui pendidikan dan pelatihannya. Ini artinya menjadi guru berarti harus terus-menerus mengembangkan profesinya melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, karena pengalaman mendidik bukanlah pekerjaan yang rutin.

Di samping itu suatu pekerjaan yang profesional, (Ibrahim Bafadal, 2003: 11) guru juga memerlukan beberapa bidang ilmu pendukung yang harus dipelajari kemudian diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Karenanya seorang guru yang profesional tidak cukup hanya memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, tetapi guru profesional juga harus memiliki pengetahuan luas dalam pendidikan, memiliki kematangan yang tinggi, visioner, kreatif dan inovatif, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal.

Peningkatan profesi guru selama ini dilakukan secara individu maupun lewat organisasi profesi. Peningkatan profesi secara individual antara lain melalui penataran, diklat, Kerja Kelompok Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Sedangkan peningkatan profesi keguruan melalui organisasi profesi antara lain secara aktif mengikuti diskusi kelompok, ceramah ilmiah, karya wisata, studi banding, buletin organisasi, loka karya dan lain-lain.

Menurut Daulay (2004: 66-67), untuk meningkatkan profesionalitas guru banyak aspek yang terkait di dalamnya seperti tingkat pendidikan, kemampuan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik, moralitas dan loyalitas terhadap tugas serta kesejahteraan guru. Program peningkatan profesional guru juga dapat dilaksanakan (Ibrahim Bafadal, 2003: 45) secara efektif dan efisien melalui langkah-langkah sistematis sebagai berikut.

- a. mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi maupun dialami guru;
- b. menerapkan program peningkatan profesional guru yang diperlukan untuk kekurangan, kelemahan serta masalah-masalah di atas;
- c. merumuskan tujuan program peningkatan profesional guru yang diharapkan dapat dicapai pada akhir program peningkatan;
- d. menetapkan serta merancang materi dan media yang akan digunakan dalam peningkatan profesional guru;
- e. menetapkan serta merancang metode dan media yang akan digunakan dalam peningkatan profesional guru;
- f. menetapkan bentuk dan mengembangkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan program peningkatan profesional guru;
- g. menyusun dan mengalokasikan anggaran program peningkatan profesional guru;
- h. melaksanakan program peningkatan profesional guru dengan materi, metode, media yang telah ditetapkan dan dirancang;
- i. mengukur keberhasilan program peningkatan profesional guru;
- j. menerapkan program tindak lanjutnya.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru adalah dengan kenaikan jabatan/pangkat dengan angka kredit di mana guru berkualitas dapat mencapai jenjang kepangkatan tertinggi hingga pengolong IV/e. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993 tentang Petunjuk Praktis Peningkatan Profesi bagi jabatan fungsional guru yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sistem Standarisasi dan Tenaga Profesi Tenaga Kependidikan Menengah Dikdasmen (Depdiknas, 2001: 2), disebutkan bahwa kegiatan yang termasuk dalam peningkatan profesi meliputi:

- a. karya tulis/karya ilmiah di dalam bidang pendidikan,
- b. menemukan teknologi tepat guna,
- c. membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan,
- d. menciptakan karya seni,
- e. mengikuti peningkatan kurikulum.

Salah satu upaya peningkatan profesionalitas guru yang terbesar dan paling menyeluruh adalah ditetapkan UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan penghargaan dan perlindungan sekaligus menegaskan hak dan kewajiban guru terhadap tuntutan peningkatan profesional. Meskipun Undang-undang ini belum ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknisnya tetapi setidaknya dengan disahkannya UU no 14 tahun 2004 tentang Guru dan Dosen ini memperlihatkan adanya *good will* pemerintah terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya guru.

### **3. Karakteristik Guru Profesional**

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar* yang dikutip oleh Martinis Yamin (2006: 24). Guru yang profesional harus memiliki persyaratan sebagai berikut.

- a. memiliki bakat sebagai guru,
- b. memiliki keahlian sebagai guru,
- c. memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi,
- d. memiliki mental yang sehat,
- e. berbadan sehat,
- f. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas,
- g. guru adalah manusia berjiwa Pancasila,
- h. guru adalah seorang warga negara yang baik.

Menurut Mulyasa (2007: 11) disebutkan bahwa unuk menjadi guru profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki minimal lima hal, yaitu:

- a. mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya,
- b. menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik,
- c. bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi,
- d. mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya,
- e. seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Menurut Glickman yang dikutip oleh Mulyasa (2007: 13) guru profesional memiliki dua ciri, yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Selain itu, menurut hasil lokakarya pembinaan kurikulum pendidikan guru UPI Bandung yang dikutip oleh Oemar Hamalik (2006: 37-38) guru yang profesional memiliki kriteria sebagai berikut.

- a. fisik  
Meliputi: (1) sehat jasmani dan rohani, (2) tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b. mental/kepribadian  
Meliputi: (1) berkepribadian/berjiwa pancasila, (2) mampu menghayati GBHN, (3) mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, (4) berbudi pekerti yang luhur, (5) berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, (6) mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, (7) mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, (8) mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, (9) bersikap terbuka, peka, dan inovatif, (10) menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya, (11) ketaatannya akan disiplin, (12) memiliki *sense of humor*.
- c. keilmiahan/pengetahuan  
Meliputi: (1) memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, (2) memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, (3) memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, (4) memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, (5) senang membaca buku-buku ilmiah, (6) mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi, (7) memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar-mengajar.
- d. keterampilan  
Meliputi: (1) mampu berperan sebagai organisator proses belajar-mengajar, (2) mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi, (3) mampu menyusun garis besar program pengajaran (GBPP), (4) mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, (5) mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, (6) memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

Menurut Martinis Yamin (2006: 23-24) sebagai seorang guru profesional, dia memiliki kealian, keterampilan dan kemampuan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara: “Tut wuri handayani, ing ngarsa sung tolodo, Ing madyo mangun karso”. Tidak cukup dengan

menguasai materi pelajaran akan tetapi mengayomi murid, menjadi contoh atau teladan bagi murid serta selalu mendorong murid untuk lebih baik dan maju. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.

Dari berbagai karakteristik guru profesional menurut para tokoh dan ahli di atas walaupun terdapat beberapa perbedaan akan di beberapa hal terdapat persamaan. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan karakteristik guru profesional meliputi:

- a. memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani,
- b. memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan menjadi guru,
- c. komitmen yang kuat terhadap kepentingan siswa,
- d. sikap bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan belajar-mengajar,
- e. motivasi yang timbul dari keinginan untuk membantu dengan lebih mementingkan kepuasan rohani dibandingkan kepuasan rohani dibandingkan kepuasan ekonomi,
- f. selalu mau berusaha untuk mengembangkan dirinya untuk menambah pengetahuan dan mendalami keahliannya,
- g. penampilan serta perilaku yang dapat dijadikan sebagai suri teladan.

## **D. Kompetensi Mengajar Guru**

### **1. Pengertian Kompetensi**

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris “*competence*” yang berarti kemampuan atau kecakapan. Pusat Kurikulum Batlibang memberikan pengertian bahwa kompetensi merupakan pengetahuan,

keterampilan dan nilai-nilai dasar direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak bagi peserta didik secara konsisten dan terus-menerus sampai menjadi kompeten dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut Kus Eddy. dkk, (2002: 1) kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi meliputi persyaratan apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu, untuk mengatur tugas yang berbeda dalam pekerjaan, untuk mengatasi kendala yang ada, untuk menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan pekerjaan, termasuk bekerjasama dengan orang lain.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru dalam mengajar merupakan hal yang sangat penting karena guru merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

Mulyasa (2004: 37-38) menyatakan kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan



konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Nana Sudjana (2002: 17) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Berdasarkan uraian tentang beberapa pengertian kompetensi tersebut dapat dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dan kecakapan seseorang dalam mengajar dan mendidik, mampu mendemonstrasikan pengetahuan yang diperoleh serta memiliki sikap dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan bidangnya dalam mencapai suatu tujuan. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, latihan, penataran dan pengalaman lain sesuai dengan tingkat kualifikasi yang ingin dicapai sebagai tujuannya.

## **2. Kompetensi Guru**

Kompetensi guru dapat dirangkum ke dalam empat bidang kompetensi, Depdiknas, (2004: 3) yaitu (1) penguasaan bidang studi, (2) pemahaman tentang peserta didik, (3) penguasaan cara pembelajaran yang mendidik, dan (4) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan.

Sedangkan menurut PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru mencakup:

- 1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya,
- 2) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia,
- 3) Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan,
- 4) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

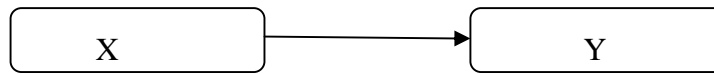
Keempat kompetensi tersebut secara praktis saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Seorang guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu pula melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Keempat kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Reformasi tahun 1999 membawa implikasi berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, baik dari sisi paradigma maupun kebijakan pendidikan. Salah satu perubahan paradigma pendidikan dari yang sentralistik ke arah pemberian otonomi kepada daerah. Hal ini melahirkan sistem desentralisasi pendidikan sebagai bentuk perubahan dari sistem sentralisasi yang diberlakukan sebelumnya.

Penerapan sistem desentralisasi telah melahirkan berbagai kebijakan dan perkembangan yang sangat revolusioner dalam konteks usaha perbaikan kualitas pendidikan. Diantaranya adalah UU No 20 tahun 2003 dan UU No 14 tahun 2005 yang salah satunya adalah penekanan pada profesionalisasi jabatan guru dan dosen.

Pemberian otonomi yang luas pada sekolah sebagai pelaksanaan dari diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan juga merupakan kunci dari pelaksanaan demokratisasi dan otonomisasi yang memberi ruang sangat luas tidak saja bagi upaya peningkatan kualitas pembelajar tetapi sekaligus juga dalam hal memenuhi tuntutan profesionalitas guru. Dalam sistem desentralisasi pendidikan, berbagai model dan strategi pembelajaran yang revolusioner dan konstruktif bagi tercapainya kemampuan pembelajar yang maksimal dapat dilakukan tanpa adanya hambatan-hambatan struktural dan kekuatan kurikulum sehingga membawa dampak positif bagi peningkatan kemampuan dan profesionalitas guru sebagai para pelaku pendidikan. Semakin intent pelaksanaan desentralisasi pendidikan semakin baik profesionalitas guru SMK.



**Gambar. 1**  
**Alur kerangka berpikir**

Keterangan:

X = Variabel Desentralisasi Pendidikan

Y = Variabel Profesionalitas Guru SMK

#### **F. Pengajuan Hipotesis**

1. Ada pengaruh positif antara desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK Negeri di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2. Ada pengaruh positif antara desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK Swasta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Disebut demikian, karena penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok dengan tujuan mendeskripsikan implementasi desentralisasi pendidikan dan aspek profesionalitas guru pada suatu setting penelitian, yang selanjutnya dilakukan eksplorasi atau penggalian pendapat, respon dan sikap subyek penelitian tentang implementasi desentralisasi pendidikan dan profesionalitas guru (Cresswell, 2002: 18). Hasil penelitian yang berwujud data kuantitatif akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Alasan pemilihan lokasi penelitian, antara lain karena dari 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok yang jumlah sekolah di dalamnya yang paling banyak sehingga bagi penulis Kecamatan ini dapat mewakili dan di dalamnya terdapat beberapa sekolah yang cukup beragam dan keberagaman ini penulis anggap sebagai ‘karakteristik’ tersendiri. Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten ini meliputi 2 SMK berstatus negeri yaitu SMK N 1 Depok, SMK N 2 Depok dan 6 SMK berstatus Swasta antara lain SMK PI Ambarukmo Depok, SMK Trisula Depok, SMK YPKK 3 Sleman, SMK Penerbangan AGG, SMK

Karyarini, dan SMK Diponegoro. Sedangkan waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Januari 2010 sampai dengan Maret 2010.

### C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono, (2008: 61) “ Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Di dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu :

1. Variabel bebas (*independent variable*), merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya variabel dependen (terikat) yaitu Desentralisasi Pendidikan (X).

Penerapan sistem desentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai kebijakan dan perkembangan yang sangat revolusioner dalam konteks usaha perbaikan kualitas. Pelaksanaan dari diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan juga merupakan kunci dari pelaksanaan demokratisasi dan otonomisasi yang memberikan ruang sangat luas tidak saja bagi upaya peningkatan kualitas pembelajar tetapi sekaligus juga dalam hal memenuhi tuntutan profesionalitas guru.

2. Variabel terikat (*dependent variable*), merupakan variabel yang dipenuhi, karena adanya variabel yang menjadi akibat adanya variabel bebas yaitu Profesionalitas Guru (Y).

Profesionalitas Guru yang dimaksud adalah “komponen dari standar kompetensi guru sekolah menengah kejuruan yang dirumuskan Dirjendikdasmen Depdiknas yang mengalami penyesuaian seiring dengan

perubahan sistem pendidikan”. Standar kompetensi profesionalitas guru yaitu dilihat dari Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional, Kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Seorang guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu pula melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Keempat kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru.

#### D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 117). Dalam penelitian ini populasinya yaitu para Guru atau Pendidik SMK di Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Depok. Guru-guru dimaksud meliputi ijazah terakhir guru yaitu sarjana ( $S_2$ - $S_1$ ), sarjana muda ( $D_3$ ,  $D_2$ , dan  $D_1$ ), SMA/SMK.

**Tabel 2 Jumlah Guru SMK Sebagai Populasi Penelitian**

No	Nama Sekolah	Populasi Guru Berdasarkan Ijazah Terakhir				
		$S_2$ - $S_1$	$D_3$ , $D_2$	$D_1$	SMA/SMK	Jmlh
1	SMK N 1 Depok	71	1	-	-	72
2	SMK N 2 Depok	143	18	-	-	161
3	SMK PI Ambarukmo Depok	20	3	1	-	24
4	SMK Trisula Depok	15	1	-	2	18
5	SMK YPKK 3 Sleman	20	1	-	-	21
6	SMK Penerbangan AGG	38	2	-	12	52
7	SMK Karyarini	27	5	-	2	34
8	SMK Diponegoro	14	2	-	-	16
<b>Jumlah</b>		<b>348</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>398</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2009)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebanyak 398 orang guru. maka akan dilakukan pengambilan sampel (*sampling*). Penyampelan dilakukan secara acak terstratifikasi (*stratified random sampling*). Sampel berdasarkan stratifikasi dilakukan karena populasi dianggap punya “karakteristik” yang berbeda dan heterogen, lalu ditentukan strata atau lapisan dari jenis karakteristik unit-unit yang ada (Sugiharto dan Siagian, 2003: 73). ‘Karakteristik’ yang digunakan dalam hal ini adalah karakteristik iklim sekolah dan karateristik guru kedelapan sekolah sebagaimana disebutkan di atas. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 196 orang guru atau menggunakan tabel di lihat dari tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2008: 128) dengan rumus:

$$S = N : N \times s$$

Ket:

S= jumlah sampel penelitian yang hendak diperoleh (S<sub>2</sub>, S<sub>1</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>1</sub> dan SMA/SMK)

N= jumlah populasi berdasarkan strata/tingkatan

<sup>N</sup>= jumlah populasi keseluruhan

s= nilai tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 5% (424 dilihat dalam tabel dengan populasi 398= 16) (Sugiyono, 2008: 128-130)

S <sub>2</sub> -S <sub>1</sub>		
	$S = 348 : 398 \times 186 = 162,63$	= 163
D <sub>3</sub> .D <sub>2</sub>		
	$S = 33 : 398 \times 186 = 15,42$	= 16
D <sub>1</sub>		= 1
SMA/SMK		= 16
<b>Jumlah</b>		<b>= 196</b>



**Tabel 3 Jumlah Guru SMK Sebagai Sampel Penelitian**

No	Nama Sekolah	Jmlh Guru	Sampel Guru Berdasarkan Ijazah Terakhir				
			S <sub>2</sub> -S <sub>1</sub>	D <sub>3</sub> -D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	SMA/SMK	Jmlh
1	SMK N 1 Depok	72	34	1	-	-	35
2	SMK N 2 Depok	161	51	4	-	-	55
3	SMK PI Ambarukmo Depok	24	10	3	1	-	14
4	SMK Trisula Depok	18	9	1	-	2	12
5	SMK YPKK 3 Sleman	21	14	1	-	-	15
6	SMK Penerbangan AGG	52	20	2	-	12	34
7	SMK Karyarini	30	16	2	-	2	20
8	SMK Diponegoro	16	9	2	-	-	11
<b>Jumlah</b>		<b>398</b>	<b>163</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>196</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2009)

## **E. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan peneliti sebelum melakukan penelitiannya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban dan responden tinggal memilih.

Peneliti menggunakan skala bertingkat sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Subjek harus meneliti dan memilih jawaban dari keempat pilihan yang kiranya sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Penilaian jawaban subjek bergerak dari nilai 1 sampai nilai 4 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 4 Skor Jawaban Pernyataan Angket**

Pernyataan Positif			Pernyataan Negatif		
Jawaban	Skor	Persentase	Jawaban	Skor	Persentase
Sangat Setuju (SS)	4	>75%-100%	Sangat Setuju (SS)	1	25%-0%
Setuju (S)	3	> 50%-75%	Setuju (S)	2	> 25%-50%
Tidak Setuju (TS)	2	> 25%-50%	Tidak Setuju (TS)	3	> 50%-75%
Sangat Tdk Setuju (STS)	1	25%-0%	Sangat Tdk Setuju (STS)	4	>75%-100%

Pola pertanyaan yang digunakan dalam penyusunan instrumen ini yaitu pola pertanyaan positif dan pola pertanyaan negatif. Pola pertanyaan dikatakan positif apabila pertanyaan yang dibuat mendukung tentang gagasan yang ada. Sedangkan pola pertanyaan negatif adalah sebaliknya.

Jumlah kuesioner sebanyak 60 butir. Jumlah butir soal terdiri dari 16 item pertanyaan desentralisasi pendidikan dan profesionalitas guru terdiri dari 44 item soal.

Secara lebih jelas mengenai kisi-kisi pengembangan instrumen dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Kisi-kisi Umum Penelitian Variabel Desentralisasi Pendidikan**

Sub variabel	Indikator	Sumber Data	Metode
1. Otonomisasi	1.kurikulum	1.Silabus, RPP	Studi Dok/wawancara
		2.Guru	Angket
		3.Kepsek	Angket/wawancara
	2.penetapan standar mutu keluaran pendidikan	1.Raport/ nilai UN	Studi Dok/wawancara
		2.Guru	Angket
		3.Kepsek	Angket/wawancara
	3.pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada sekolah	1.Guru	Angket
		2.Kepsek	Angket/wawancara
	4.sekolah menetapkan standar kualifikasi profesionalitas guru sesuai kebutuhan	1.Guru	Angket
		2.Kepsek	Angket/wawancara
2. Demokratisasi	1.iklim demokratisasi di sekolah	1.RAPBS, buku referensi	Studi Dok/wawancara
		2.Guru	Angket
		3.Kepsek	Angket/wawancara
	2.menyikapi berbagai kebijakan sekolah/ kepala sekolah	1.Guru	Angket/wawancara
		2. Kepsek	Angket/wawancara

**Tabel 6 Kisi-kisi Umum Penelitian Variabel Profesionalitas Guru**

Sub variable	Indikator	Sumber Data	Metode
1.Kompetensi pedagogik	1.perencanaan pembelajaran.	1.Silabus	Studi Dok/wawancara
		2.Kepsek	Angket
		3.Guru	Angket
	2.Pelaksanaan pembelajaran	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
	3.Pemahaman peserta didik	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
	4.Evaluasi pembelajaan.	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
		3.Rapot	Studi Dok/wawancara
2.Kompetensi kepribadian	1.Kedisiplinan	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
	2.Sopan santun	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
	3.Keadilan	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
	4.Arif	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
3. Kompetensi profesional	1. Pengetahuan	1.Guru	Angket
		2.Guru	Angket
		3.Data guru	Angket
	2.Komitmen terhadap profesi	1.Guru	Angket
		2.Guru	Angket
		3.Data guru	Studi Dok/wawancara
	3. Pengembangan diri	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
4.Kompetensi sosial	1. komunikasi	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket
		3.Sertifikat forum ilmiah	Studi Dok/wawancara
	2.Pergaulan	1.Kepsek	Angket
		2.Guru	Angket

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan kuantitatif sebagai pendekatan utama, maka pengumpulan data dilakukan melalui seperangkat instrumen berupa kuisioner atau angket, wawancara dan studi dokumentasi.

Instrumen dikembangkan dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Suryabrata (2003: 105), yaitu pengembangan spesifikasi, penulisan butir-butir pertanyaan, telaah dan revisi butir-butir pertanyaan, perakitan butir-butir pertanyaan ke dalam instrumen, uji coba instrumen, analisis hasil uji coba, penentuan perangkat akhir instrumen dan pengujian realilitas dan validitas.

Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Setelah pertanyaan dijawab kemudian dikembalikan lagi ke pihak peneliti. Di samping itu, juga dilakukan wawancara dan pengamatan terhadap subyek penelitian, pada hal-hal yang dianggap perlu sebagai pendalaman dari apa yang diperoleh pada angket. Ketika dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan sebagai pendalaman, digunakan pedoman wawancara dan pedoman pengamatan sebagai alat bantu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan berbeloknya fokus pengamatan dan wawancara. Pedoman wawancara dan pedoman pengamatan berdasar pada indikator dari masing-masing fokus/variabel, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terbuka baik formal maupun non formal.

#### **F. Uji Coba Instrumen**

Penelitian apapun sangat menjaga keabsahan data yang dihimpun, karena setidak-tidaknya hasil penelitian, salah satunya tergantung pada apakah data yang dikumpulkan itu terpercaya atau tidak. Data yang sah/valid adalah diperoleh instrumen yang valid atau terpercaya juga. Uji coba dalam penelitian ini dilakukan pada guru sebanyak 30 orang.

## 1. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004: 109). Teknik pengujian validitas instrumen adalah mengkorelasikan antara skor tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total. Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi dari Pearson yang terkenal dengan rumus korelasi *Product Moment*. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi product moment

$N$  = jumlah sampel

$x$  = jumlah skor butir

$y$  = jumlah skor total

$xy$  = jumlah perkalian skor butir dengan skor total

$x^2$  = jumlah kuadrat skor butir

$y^2$  = jumlah kuadrat skor total

Harga koefisien korelasi ini dikonsultasikan dengan harga korelasi Product Moment pada tabel. Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Sedangkan jika  $r$  hitung  $< r$  tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas ini dikonsultasikan pada harga  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5%.

Perhitungan uji validitas menggunakan program komputer yaitu SPSS Versi 13.0, Jumlah kuesioner sebanyak 60 butir, jumlah butir soal terdiri dari 16 item pertanyaan desentralisasi pendidikan dan profesionalitas guru terdiri dari 44 item soal dan berdasarkan hasil analisis data dapat

disimpulkan instrumen Desentralisasi Pendidikan diperoleh 15 butir valid dan 1 butir gugur yaitu nomor 8. Sedangkan instrumen Profesionalitas Guru diperoleh 42 butir valid dan 2 butir gugur yaitu nomor 9 dan 11. Untuk butir yang gugur tidak dicantumkan dalam instrumen penelitian. Instrumen penelitian dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

## 2. Uji Reliabilitas

Relibilitas bertujuan agar instrumen yang digunakan dalam penelitian memberikan hasil yang memenuhi syarat konsistensi internal. Pelaksanaan analisis reabilitas ini menggunakan koefisien Alpha (*Alha Cronbach's Formula*). Demikian disampaikan Saifuddin Azwar (2000: 116-117). Koefisien ini diusahakan setinggi mungkin, walau seberapa tinggi suatu koefisien reabilitas yang dianggap memuaskan adalah relatif.

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha*, sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{k}{(k-1)} \left[ 1 - \frac{\sum \alpha b^2}{\alpha t} \right]$$

Keterangan:

$r_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$k$  = Banyak butir pertanyaan

$\alpha t^2$  = Jumlah varians total

$\sum \alpha b^2$  = Jumlah varians butir

Menurut Sugiyono (2006: 183) untuk menguji signifikan atau tidaknya koefisien reliabilitas tersebut, maka harga koefisien reliabilitas yang diperoleh atau  $r$  hitung dikonsultasikan dengan kriteria berikut:

**Tabel 7. Interpretasi Nilai r**

Besarnya nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Tinggi
0,80 – 1,000	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil analisis komputer program SPSS dari instrumen Desentralisasi Pendidikan diperoleh koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,773 dan instrumen Profesionalitas Guru sebesar 0,886. Sehingga instrumen Desentralisasi Pendidikan dan instrumen Profesionalitas Guru dinyatakan tingkat reliabilitasnya tinggi atau reliabel.

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Prasarat Analisis**

Sebelum diadakan analisis data penelitian maka terlebih dahulu diadakan analisis persyaratan yang meliputi:

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran yang dinyatakan dalam penelitian ini. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov*.

$$K_D = 1,36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$$

Keterangan:

$K_D$  : Harga *Kolmogorov-Smirnov* yang dicari

$n_1$  : jumlah sampel yang diobservasi atau diperoleh

$n_2$  : jumlah sampel yang diharapkan (Sugiyono, 2004:152)

## b. Uji Linieritas

Uji Linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linier atau tidak. Untuk uji linieritas digunakan rumus sebagai berikut :

$$F_{\text{reg}} = \frac{RK_{\text{reg}}}{RK_{\text{res}}}$$

Keterangan:

$F_{\text{reg}}$  = harga bilangan –F untuk garis regresi;

$RK_{\text{reg}}$  = Rerata Kuadrat garis regresi; dan

$RK_{\text{res}}$  = Rerata Kuadrat residu (Sutrisno Hadi, 2004: 13).

Selanjutnya harga F yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga F tabel. Jika harga F hitung lebih kecil atau sama dengan harga F tabel pada taraf signifikansi 5%, maka korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier. Sebaliknya, jika harga F hitung lebih besar dari harga F tabel maka korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat tidak linier. Analisis data dapat dilanjutkan apabila data tersebut linier.

## 2. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2004 : 10) analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar.



Data hasil penelitian yang diperoleh, dilakukan analisis data dengan teknik kuantitatif berdasarkan persentase, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menjelaskan atau menggunakan angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel, frekuensi dan persentase atau statistik deskriptif.

Pedoman yang digunakan untuk melakukan analisis data pada sub variabel 1, 2 dan 3 mengacu pada langkah-langkah di bawah ini.

1. Mengadakan tabulasi terhadap angket yang telah terkumpul.

Untuk mentabulasi data dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing butir soal.

2. Memberi persentase pada butir pertanyaan yang diperoleh dari hasil tabulasi.
3. Dari hasil tabulasi yang bersifat kuantitatif kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik persentase. Adapun rumus yang digunakan untuk memudahkan perhitungan persentase dalam penelitian ini mengacu pada rumus yang dikemukakan oleh Tulus Winarsunu (2006: 22) yaitu sebagai berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Ket:

P = Persentase

f = Jumlah subjek yang ada pada karegori tertentu

N = Frekuensi total atau keseluruhan jumlah subjek

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dengan menggunakan rumus analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2004: 14) analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian atau sebagai data yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori dengan wujud angka-angka atau statistik. Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi sederhana menurut (Sutrisno Hadi, 2004: 2) rumus persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b x$$

Ket:

Y = kriterium

x = prediktor

a = intersep (konstanta regresi) atau langsung

b = koefisien regresi (Sutrisno Hadi, 2004: 2)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Setting Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri dan Swasta Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang memiliki jumlah terbanyak untuk tingkat SMK daripada kecamatan lainnya. Jumlah SMK di Kecamatan Depok sebanyak 8 SMK terdiri 2 SMK Negeri dan 6 SMK Swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi sistem desentralisasi pendidikan yang berjalan di SMK Kecamatan Depok. Hal ini khususnya terkait dengan peningkatan profesionalitas guru.

Berbagai informasi dan data yang terkait dengan tujuan penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian. Jumlah subjek penelitian sebanyak 196 orang guru yang terdiri dari guru yang berstatus PNS, Non-PNS (guru bantu, GTT, GTY). Subjek dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di SMK N 1 Depok, SMK N 2 Depok, SMK PI Ambarukmo Depok, SMK Trisula Depok, SMK YPKK 3 Sleman, SMK Penerbangan AGG, SMK Karyarini, dan SMK Diponegoro. Adapun kejelasnnya terdapat pada tabel 3 Sampel Penelitian pada Bab III.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket tertutup, wawancara dan studi dokumentasi. Jumlah angket tertutup yang disebarkan kepada guru sebanyak 196 dan kembali 97%. Selain itu juga dikemukakan temuan data yang diperoleh melalui wawancara terbuka dan studi dokumentasi untuk

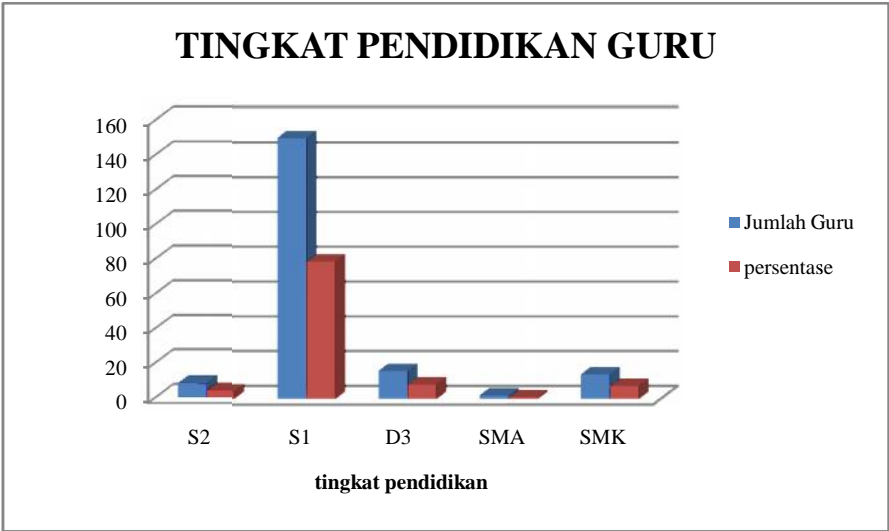
menjaring informasi lebih lanjut dan observasi langsung untuk melengkapi serta memberi penjelasan sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang utuh dan jelas dari aspek-aspek yang diteliti. Bagaimana pelaksanaan desentralisasi pendidikan, bagaimana sikap guru dalam mengaktualisasikan peningkatan profesionalitas yang tercermin dalam sistem desentralisasi pendidikan tersebut dan hambatan-hambatan yang dihadapi? Semua pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara yang merupakan usaha menggali lebih dalam materi-materi kuisioner, serta untuk memotret seperti apa profesionalitas guru SMK di Kecamatan Depok dalam sistem desentralisasi pendidikan.

Latar belakang guru SMK yang berhasil diungkap melalui instrumen penelitian meliputi tingkat pendidikan terakhir dan status kepegawaian. Data latar belakang guru disajikan sebagai berikut.

**Tabel 8. Data Tingkat Pendidikan Guru**

Tingkat Pendidikan Guru	Jumlah Guru	Persentase
S <sub>2</sub>	8	4,2%
S <sub>1</sub>	150	79%
D <sub>3</sub>	16	8,4%
SMA	2	1,0%
SMK	14	7,4%
<b>Jumlah</b>	<b>190</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan S<sub>1</sub> adalah 79% dengan jumlah sebanyak 150 guru dan tidak ada guru lulusan tingkat pendidikan D<sub>2</sub> dan D<sub>1</sub>. Data mengenai kemampuan guru dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran dapat digambarkan pada grafik berikut.

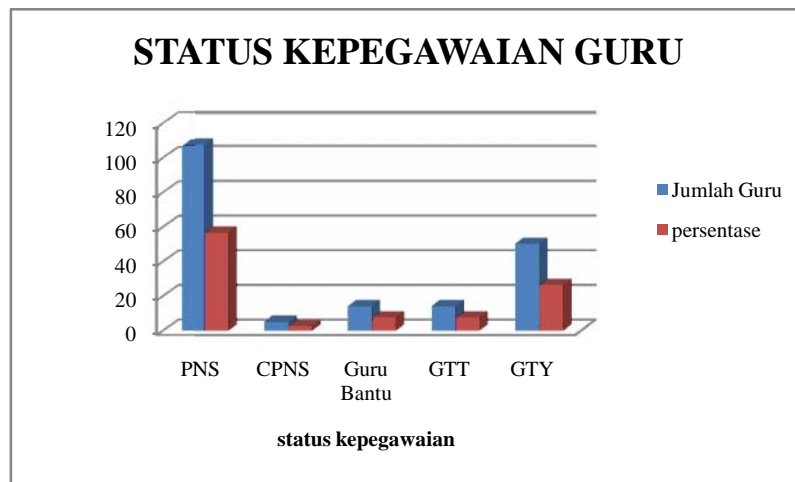


Gambar 2.  
Grafik Histogram Distribusi Tingkat Pendidikan

Tabel 9. Data Status Kepegawaian Guru

Status Kepegawaian Guru	Jumlah Guru	Persentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	107	56,3%
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	5	2,6%
Guru Bantu	14	7,4%
Guru Tidak Tetap (GTT)	14	7,4%
Guru Tetap Yayasan (GTY)	50	26,3%
Jumlah	190	100%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa status kepegawaian guru SMK adalah dengan jumlah 107 guru (56,3%) PNS, dengan jumlah 5 guru (2,6%) CPNS dan Non-PNS antara lain Guru Bantu dengan jumlah 14 guru (7,4%), GTT dengan jumlah 14 guru (7,4%) dan jumlah 50 guru (26,3%) berstatus GTY. Data mengenai status kepegawaian guru dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 3.**  
**Grafik Histogram Distribusi Status Kepegawaian Guru**

## **2. Deskripsi Data Hasil Penelitian**

Dalam deskripsi data hasil penelitian ini akan diuraikan data dari variabel bebas yaitu desentralisasi pendidikan (X) dan variabel terikatnya adalah profesionalitas guru (Y). Data penelitian diperoleh dari penetapan skor melalui angket yang disebarkan kepada guru SMK. Skor yang diperoleh dari masing-masing butir pertanyaan tiap variabel ditabulasikan dan dihitung dengan cara atau rumus-rumus seperti yang diuraikan dalam bab III. Pada deskripsi data berikut disajikan informasi data meliputi mean, median, modus dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian. Deskripsi data juga menyajikan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut.

### **a. Desentralisasi Pendidikan**

Variabel desentralisasi pendidikan terdiri dari 2 sub variabel, yaitu : 1) Otonomisasi dan 2) Demokratisasi. Angket yang digunakan untuk mengungkap pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebanyak 15 butir pertanyaan. Angket

yang digunakan memiliki empat alternatif jawaban. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK Kecamatan Depok meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang banyak dikemukakan oleh responden adalah kurangnya dana, sarana-prasarana, pengetahuan, pemahaman dan budaya lama yang masih melekat.

Salah seorang responden (S) mengemukakan:

“untuk melaksanakan desentralisasi pasti dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung akan tetapi masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai ini disebabkan sumber dana yang minim serta budaya menunggu petunjuk dan kurang inisiatif” (W.G.S).

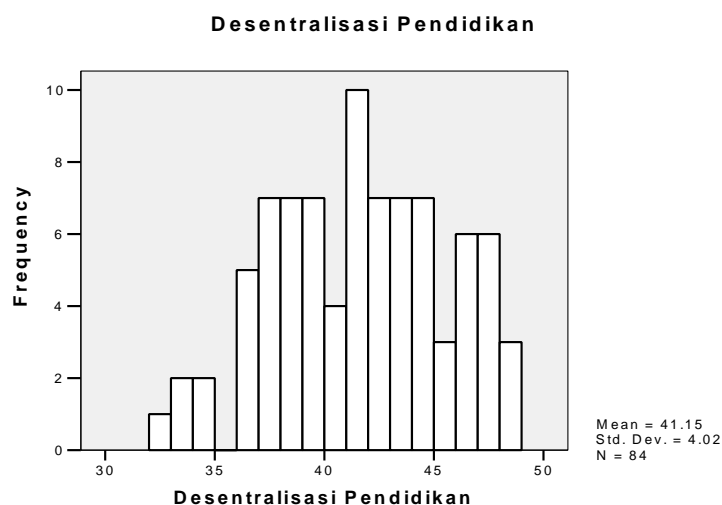
Beberapa responden mengemukakan kelemahan desentralisasi pendidikan antara lain: masih adanya peraturan yang sering berubah-ubah, perbedaan input siswa pada sekolah negeri dan swasta serta masing-masing daerah yang menyebabkan mutu tidak merata, kekurangsiapan sekolah-sekolah swasta dan sekolah terpencil. Hal ini terungkap antara lain sebagaimana wawancara dibawah ini:

“menurut saya desentralisasi pendidikan adalah pemberian kewenangan sepenuhnya pada sekolah untuk mengelola sekolah, meski sampai sekarang peraturannya belum jelas dan sering berubah-ubah. Swakelola bersifat positif karena dengan demikian program sekolah bisa dimusyawarahkan seluruh pelaksana baik kepala sekolah maupun guru, tapi ini menyebabkan sekolah-sekolah swasta dan terpencil tidak siap, karena SDM dan input siswanya rendah”. (W.G.M).

Responden menyampaikan jalan keluar masalah ini adalah meminta pemerintah memberi penjelasan yang cukup serta ketegasan tentang peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan tersebut. Penjelasan ataupun sosialisasi mengenai berbagai kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai forum,

baik internal di sekolah, misalnya dalam rapat yang dipimpin oleh dinas pendidikan, maupun forum-forum umum seperti seminar, diskusi dan simposium yang melibatkan masyarakat luas termasuk para pelaku, pengguna dan praktisi pendidikan. Tujuannya agar ada kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan desentralisasi.

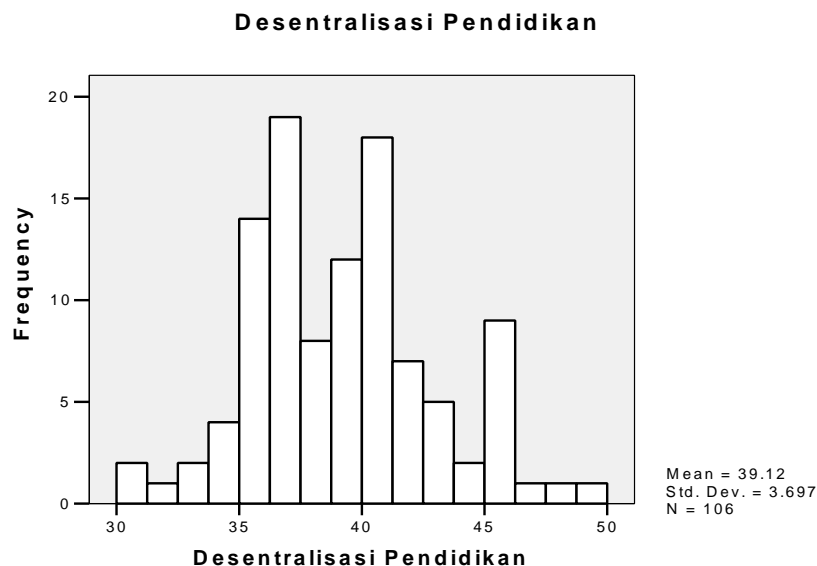
Untuk mengungkap variabel desentralisasi pendidikan di SMK Negeri Kecamatan Depok, digunakan angket dengan 15 butir dengan jumlah responden 84 orang guru. Berdasarkan data desentralisasi pendidikan yang diolah menggunakan program SPSS maka diperoleh skor tertinggi adalah 49 dengan pencapaian 81,7% dan skor terendah adalah 32 dengan pencapaian 53,3%. Hasil analisis menunjukkan harga mean sebesar 41,15 dengan pencapaiannya 68,6%, median 41,00 dengan pencapaian 68,3% modus 41 dengan pencapaian 61,7% dan standar deviasi 4,020 dengan pencapaian 6,699%. Adapun histogramnya sebagai berikut.



**Gambar 4.**  
**Histogram Desentralisasi Pendidikan SMK Negeri di Kecamatan Depok**



Untuk mengungkapkan desentralisasi pendidikan di SMK Swasta Kecamatan Depok, digunakan angket dengan 15 butir dengan jumlah responden 106 orang guru. Berdasarkan data desentralisasi pendidikan yang diolah menggunakan program SPSS maka diperoleh skor tertinggi adalah 49 dengan pencapaian 81,7% dan skor terendah adalah 31 dengan pencapaian 51,7%. Hasil analisis menunjukan harga mean sebesar 39,12 dengan pencapaiannya 65,2%, median 39,00 dengan pencapaian 65,00% modus 37 dengan pencapaian 61,7% dan standar deviasi 3,697 dengan pencapaian 61,2%. Adapun histogramnya sebagai berikut.



**Gambar 5.**  
**Histogram Desentralisasi Pendidikan SMK Swasta di Kecamatan Depok**

Berikut akan disajikan hasil penelitian yang digunakan untuk mengungkap pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK Negeri dan swasta Kecamatan Depok.

### 1) Otonomisasi Sekolah

Sub variabel otonomisasi terdiri dari 6 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Data mengenai otonomisasi merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap data hasil penelitian dilakukan perhitungan frekuensi jawaban angket berdasarkan pengisian guru kemudian dihitung persentasenya

Hasil perhitungan data mengenai desentralisasi pendidikan dalam otonomisasi sekolah SMK Negeri dan Swasta dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Distribusi Frekuensi Otonomisasi Sekolah (SMK Negeri)**

No	Aspek	% (N=84)			
		SS	S	TS	STS
1	Muatan kurikulum ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional	47,6	45,2	7,1	0
2	UAN salah satu kebijakan untuk menetapkan standar mutu sekolah	28,6	39,3	27,4	4,8
3	Keputusan standar kelulusan diseragamkan untuk semua sekolah	20,2	35,7	36,9	7,1
4	Kepala sekolah membuat keputusan melalui kesepakatan bersama	11,9	51,2	22,6	14,3
5	Sekolah menentukan sendiri hari efektif dan hari libur	10,7	51,2	23,8	14,3
6	Sekolah bersama komite sekolah berkualifikasi dalam memutuskan profesionalitas guru sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan <i>user</i> terhadap keluaran	13,1	56,0	28,6	2,4
Rata-rata		22	46,4	24,4	7,2

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

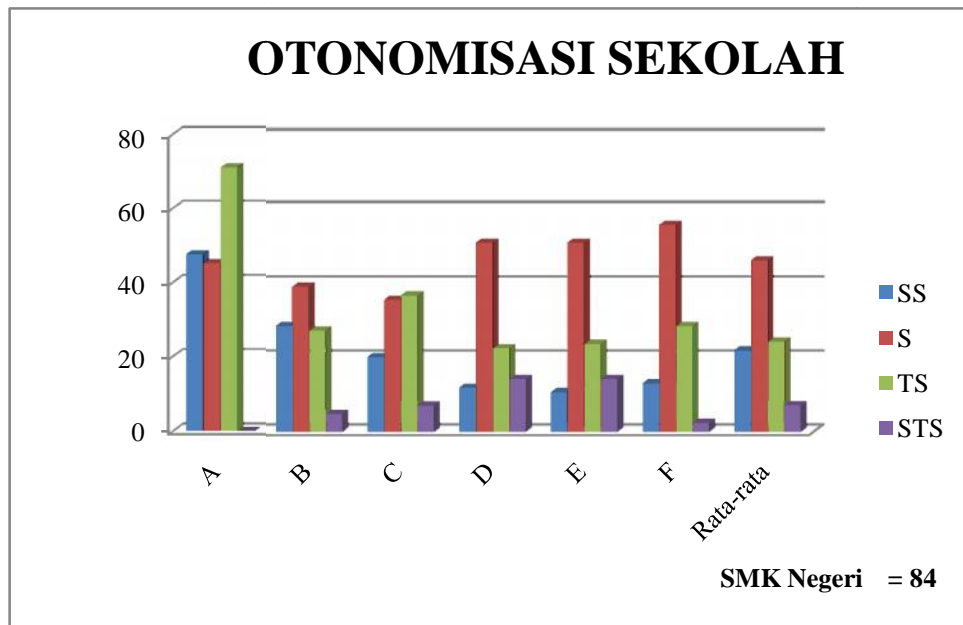
S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan dalam otonomisasi sekolah di SMK Negeri Kecamatan Depok rata-rata berada pada kategori setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada kategori setuju persentase muatan kurikulum di tetapkan Depdiknas sebesar 45,2%,

UAN sebagai kebijakan dalam menetapkan standar mutu sekolah sebesar 39,3%, penyeragaman standar kelulusan sebesar 35,7%, sekolah bersama komite sekolah berkualifikasi dalam memutuskan profesionalitas guru disesuaikan dengan sekolah sebesar 46,8%, Kepala sekolah membuat keputusan melalui kesepakatan bersama sebesar 51,2 % dan sekolah menentukan sendiri hari efektif dan libur sebesar 56,0%. Data mengenai otonomisasi sekolah SMK Negeri di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 6.**  
**Grafik Histogram Distribusi Otonomisasi Sekolah (SMK Negeri)**

ket:

A= muatan kurikulum ditetapkan oleh DEPDIKNAS

B= UAN salah satu kebijakan untuk menetapkan standar mutu sekolah

C= keputusan standar kelulusan diseragamkan untuk semua sekolah

D= KS membuat keputusan bersama

E= sekolah memutuskan sendiri hari efektif dan libur

F= sekolah dan komite sekolah berkualifikasi tentukan profesionalitas guru

Berdasarkan gambar di atas, Otonomisasi Sekolah rata-rata menunjukkan (46,4%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa telah

terlaksananya desentralisasi pendidikan di SMK Negeri Kecamatan Depok pada sub variabel otonomisasi sekolah.

**Tabel 11. Distribusi Frekuensi Otonomisasi Sekolah (SMK Swasta)**

No	Aspek	% (N=106)			
		SS	S	TS	STS
1	Muatan kurikulum ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional	27,4	57,5	12,3	2,8
2	UAN salah satu kebijakan untuk menetapkan standar mutu sekolah	18,9	54,7	19,8	6,6
3	Keputusan standar kelulusan diseragamkan untuk semua sekolah	14,2	61,3	20,8	3,8
4	Kepala sekolah membuat keputusan melalui kesepakatan bersama melalui kesepakatan	17,0	59,4	19,8	3,8
5	Sekolah menentukan sendiri hari efektif dan hari libur	22,6	56,6	13,2	7,5
6	Sekolah bersama komite sekolah berkualifikasi dalam memutuskan profesionalitas guru sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan <i>user</i> terhadap keluaran	31,1	50,9	16,0	1,9
Rata-rata		21,9	56,8	17	4,3

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

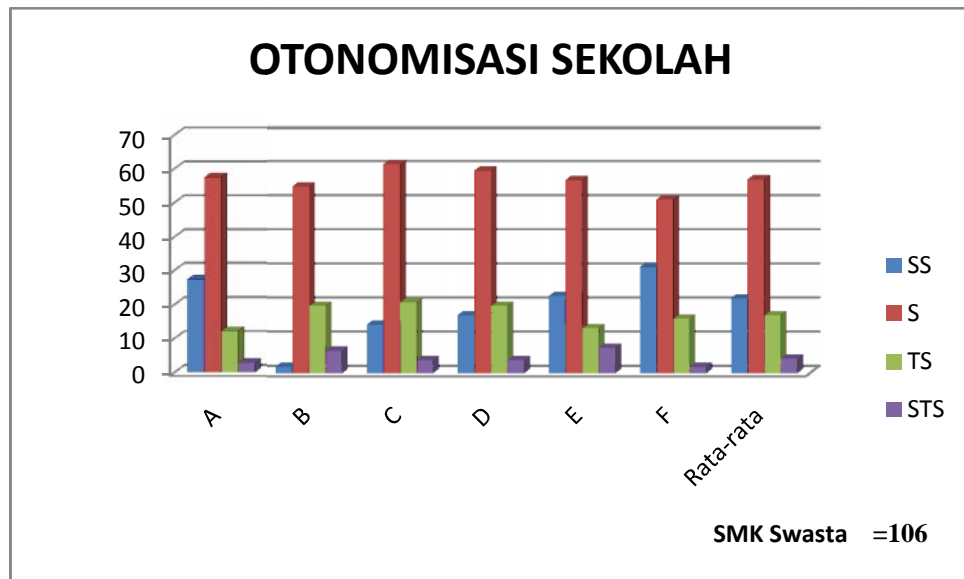
S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan dalam otonomisasi sekolah di SMK Swasta Kecamatan Depok rata-rata berada pada kategori setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada kategori setuju persentase muatan kurikulum di tetapkan Depdiknas sebesar 57,5%, UAN sebagai kebijakan dalam menetapkan standar mutu sekolah sebesar 54,7%, penyeragaman standar kelulusan sebesar 61,3%, sekolah bersama komite sekolah berkualifikasi dalam memutuskan profesionalitas guru disesuaikan dengan sekolah sebesar 59,4%, Kepala sekolah membuat keputusan melalui kesepakatan bersama sebesar 56,6 % dan sekolah menentukan sendiri hari efektif dan libur sebesar 50,9%.. Data mengenai

otonomisasi sekolah SMK Swasta di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 7.**  
**Grafik Histogram Distribusi Otonomisasi Sekolah (SMK Swasta)**

ket:

A= muatan kurikulum ditetapkan oleh DEPDIKNAS

B= UAN salah satu kebijakan untuk menetapkan standar mutu sekolah

C= keputusan standar kelulusan diseragamkan untuk semua sekolah

D= KS membuat keputusan bersama

E= sekolah memutuskan sendiri hari efektif dan libur

F= sekolah dan komite sekolah berkualifikasi tentukan profesionalitas guru

Berdasarkan gambar di atas, Otonomisasi Sekolah rata-rata menunjukkan (56,8%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa telah terlaksananya desentralisasi pendidikan di SMK Swasta Kecamatan Depok pada sub variabel otonomisasi sekolah.

## 2) Demokratisasi Sekolah

Sub variabel demokratisasi sekolah terdiri dari 9 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Data mengenai demokratisasi merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap data hasil penelitian

dilakukan perhitungan frekuensi jawaban angket berdasarkan pengisian guru kemudian dihitung persentasenya.

Hasil perhitungan data mengenai desentralisasi pendidikan dalam demokratisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12. Distribusi Frekuensi Demokratisasi Sekolah (SMK Negeri)**

No	Aspek	% (N=84)			
		SS	S	TS	STS
1	Kepala sekolah dan guru/pegawai yang mengurus bagian keuangan menangani penataan keuangan	17,9	53,6	25,0	3,6
2	Kepala sekolah dan guru tertentu menangani penentuan anggaran kebutuhan sarana	39,3	52,4	8,3	0
3	Kepala sekolah dan guru tertentu menangani penentuan anggaran kebutuhan prasarana	32,1	65,5	2,4	0
4	Kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kepentingan sekolah ada pihak dari komite sekolah yang mengkritisi	21,4	66,7	9,5	2,4
5	Guru membela teman seprofesi yang diperlakukan tidak adil oleh sekolah	51,2	41,7	7,1	0
6	Guru melaksanakan apapun kebijakan yang ditetapkan sekolah dengan baik	13,1	45,2	36,9	4,8
7	Guru menguasai materi pelajaran 90% berdasarkan kurikulum yang ditetapkan	17,9	51,2	25,0	6,0
8	Laporan pertanggung jawaban tahunan diberi tahukan kepada masyarakat	8,3	71,4	15,5	4,4
9	Masyarakat mendapat apa saja info yang sedang terjadi di sekolah	23,8	40,5	32,1	3,6
	Rata-rata	25	54,2	18	2,8

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

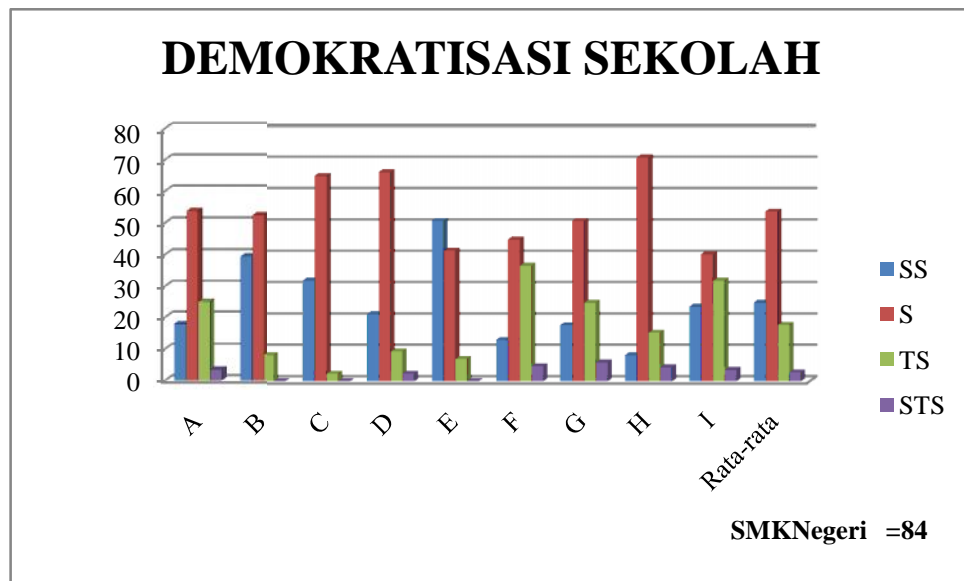
S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan dalam demokratisasi sekolah rata-rata berada pada kategori setuju.

Data mengenai desentralisasi sekolah dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 8.**  
**Grafik Histogram Distribusi Demokratisasi Sekolah (SMK Negeri)**

ket:

A= penataan keuangan ditangani oleh KS dan guru/pegawai keuangan

B= penentuan anggaran kebutuhan sarana ditangani KS dan guru tertentu

C= penentuan anggaran kebutuhan prasarana ditangani KS dan guru tertentu

D= kebijakan KS yang tidak sesuai dikritisi komite sekolah

E= guru membela teman seprofesi yang diperlakukan tidak adil oleh sekolah

F= guru melaksanakan apapun kebijakan dengan baik

G= guru menguasai materi 90% berdasarkan kurikulum yang ditetapkan

H= LPJ tahunan diberitahukan kepada masyarakat

I= Masyarakat mendapat apa saja info yang sedang terjadi di sekolah

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, Demokratisasi Sekolah rata-rata menunjukkan (54,2%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa telah terlaksananya desentralisasi pendidikan di SMK Negeri Kecamatan Depok pada sub variabel demokratisasi sekolah.

**Tabel 13. Distribusi Frekuensi Demokratisasi Sekolah (SMK Swasta)**

No	Aspek	% (N=106)			
		SS	S	TS	STS
1	Kepala sekolah dan guru/pegawai yang mengurus bagian keuangan menangani penataan keuangan	22,6	47,2	28,3	1,9
2	Kepala sekolah dan guru tertentu menangani penentuan anggaran kebutuhan sarana	42,5	54,7	2,8	0
3	Kepala sekolah dan guru tertentu menangani penentuan anggaran kebutuhan prasarana	39,6	56,6	3,8	0
4	Kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kepentingan sekolah ada pihak dari komite sekolah yang mengkritisi	25,5	45,3	26,4	2,8
5	Guru membela teman seprofesi yang diperlakukan tidak adil oleh sekolah	58,5	40,6	0,9	0
6	Guru melaksanakan apapun kebijakan yang ditetapkan sekolah dengan baik	11,3	39,6	33,0	16,0
7	Guru menguasai materi pelajaran 90% berdasarkan kurikulum yang ditetapkan	19,8	54,7	17,0	8,5
8	Laporan pertanggung jawaban tahunan diberi tahukan kepada masyarakat	10,4	58,4	26,4	4,7
9	Masyarakat mendapat apa saja info yang sedang terjadi di sekolah	11,3	51,9	31,1	5,7
	Rata-rata	26,8	49,9	18,9	4,4

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

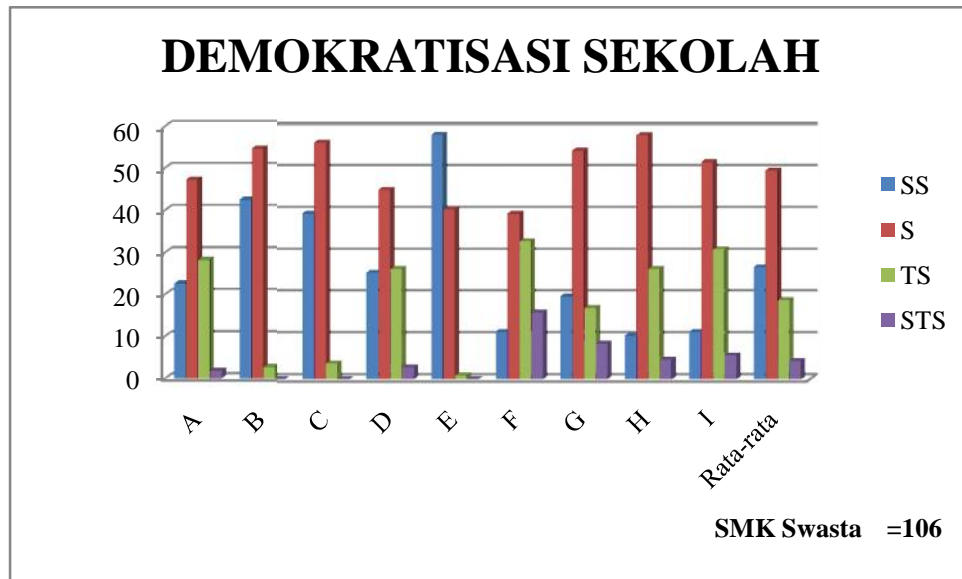
TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan dalam demokratisasi sekolah rata-rata berada pada kategori setuju.

Data mengenai desentralisasi sekolah dapat digambarkan pada grafik berikut.





**Gambar 9.**  
**Grafik Histogram Distribusi Demokratisasi Sekolah (SMK Swasta)**

ket:

- A= penataan keuangan ditangani oleh KS dan guru/pegawai keuangan
- B= penentuan anggaran kebutuhan sarana ditangani KS dan guru tertentu
- C= penentuan anggaran kebutuhan prasarana ditangani KS dan guru tertentu
- D= kebijakan KS yang tidak sesuai dikritisi komite sekolah
- E= guru membela teman seprofesi yang diperlakukan tidak adil oleh sekolah
- F= guru melaksanakan apapun kebijakan dengan baik
- G= guru menguasai materi 90% berdasarkan kurikulum yang ditetapkan
- H= LPJ tahunan diberitahukan kepada masyarakat
- I= Masyarakat mendapat apa saja info yang sedang terjadi di sekolah

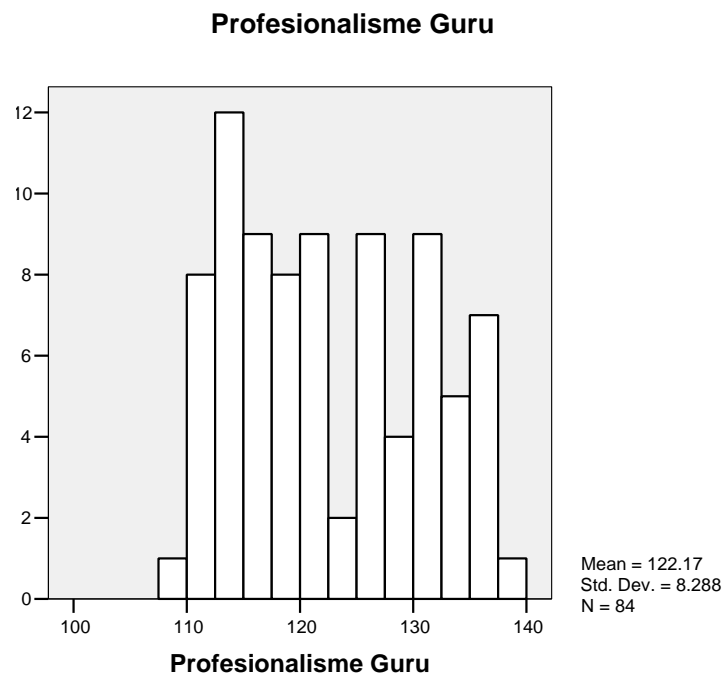
Berdasarkan tabel dan gambar di atas, Demokratisasi Sekolah rata-rata menunjukkan (49,9%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa telah terlaksananya desentralisasi pendidikan di SMK Swasta Kecamatan Depok pada sub variabel demokratisasi sekolah.

#### **b. Profesionalitas Guru**

Variabel profesionalitas guru terdiri dari 4 sub variabel, yaitu : 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional dan 4) kompetensi sosial. Angket yang digunakan untuk mengungkap profesionalitas guru sebanyak 42 butir pertanyaan. Angket yang digunakan

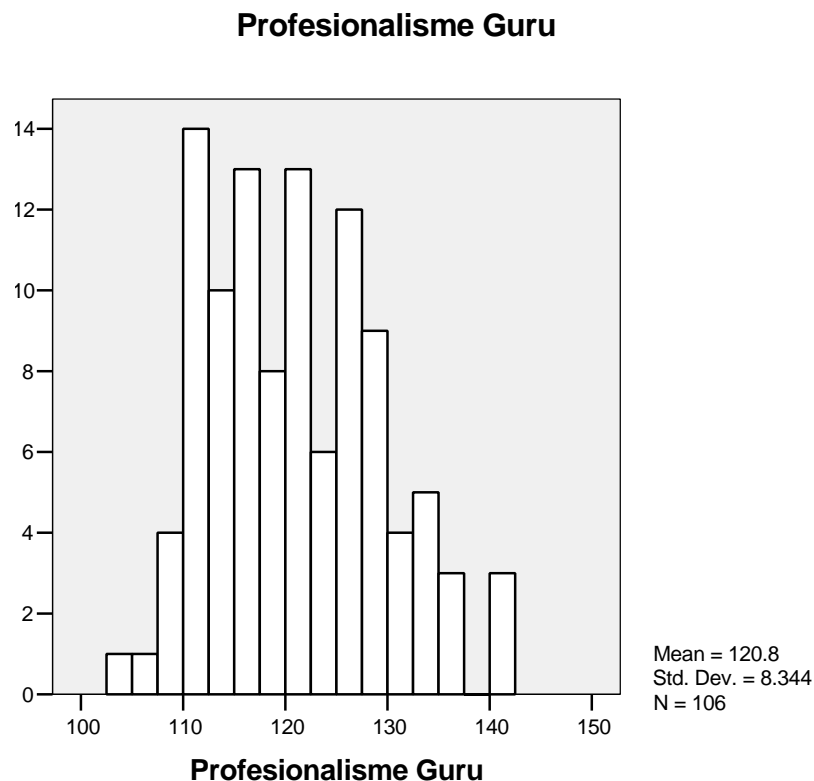
memiliki empat alternatif jawaban. Berikut akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan untuk mengungkap variabel profesionalitas guru SMK di Kecamatan Depok.

Untuk mengungkap variabel profesionalitas guru SMK Negeri Di Kecamatan Depok, digunakan angket dengan 42 butir dengan jumlah responden 84 orang guru. Berdasarkan data profesionalitas guru SMK yang diolah menggunakan program SPSS maka diperoleh skor tertinggi adalah 142 dengan pencapaian 84,52% dan skor terendah adalah 104 dengan pencapaian 61,91%. Hasil analisis menunjukkan harga mean sebesar 120,80 dengan pencapaiannya 71,90% , median 120,00 dengan pencapaian 71,42% modus 112 dengan pencapaian 66,67% dan standar deviasi 8,344 dengan pencapaian 4,97%. Adapun histogramnya sebagai berikut.



**Gambar 10.**  
**Histogram Profesionalitas Guru SMK Negeri di Kecamatan Depok**

Untuk mengungkap variabel profesionalitas guru SMK Swasta Di Kecamatan Depok, digunakan angket dengan 42 butir dengan jumlah responden 106 orang guru. Berdasarkan data profesionalitas guru SMK yang diolah menggunakan program SPSS maka diperoleh skor tertinggi adalah 138 dengan pencapaian 82,14% dan skor terendah adalah 108 dengan pencapaian 64,29%. Hasil analisis menunjukkan harga mean sebesar 122,17 dengan pencapaiannya 72,72% , median 121,50 dengan pencapaian 72,32% modus 144 dengan pencapaian 67,86% dan standar deviasi 8,288 dengan pencapaian 4,93%. Adapun histogramnya sebagai berikut.



**Gambar 11.**  
**Histogram Profesionalitas Guru SMK Swasta di Kecamatan Depok**

Berikut akan disajikan hasil penelitian yang digunakan untuk mengungkap pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK Kecamatan Depok.

### **1) Kompetensi Pedagogik**

Sub variabel kompetensi pedagogik terdiri dari 18 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Data mengenai kompetensi pedagogik merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap data hasil penelitian dilakukan perhitungan frekuensi jawaban angket berdasarkan pengisian oleh guru kemudian dihitung persentasenya.

Hasil perhitungan data mengenai kompetensi pedagogik pada SMK Negeri di Kecamatan Depok dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 14. Distribusi frekuensi Kompetensi Pedagogik (SMK Negeri)**

No	Aspek	% (N=84)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru memerlukan keleluasaan untuk membuat perencanaan pembelajaran	48,8	47,6	3,6	0
2	Guru menyusun program tahunan setiap awal tahun pelajaran	40,5	59,5	0	0
3	Setiap pokok bahasan yang direncanakan disusun secara tertulis dalam satuan pembelajaran	32,1	64,3	3,6	0
4	Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dan relevansinya dengan realitas kehidupan siswa	29,8	69,0	1,2	0
5	Setiap awal semester Bapak/Ibu guru harus membuat program semester	32,1	67,9	0	0
6	Guru membuat laporan secara periodik mengenai kebutuhan dan pengembangan dalam pembelajaran	38,1	61,9	0	0
7	Guru menyampaikan manfaat atau kegunaan setiap pokok bahasan bagi kehidupan siswa	42,9	57,1	0	0
8	Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang rileks dengan menggunakan alat pendukung	46,4	52,4	1,2	0
9	Guru memberikan materi lintas mata pelajaran agar siswa mendapat gambaran sebelum pelajaran dimulai	11,9	72,6	10,7	4,8
10	Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di sekitar siswa	41,7	53,6	2,4	2,4
11	Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami ide dan mencoba hal-hal baru	36,9	63,1	0	0
12	Penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran di sesuaikan dengan pemahaman siswa	26,2	70,2	2,4	1,2
13	Guru menentukan apa yang harus dilakukan siswa selama proses belajar	21,4	67,9	8,3	2,4
14	Pengembangan materi pelajaran sesuai dengan kreatifitas siswa agar siswa dapat mengaplikasikan pelajaran	13,1	64,3	17,9	4,8
15	Guru menyesuaikan alokasi waktu yang telah ditentukan dan mengikuti kemampuan pemahaman siswa	21,4	69,0	6,0	3,6
16	Guru melakukan evaluasi agar dapat mengetahui apa yang kurang dipahami siswa	17,9	53,6	22,6	6,0
17	Guru memberikan penghargaan ( <i>reward</i> ) kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi	16,7	50,0	21,4	11,9
18	Guru melakukan <i>remedial teaching</i> maupun <i>remedial test</i> bagi siswa yang tertinggal dalam prestasi	27,4	47,6	13,1	11,9
	Rata-rata	32,3	60,6	6,2	2,7

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

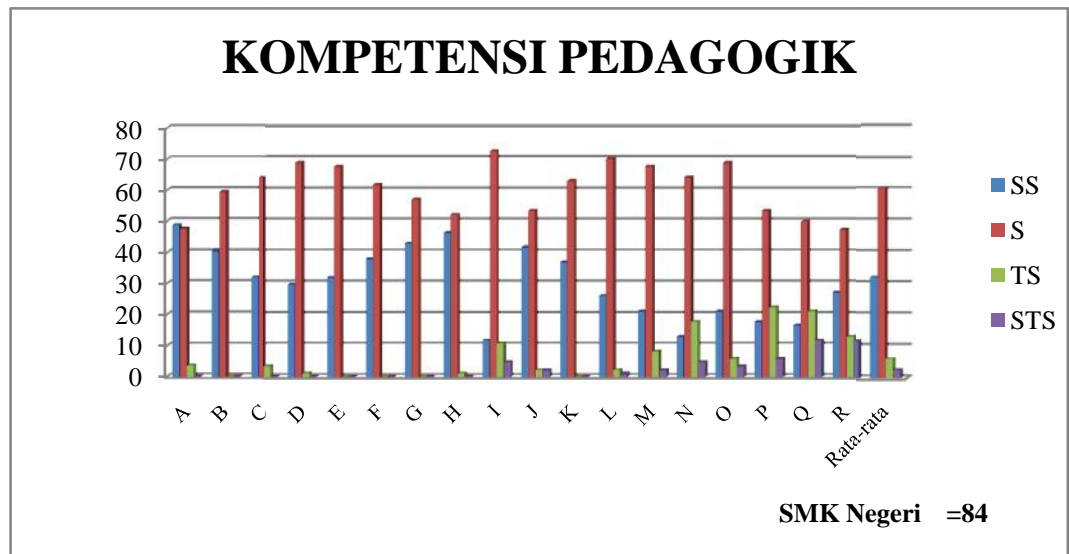
S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik guru rata-rata berada pada kategori setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada kategori sangat setuju rata-rata persentase sebesar 32,3%, rata-

rata persentase memilih setuju sebesar 60,6%, rata-rata persentase memilih tidak setuju sebesar 6,2% dan 2,7% rata-rata persentase memilih sangat tidak setuju. Data mengenai kompetensi pedagogik guru SMK Negeri di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 12.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Pedagogik Guru SMK Negeri**

ket:

- A= Guru memerlukan keleluasaan untuk membuat perencanaan pembelajaran
- B= Guru menyusun program tahunan setiap awal tahun pelajaran
- C= Setiap pokok bahasan yang direncanakan disusun secara tertulis dalam satuan pembelajaran
- D= Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dan merelevansinya dengan realitas kehidupan siswa
- E= Setiap awal semester Bapak/Ibu guru harus membuat program semester
- F= Guru membuat laporan secara periodik mengenai kebutuhan dan pengembangan dalam pembelajaran
- G= Guru menyampaikan manfaat atau kegunaan setiap pokok bahasan bagi kehidupan siswa
- H= Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang *relax* dengan menggunakan alat pendukung
- I= Guru memberikan materi lintas mata pelajaran agar siswa mendapat gambaran sebelum pelajaran dimulai
- J= Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di sekitar siswa
- K= Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami ide dan mencoba hal-hal baru
- L= Penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran di sesuaikan dengan pemahaman siswa
- M= Guru menentukan apa yang harus dilakukan siswa selama proses belajar
- N= Pengembangan materi pelajaran sesuai dengan kreatifitas siswa agar siswa dapat mengaplikasikan pelajaran
- O= Guru menyesuaikan alokasi waktu yang telah ditentukan dan mengikuti kemampuan pemahaman siswa
- P= Guru melakukan evaluasi agar dapat mengetahui apa yang kurang dipahami siswa
- Q= Guru memberikan penghargaan (*reward*) kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi
- R= Guru melakukan *remedial teaching* maupun *remedial test* bagi siswa yang tertinggal dalam prestasi

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, Kompetensi pedagogik rata-rata menunjukkan (60,6%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesional guru SMK Negeri di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi pedagogik.

**Tabel 15. Distribusi frekuensi Kompetensi Pedagogik (SMK Swasta)**

No	Aspek	% (N=106)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru memerlukan keleluasaan untuk membuat perencanaan pembelajaran	42,5	57,5	0	0
2	Guru menyusun program tahunan setiap awal tahun pelajaran	46,2	53,8	0	0
3	Setiap pokok bahasan yang direncanakan disusun secara tertulis dalam satuan pembelajaran	27,4	70,8	1,9	0
4	Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dan relevansinya dengan realitas kehidupan siswa	25,5	71,7	2,8	0
5	Setiap awal semester Bapak/Ibu guru harus membuat program semester	47,2	50,9	1,9	0
6	Guru membuat laporan secara periodik mengenai kebutuhan dan pengembangan dalam pembelajaran	34,0	65,1	0,9	0
7	Guru menyampaikan manfaat atau kegunaan setiap pokok bahasan bagi kehidupan siswa	35,8	63,2	0,9	0
8	Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang rileks dengan menggunakan alat pendukung	44,3	53,8	0,9	0,9
9	Guru memberikan materi lintas mata pelajaran agar siswa mendapat gambaran sebelum pelajaran dimulai	15,1	72,6	11,3	0,9
10	Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di sekitar siswa	34,0	64,2	1,9	0
11	Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami ide dan mencoba hal-hal baru	44,3	54,7	0,9	0
12	Penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran di sesuaikan dengan pemahaman siswa	29,2	60,4	8,5	1,9
13	Guru menentukan apa yang harus dilakukan siswa selama proses belajar	15,1	56,6	25,5	2,8
14	Pengembangan materi pelajaran sesuai dengan kreatifitas siswa agar siswa dapat mengaplikasikan pelajaran	7,5	61,3	26,4	4,7
15	Guru menyesuaikan alokasi waktu yang telah ditentukan dan mengikuti kemampuan pemahaman siswa	9,4	76,4	13,2	0,9
16	Guru melakukan evaluasi agar dapat mengetahui apa yang kurang dipahami siswa	15,1	76,4	8,5	0
17	Guru memberikan penghargaan ( <i>reward</i> ) kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi	4,7	70,8	19,8	4,7
18	Guru melakukan <i>remedial teaching</i> maupun <i>remedial test</i> bagi siswa yang tertinggal dalam prestasi	18,9	73,6	4,7	2,8
	Rata-rata	27,6	64,1	7,2	1,1

Keterangan:

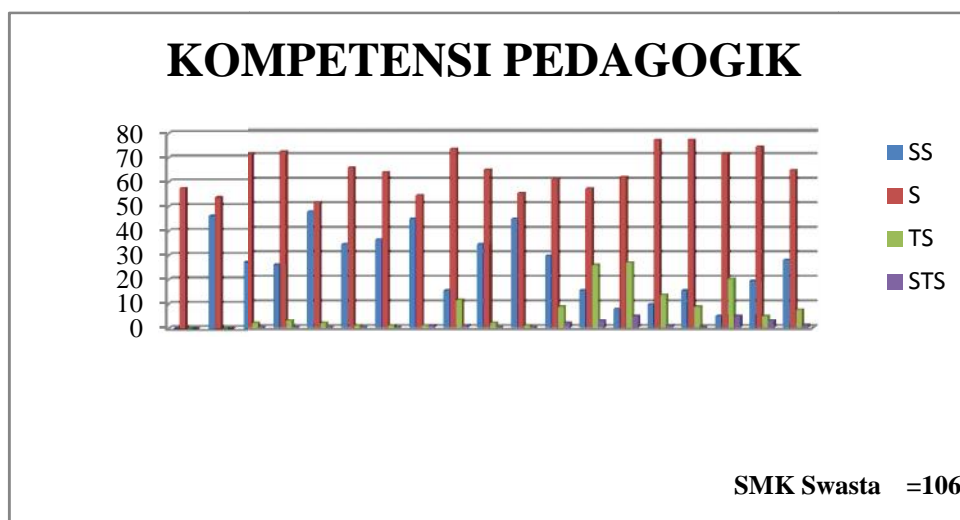
SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik guru rata-rata berada pada kategori setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada kategori sangat setuju rata-rata persentase sebesar 27,6%, rata-rata persentase memilih setuju sebesar 64,1%, rata-rata persentase memilih tidak setuju sebesar 7,2% dan 1,1% rata-rata persentase memilih sangat tidak setuju. Data mengenai kompetensi pedagogik guru SMK Swasta di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 13.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Pedagogik Guru SMK Swasta**

ket:

- A= Guru memerlukan keleluasaan untuk membuat perencanaan pembelajaran
- B= Guru menyusun program tahunan setiap awal tahun pelajaran
- C= Setiap pokok bahasan yang direncanakan disusun secara tertulis dalam satuan pembelajaran
- D= Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dan relevansinya dengan realitas kehidupan siswa
- E= Setiap awal semester Bapak/Ibu guru harus membuat program semester
- F= Guru membuat laporan secara periodik mengenai kebutuhan dan pengembangan dalam pembelajaran
- G= Guru menyampaikan manfaat atau kegunaan setiap pokok bahasan bagi kehidupan siswa
- H= Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang *relax* dengan menggunakan alat pendukung
- I= Guru memberikan materi lintas mata pelajaran agar siswa mendapat gambaran sebelum pelajaran dimulai
- J= Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di sekitar siswa
- K= Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami ide dan mencoba hal-hal baru
- L= Penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran disesuaikan dengan pemahaman siswa
- M= Guru menentukan apa yang harus dilakukan siswa selama proses belajar
- N= Pengembangan materi pelajaran sesuai dengan kreatifitas siswa agar siswa dapat mengaplikasikan pelajaran
- O= Guru menyesuaikan alokasi waktu yang telah ditentukan dan mengikuti kemampuan pemahaman siswa
- P= Guru melakukan evaluasi agar dapat mengetahui apa yang kurang dipahami siswa
- Q= Guru memberikan penghargaan (*reward*) kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi
- R= Guru melakukan *remedial teaching* maupun *remedial test* bagi siswa yang tertinggal dalam prestasi



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, Kompetensi pedagogik rata-rata menunjukkan (64,1%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesional guru SMK Swasta di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi pedagogik.

## **2) Kompetensi Kepribadian**

Sub variabel kompetensi kepribadian terdiri dari 8 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Data mengenai kompetensi kepribadian merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap data hasil penelitian dilakukan perhitungan frekuensi jawaban angket berdasarkan pengisian oleh guru kemudian dihitung persentasenya.

Hasil perhitungan data mengenai kompetensi kepribadian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kompetensi Kepribadian (SMK Negeri)**

No	Aspek	% (N=84)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru datang sebelum jam pelajaran dimulai	48,8	48,8	1,2	1,2
2	Guru memberikan tugas kepada siswa jika memiliki kepentingan pribadi	9,5	45,2	38,1	7,1
3	Guru tidak meninggalkan sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan atau guru piket	21,4	63,1	11,9	3,6
4	Guru mengikuti rapat evaluasi KBM, supaya dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah	39,3	57,1	2,4	1,2
5	Guru siap menerima teguran atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas	29,8	69,0	1,2	0
6	Guru memberikan sikap yang baik di lingkungan dan luar lingkungan	13,1	70,2	13,1	3,6
7	Guru berusaha berlaku adil kepada siswa yang mengikuti tata tertib sekolah	32,1	66,7	1,2	0
8	Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan	32,1	63,1	4,8	0
	Rata-rata	28,3	60,5	9,3	1,9

Keterangan:

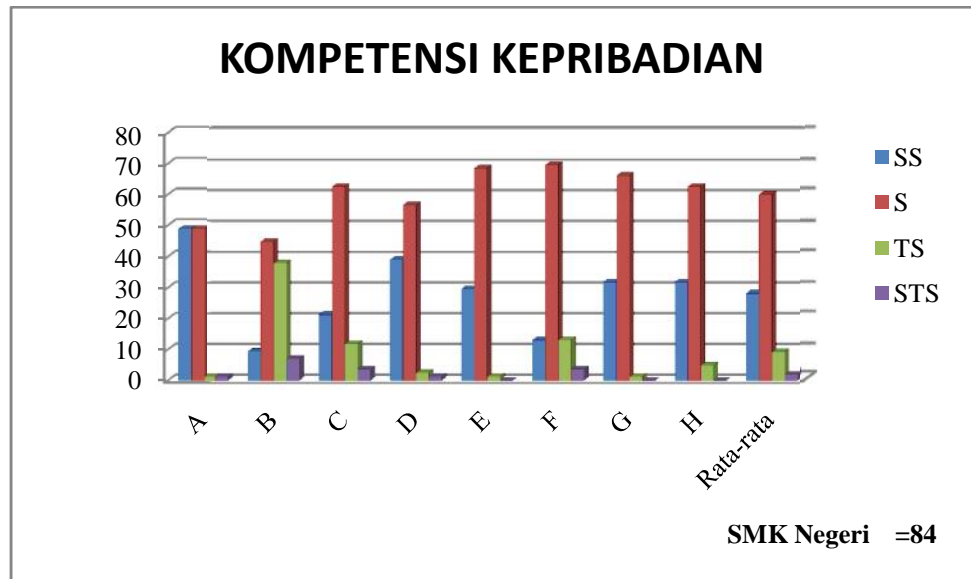
SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian rata-rata berada pada kategori setuju. Data mengenai profesionalitas guru pada sub kompetensi kepribadian guru SMK Negeri di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 14.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Kepribadian Guru SMK Negeri**

ket:

- A= guru datang sebelum jam pelajaran dimulai
- B= guru memberikan tugas kepada siswa jika memiliki kepentingan pribadi
- C= guru tidak meninggalkan sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan
- D= guru mengikuti rapat evaluasi KBM
- E= guru siap menerima teguran
- F= guru memberikan sikap yang baik di lingkungan dan luar lingkungan
- G= guru berusaha berlaku adil kepada siswa yang mengikuti tata tertib sekolah
- H= guru memberikan kesempatan bagi siswa memberikan masukan dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan gambar di atas, sub variabel kompetensi kepribadian yang paling menonjol adalah guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan berada pada kategori setuju. Kompetensi kepribadian rata-rata menunjukkan (60,5%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesionalitas guru SMK Negeri di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi kepribadian.

**Tabel 17. Distribusi Frekuensi Kompetensi Kepribadian (SMK Swasta)**

No	Aspek	% (N=106)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru datang sebelum jam pelajaran dimulai	50,9	43,4	5,7	0
2	Guru memberikan tugas kepada siswa jika memiliki kepentingan pribadi	6,6	51,9	36,8	4,7
3	Guru tidak meninggalkan sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan atau guru piket	23,6	67,0	6,6	2,8
4	Guru mengikuti rapat evaluasi KBM, supaya dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah	35,8	61,3	2,8	0
5	Guru siap menerima teguran atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas	29,2	69,8	0,9	0
6	Guru memberikan sikap yang baik di lingkungan dan luar lingkungan	9,4	67,9	20,8	1,9
7	Guru berusaha berlaku adil kepada siswa yang mengikuti tata tertib sekolah	35,8	62,3	1,9	0
8	Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan	19,8	76,4	3,8	0
	Rata-rata	26,4	62,5	9,9	1,2

Keterangan:

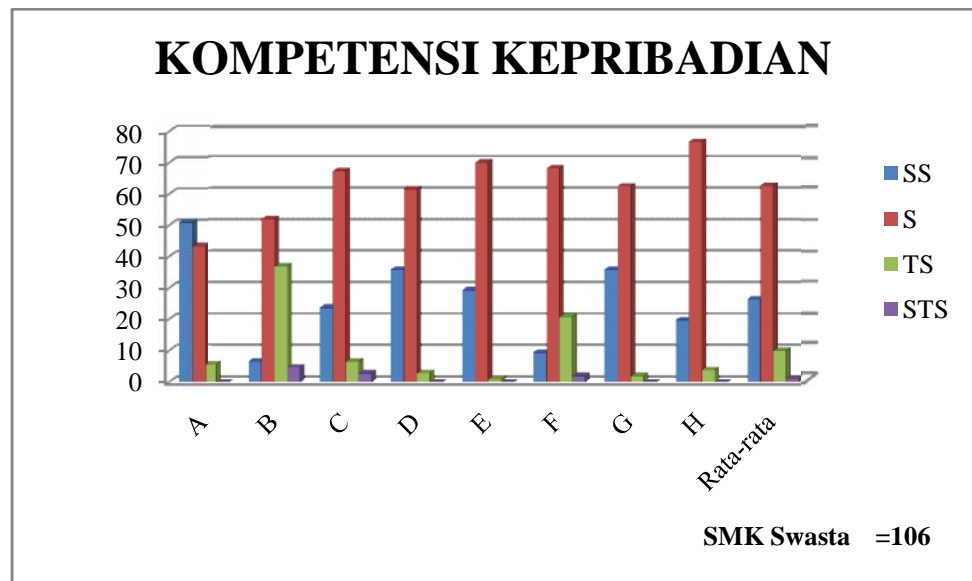
SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian rata-rata berada pada kategori setuju. Data mengenai profesionalitas guru pada sub kompetensi kepribadian guru SMK Swasta di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 15.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Kepribadian Guru SMK Swasta**

ket:

- A= guru datang sebelum jam pelajaran dimulai
- B= guru memberikan tugas kepada siswa jika memiliki kepentingan pribadi
- C= guru tidak meninggalkan sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan
- D= guru mengikuti rapat evaluasi KBM
- E= guru siap menerima teguran
- F= guru memberikan sikap yang baik di lingkungan dan luar lingkungan
- G= guru berusaha berlaku adil kepada siswa yang mengikuti tata tertib sekolah
- H= guru memberikan kesempatan bagi siswa memberikan masukan dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan gambar di atas, sub variabel kompetensi kepribadian yang paling menonjol adalah guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan berada pada kategori setuju. Kompetensi kepribadian rata-rata menunjukkan (62,5%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesionalitas guru SMK Swasta di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi kepribadian.

### 3) Kompetensi Profesional

Sub variabel kompetensi profesional terdiri dari 9 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Data mengenai kompetensi pedagogik merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap data hasil penelitian dilakukan perhitungan frekuensi jawaban angket berdasarkan pengisian oleh guru kemudian dihitung persentasenya.

Hasil perhitungan data mengenai kompetensi profesional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional (SMK Negeri)**

No	Aspek	% (N=84)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru menggunakan Bahasa Indonesia jika berada di dalam kelas	20,2	67,9	11,9	0
2	Lingkungan sekitar siswa dapat dijadikan sebagai sumber belajar	36,9	60,7	2,4	0
3	Guru tetap berinovasi meskipun konsep dasar materi pelajaran yang disampaikan sama	0	25,0	59,5	15,5
4	Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari	23,8	73,8	2,4	0
5	Guru <i>tidak</i> harus terpaku pada juklak dan juknis dalam pembuatan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan	23,8	65,5	10,7	0
6	Guru harus membuat perencanaan pembelajaran	44,0	54,8	1,2	0
7	Guru dapat melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan	41,7	54,8	2,4	1,2
8	Guru melakukan penelitian tindakan kelas ( <i>class action researsh</i> ) untuk memperbaiki pembelajaran	21,4	71,4	3,6	3,6
9	Penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan bagian dari tugas Bapak/Ibu guru	19,0	61,9	14,3	4,8
	Rata-rata	25,6	59,5	12,1	2,8

Keterangan:

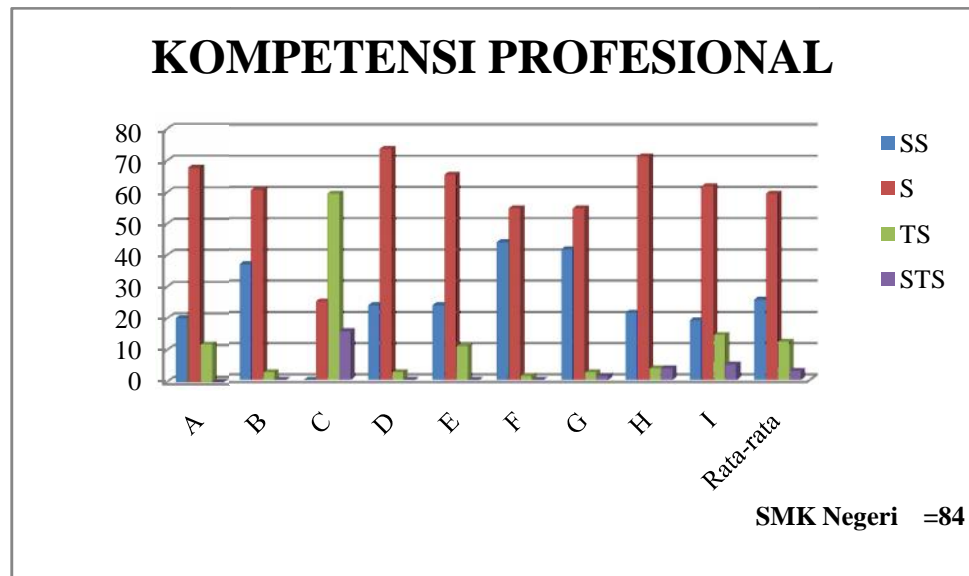
SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi profesional sekolah rata-rata berada pada kategori setuju. Data mengenai kompetensi profesional guru SMK Negeri di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 16.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Profesional Guru SMK Negeri**

ket:

- A= guru menggunakan Bahasa Indonesia dikelas
- B= lingkungan sekitar siswa dijadikan sebagai sumber belajar
- C= guru tetap berinovasi meskipun konsep dasar materi pelajaran sama
- D= guru menggunakan metode yang bervariasi
- E= guru tidak terpaku pada juklak dan juknis dalam pembuatan RPP
- F= guru harus membuat RPP
- G= guru dapat melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan
- H= guru melakukan penelitian tindakan kelas
- I= guru melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, sub variabel kompetensi profesional yang paling menonjol adalah Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari berada pada kategori setuju. Kompetensi profesional rata-rata menunjukkan (59,5%) berada pada kategori

setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesionalitas guru SMK Negeri di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi profesional.

**Tabel 19. Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional (SMK Swasta)**

No	Aspek	% (N=106)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru menggunakan Bahasa Indonesia jika berada di dalam kelas	25,5	60,4	13,2	0,9
2	Lingkungan sekitar siswa dapat dijadikan sebagai sumber belajar	42,5	57,5	0	0
3	Guru tetap berinovasi meskipun konsep dasar materi pelajaran yang disampaikan sama	12,3	81,1	6,6	0
4	Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari	36,8	60,4	1,9	0,9
5	Guru <i>tidak</i> harus terpaku pada juklak dan juknis dalam pembuatan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan	13,2	62,3	22,6	1,9
6	Guru harus membuat perencanaan pembelajaran	47,2	50,9	1,9	0
7	Guru dapat melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan	41,5	57,5	0,9	0
8	Guru melakukan penelitian tindakan kelas ( <i>class action researsh</i> ) untuk memperbaiki pembelajaran	31,1	67,0	0,9	0,9
9	Penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan bagian dari tugas Bapak/Ibu guru	12,3	68,9	14,2	4,7
	Rata-rata	29,2	62,9	6,9	1

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

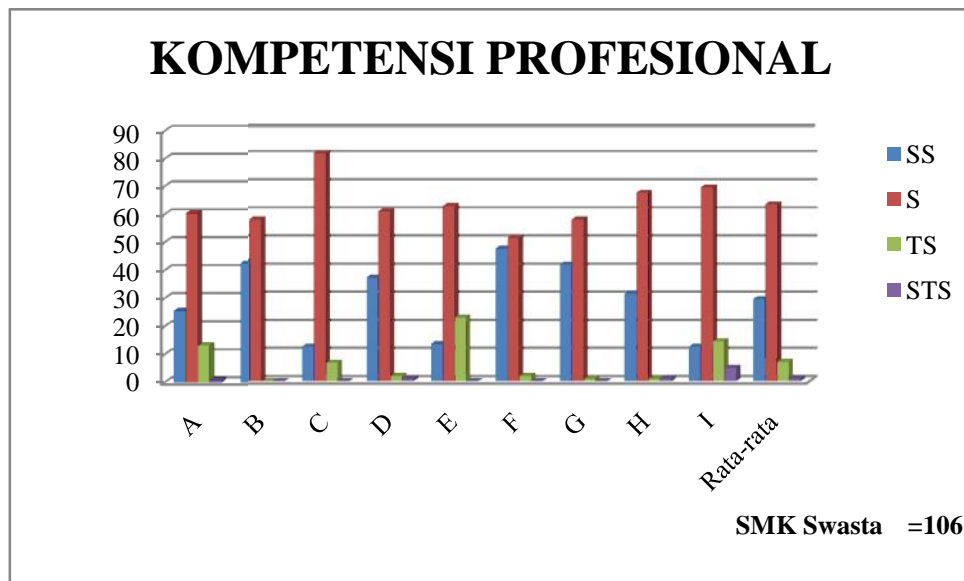
S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi profesional sekolah rata-rata berada pada kategori setuju. Data mengenai profesionalitas guru pada sub kompetensi profesional guru SMK Swasta di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.





**Gambar 17.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Profesional Guru SMK Swasta**

ket:

- A= guru menggunakan Bahasa Indonesia dikelas
- B= lingkungan sekitar siswa dijadikan sebagai sumber belajar
- C= guru tetap berinovasi meskipun konsep dasar materi pelajaran sama
- D= guru menggunakan metode yang bervariasi
- E= guru tidak terpaku pada juklak dan juknis dalam pembuatan RPP
- F= guru harus membuat RPP
- G= guru dapat melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan
- H= guru melakukan penelitian tindakan kelas
- I= guru melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, sub variabel kompetensi profesional yang paling menonjol adalah Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari berada pada kategori setuju. Kompetensi profesional rata-rata menunjukkan (62,9%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesionalitas guru SMK Swasta di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi profesional.

#### **4) Kompetensi Sosial**

Sub variabel kompetensi sosial terdiri dari 7 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Data mengenai kompetensi sosial merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap data hasil penelitian

dilakukan perhitungan frekuensi jawaban angket berdasarkan pengisian oleh guru kemudian dihitung persentasenya.

Hasil perhitungan data mengenai kompetensi sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 20. Distribusi Frekuensi Kompetensi Sosial (SMK Negeri)**

No	Aspek	% (N=84)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru berbahasa Indonesia jika berada dalam lingkungan sekolah sesama guru (teman sejawat), masyarakat sekitar	6,0	47,6	40,5	6,0
2	Guru dan kepala sekolah berkomunikasi dengan baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran	15,5	69,0	15,5	0
3	Guru berkomunikasi dengan sesama guru untuk kepentingan peningkatan pembelajaran	25,0	70,2	4,8	0
4	Guru berusaha memahami bahwa setiap siswa mempunyai karakteristik, potensi dan latar belakang yang berbeda	44,0	53,6	2,4	0
5	Guru berhubungan baik dengan guru lain (teman sejawat) di lingkungan dan luar sekolah	11,9	46,4	13,1	28,6
6	Guru menciptakan hubungan kemitraan dengan orang tua wali untuk mempermudah kepentingan pendidikan	21,4	31,0	36,9	10,7
7	Guru menerima masyarakat sekitar sebagai mitra untuk kepentingan pendidikan	42,9	54,8	2,4	0
	Rata-rata	23,8	53,2	16,5	6,5

Keterangan:

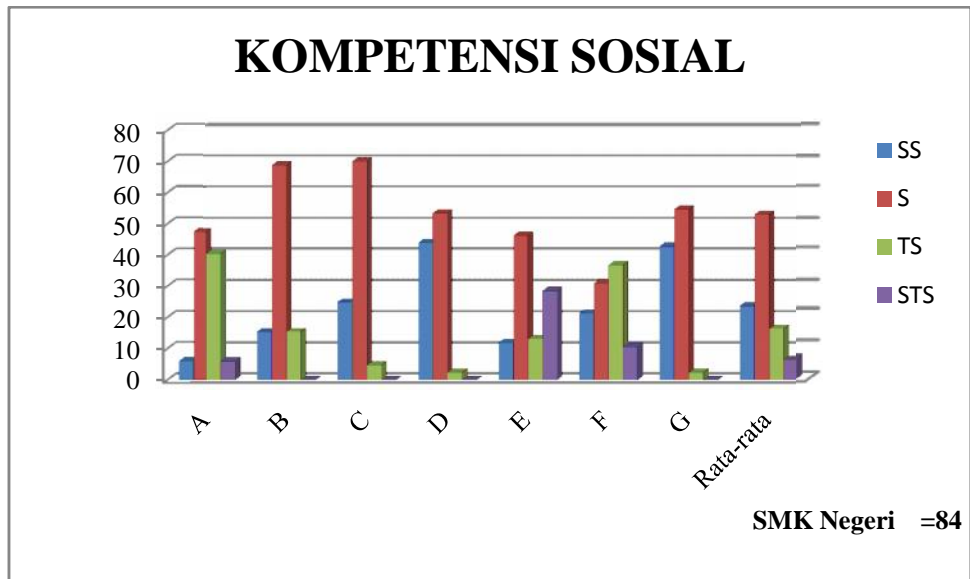
SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi sosial rata-rata berada pada kategori setuju. Data mengenai profesionalitas guru pada sub kompetensi sosial guru SMK Negeri di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 18.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Sosial Guru SMK Negeri**

ket:

- A= guru berbahasa Indonesia jika berada dalam lingkungan sekolah
- B= guru berkomunikasi dengan baik pada atasan
- C= guru berkomunikasi dengan sesama guru untuk peningkatan kualitas
- D= guru berusaha memahami bahwa setiap siswa
- E= guru berhubungan baik dengan guru lain di lingkungan dan luar sekolah
- F= guru menciptakan hubungan kemitraan dengan orang tua wali
- G= guru menerima masyarakat sekitar sebagai mitra

Berdasarkan gambar di atas, sub variabel kompetensi sosial yang paling menonjol adalah Guru menciptakan hubungan kemitraan dengan orang tua wali untuk mempermudah kepentingan pendidikan berada pada kategori tidak setuju. Kompetensi sosial rata-rata menunjukkan (53,2%) berada pada kategori setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesionalitas guru SMK Negeri di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi sosial.

**Tabel 21. Distribusi Frekuensi Kompetensi Sosial (SMK Swasta)**

No	Aspek	% (N=106)			
		SS	S	TS	STS
1	Guru berbahasa Indonesia jika berada dalam lingkungan sekolah sesama guru (teman sejawat), masyarakat sekitar	5,7	47,2	45,3	1,9
2	Guru dan kepala sekolah berkomunikasi dengan baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran	11,3	78,3	10,4	0
3	Guru berkomunikasi dengan sesama guru untuk kepentingan peningkatan pembelajaran	27,4	64,2	7,5	0,9
4	Guru berusaha memahami bahwa setiap siswa mempunyai karakteristik, potensi dan latar belakang yang berbeda	42,5	50,9	6,6	0
5	Guru berhubungan baik dengan guru lain (teman sejawat) di lingkungan dan luar sekolah	14,2	61,3	9,4	15,1
6	Guru menciptakan hubungan kemitraan dengan orang tua wali untuk mempermudah kepentingan pendidikan	9,4	57,5	26,4	6,6
7	Guru menerima masyarakat sekitar sebagai mitra untuk kepentingan pendidikan	32,1	63,2	4,7	0
	Rata-rata	20,4	60,4	15,7	3,5

Keterangan:

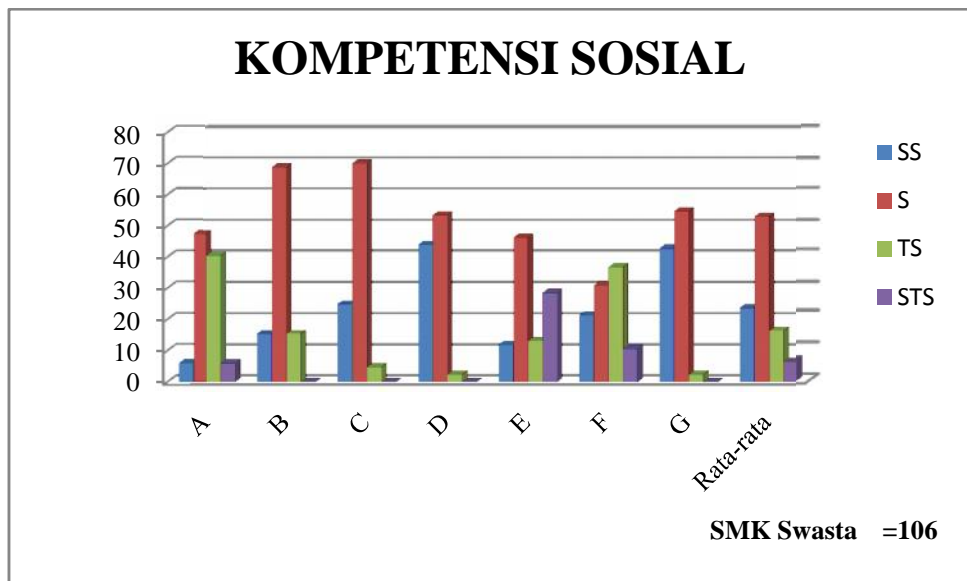
SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dengan melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi sosial rata-rata berada pada kategori tidak setuju. Data mengenai profesionalitas guru pada sub kompetensi sosial guru SMK Swasta di Kecamatan Depok dapat digambarkan pada grafik berikut.



**Gambar 19.**  
**Grafik Histogram Distribusi Kompetensi Sosial Guru SMK Swasta**

ket:

- A= guru berbahasa Indonesia jika berada dalam lingkungan sekolah
- B= guru berkomunikasi dengan baik pada atasan
- C= guru berkomunikasi dengan sesama guru untuk peningkatan kualitas
- D= guru berusaha memahami bahwa setiap siswa
- E= guru berhubungan baik dengan guru lain di lingkungan dan luar sekolah
- F= guru menciptakan hubungan kemitraan dengan orang tua wali
- G= guru menerima masyarakat sekitar sebagai mitra

Berdasarkan gambar di atas, sub variabel kompetensi sosial yang paling menonjol adalah Guru berkomunikasi dengan atasan hanya untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran berada pada kategori tidak setuju. Kompetensi sosial rata-rata menunjukkan (42,9%) berada pada kategori tidak setuju, yang berarti dapat dipahami bahwa profesionalitas guru SMK Swasta di Kecamatan Depok pada sub variabel kompetensi sosial.

### 3. Pengujian Prasyarat Analisis Regresi

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing variabel penelitian, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji

normalitas data penelitian ini digunakan dengan uji *kolmogrov-smirnov*. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai  $p > 0,05$  berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai  $p < 0,05$  tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil perolehan data bahwa variabel Desentralisasi Pendidikan (X) di SMK Negeri Kecamatan Depok 0,132 dan variabel Profesionalitas Guru SMK Negeri Kecamatan Depok (Y) 0,438. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y SMK Negeri Kecamatan Depok berdistribusi normal sedangkan variabel Desentralisasi Pendidikan (X) di SMK Swasta Kecamatan Depok 0,761 dan variabel Profesionalitas Guru SMK Swasta Kecamatan Depok (Y) 0,202. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y di SMK Swasta Kecamatan Depok berdistribusi normal.

#### **b. Uji Linearitas**

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Teknik analisis yang digunakan adalah uji F. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikan 5%. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat tidak linear, sedangkan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hubungan variabel bebas dan terikat bersifat linier. Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer SPSS 13.

Berdasarkan hasil perolehan data, nilai F hitung antara variabel X-Y pada SMK Negeri di Kecamatan Depok sebesar 0,231 lebih kecil dari F tabel yaitu 1,840 dan variabel X-Y pada SMK Swasta di Kecamatan Depok sebesar 0,089 lebih kecil dari F tabel yaitu 1,740. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan garis regresi pada SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Depok tersebut berbentuk linier.

#### **4. Pengujian Hipotesis**

##### **a. Uji Hipotesis I**

Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh positif antara desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK Negeri di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”. Teknik analisis untuk menguji hipotesis pertama menggunakan analisis 1 prediktor.

##### **1. Persamaan Garis Regresi**

Berdasarkan pernyataan data pengujian prasyarat analisis regresi di atas maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 90,960 + 0,758 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X sebesar 0,758 yang berarti, apabila nilai desentralisasi pendidikan (X) meningkat satu poin maka nilai profesionalitas guru (Y) akan meningkat 0,758 poin

##### **2. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi dari profesionalitas guru

(Y) yang diterangkan oleh variabel independennya. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 13.0 menunjukkan  $r^2$  sebesar 0,135. Nilai tersebut berarti 13,5% perubahan pada variabel profesionalitas guru (Y) dapat diterangkan oleh variabel desentralisasi pendidikan (X).

### **3. Pengujian Signifikansi Korelasi dengan Uji t**

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui kebermaknaan korelasi Desentralisasi Pendidikan (X) terhadap profesionalitas guru (Y). Berdasarkan hasil analisis data koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,368 yang berarti koefisien bernilai positif dan lebih besar dari 0, dengan demikian dapat dinyatakan ada pengaruh yang positif antara X terhadap Y. Uji signifikan menggunakan uji t hitung sebesar 3,581 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,664 pada taraf signifikansi 5% maka nilai t hitung  $>$  t tabel sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif oleh Desentralisasi Pendidikan terhadap profesionalitas guru walaupun sangat kecil.

#### **b. Uji Hipotesis II**

Hipotesis yang kedua dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh positif antara desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK Swasta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”. Teknik analisis untuk menguji hipotesis kedua menggunakan analisis 1 prediktor.



### 1. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan pernyataan data pengujian prasyarat analisis regresi di atas maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 98,355 + 0,574 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X sebesar 0,574 yang berarti, apabila nilai desentralisasi pendidikan (X) meningkat satu poin maka nilai profesionalitas guru (Y) akan meningkat 0,574 poin

### 2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi dari profesionalitas guru (Y) yang diterangkan oleh variabel independennya. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 13.0 menunjukkan  $r^2$  sebesar 0,065. Nilai tersebut berarti 6,5% perubahan pada variabel profesionalitas guru (Y) dapat diterangkan oleh variabel desentralisasi pendidikan (X).

### 3. Pengujian Signifikansi Korelasi dengan Uji t

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui kebermaknaan korelasi Desentralisasi Pendidikan (X) terhadap profesionalitas guru (Y). Berdasarkan hasil analisis data koefisien korelasi (r) sebesar 0,254 yang berarti koefisien bernilai positif dan lebih besar dari 0, dengan demikian dapat dinyatakan ada pengaruh yang positif antara X terhadap Y. Uji signifikan menggunakan uji t hitung sebesar 2,681 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,660 pada taraf signifikansi 5% maka nilai t hitung > t tabel sehingga

hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif oleh Desentralisasi Pendidikan terhadap profesionalitas guru walaupun sangat kecil.

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Desentralisasi Pendidikan terhadap Profesionalitas Guru SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang penelitian sebagai berikut:

### **1. Desentralisasi Pendidikan**

Reformasi tahun 1999 membawa implikasi berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, baik dari sisi paradigma maupun kebijakan pendidikan. Salah satu perubahan paradigma pendidikan dari yang sentralistik ke arah pemberian otonomi kepada daerah. Hal ini melahirkan sistem desentralisasi pendidikan sebagai bentuk perubahan dari sistem sentralisasi yang diberlakukan sebelumnya. Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pendidikan dalam penelitian ini mengangkat indikator berupa aktualisasi dan kontekstualisasi pelaksanaan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah, baik perencanaan, kurikulum, standarisasi kelulusan, pengembangan kreatifitas pembelajaran di sekolah, kewenangan pada sekolah untuk melakukan swakelola maupun pada dataran profesionalisasi tenaga guru yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Sekolah merupakan organisasi terdepan dalam sistem pendidikan secara nasional. Di tingkat sekolah itulah realisasi dari semua kebijakan tentang

pendidikan diimplementasikan serta dapat dilihat manfaatnya, apakah suatu kebijakan pendidikan mampu dilaksanakan dan sejauhmana dapat dilaksanakan serta apakah kebijakan tersebut telah memberi manfaaat sebagaimana tujuan dari ditetapkannya kebijakan.

Lahirnya kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan *goodwill* pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan. Pada level daerah, kebijakan-kebijakan pendidikan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pusat. Demikian juga kebijakan pendidikan pada level sekolah sampai dengan kelas. Intinya kewenangan juga diberikan kepada penanggung jawab unit pelaksana sebagai pihak yang dianggap paling tahu kondisi dan kebutuhan pendidikan di unit tersebut. Misalnya pada level daerah, kewenangan ada di tangan Dinas Pendidikan daerah tersebut, sedang pada unit sekolah, kewenangan ada pada kepala sekolah beserta jajarannya dan di kelas adalah guru.

Demikian juga dalam pelaksanaan kurikulum, dalam desentralisasi kurikulum tidak kaku dengan berpatokkan pada petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis serta seragam untuk semua sekolah, melainkan kurikulum bersifat lebih luwes sesuai dengan kebutuhan sekolah/siswa dan karakter daerah masing-masing. Selain itu dinamika kerja guru maupun civitas akademika sekolah pada umumnya mendapat banyak kesempatan dan keleluasaan berpartisipasi. Kepala sekolah dan guru dapat membuat dan melakukan banyak program yang dianggap sesuai dengan kebutuhan sekolah maupun peserta didik.

Pelaksanaan desentralisasi dalam dunia pendidikan tidak berjalan dengan lancar karena menemui banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu

hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi khususnya dalam pengertian otonomi di tingkat sekolah maupun di kelas adalah kebiasaan dari sistem lama masih sangat melekat. Budaya tinggal melaksanakan atau sebagai pelaksana yang telah melekat begitu lama menyebabkan kepala sekolah dan guru kurang terampil dalam mengelola berbagai kewenangan dan tanggung jawab yang dilimpahkan.

Seorang kepala sekolah maupun guru yang selama ini bertindak berdasarkan intruksi/petunjuk kemudian disertai tugas dan tanggung jawab tanpa petunjuk tetapi memberi kewenangan padanya dalam melaksanakan tentu tidak gampang. Ada kebingungan mau dilaksanakan dengan bagaimana dan ada kekhawatiran jika tidak sesuai dengan harapan. Guru dan kepala sekolah tidak terbiasa memikirkan dan mencari cara maupun menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri, melainkan menyerahkan pada yang lebih berwenang. Maka saat kewenangan ini ada pada dirinya, maka tidak setiap guru maupun kepala sekolah siap dan mampu melakukan.

Ketidaksiapan dan ketidakmampuan tersebut bukan hal yang bersifat permanen sehingga menjadi alasan pembenaran bagi ditariknya kembali kewenangan yang telah diberikan. Tetapi bersifat sementara karena perlu adanya pembiasaan dan peningkatan keterampilan dalam mengelola kewenangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan ataupun kebingungan sehingga dapat berjalan sesuai harapan.

Karena itu dalam pelaksanaan desentralisasi masih berada dalam tahap penyempurnaan, terlebih masih tarik-menarik kepentingan di antara pihak-pihak

yang “konservatif” dan “progresif”. Pihak yang disebut masih “konservatif” yaitu kepala sekolah atau guru yang tetap mempertahankan pola sentralisasi dengan melakukan dominasi terhadap kewenangan dan keputusan mengambil kebijakan sekolah. Dominasi tersebut dilakukan dengan tidak memberi ruang atau kesempatan pada pihak lain. Sedangkan pihak kepala sekolah atau guru-guru “progresif” yaitu mereka yang melakukan keputusan dengan memberikan kesempatan serta mengakomodir berbagai masukan dan pertimbangan seluruh civitas sekolah dan masyarakat, mereka menginginkan otonomi sekolah benar-benar dapat direalisasikan.

Selain itu masih ada guru yang kesulitan dalam memahami dan mendefinisikan desentralisasi khususnya dalam pengelolaan kelas dan pembelajaran. Hal ini terjadi karena para guru telah lama bekerja sebagai pelaksana saja dari berbagai keputusan pendidikan sampai level pengelolaan kelas melalui petunjuk teknis yang sudah ditentukan. Sehingga ketika guru diberi kewenangan penuh menjadi kebingungan, seperti halnya dalam pelaksanaan kurikulum “Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang sekarang menjadi “Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP)”, pengembangan materi pembelajaran dan penguasaan teknologi.

Hambatan lain adalah kurangnya koordinasi antar pelaksana pusat dan daerah sampai tingkat sekolah, hal tersebut menyebabkan desentralisasi seperti membuat garis-garis pemisah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih persoalan maupun kewenangan. Apa yang menjadi kewenangan masing-masing

dan bagaimana agar dapat bersinergi sering kurang jelas sehingga yang terjadi justru konflik kewenangan dan sering lempar kesalahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan membawa implikasi tuntutan peningkatan kualitas kerja yang nyata dan harus segera dilaksanakan. Sementara di sisi lain baik SDM maupun sarana prasarannya belum siap dan kurang memadai, dukungan moral maupun material (penghargaan) bagi kinerja guru dari pimpinan atau pemerintah sangat kurang. Sedangkan kesejahteraan yang diperoleh guru belum seimbang dengan tuntutan kerja yang kian meningkat.

## **2. Profesionalitas Guru**

Guru adalah jabatan profesional. Demikianlah pengakuan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagaimana disebut pada pasal 5 ayat 1: “Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip profesional....”. sebagai sebuah profesi, guru dituntut memiliki keahlian dan kompetensi serta tuntutan kerja profesional yang disyaratkan oleh profesinya sebagaimana profesi lain. Dengan kata lain, sosok guru yang profesional bukan sekedar mampu untuk menyampaikan materi pelajaran semata, akan tetapi memerlukan standar tertentu.

Guru menyadari bahwa profesionalitas menurut dirinya dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin, mampu berinovasi dalam segala keterbatasan, berdedikasi, bermoral dan selalu berusaha mengembangkan keahlian/ kompetensi serta ramah terhadap peserta didik.

Untuk kasus guru-guru SMK di Kecamatan Depok, berdasarkan respon pada angket, sudah dapat dikategorikan profesional dimana guru sudah mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan dalam sebaran angket tersebut, hanya saja melalui wawancara dan studi dokumentasi diketahui bahwa dalam pelaksanaannya belum optimal. Artinya, secara teoritis guru-guru SMK di Kecamatan Depok sudah memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai, menguasai metode pembelajaran. Namun ibarat seorang dokter, meskipun keahlian dan keterampilan yang sangat baik, tetapi karena ketiadaandukungan peralatan medis, membuatnya tidak dapat berbuat secara maksimal.

Demikian halnya guru profesional, juga membutuhkan sarana-prasarana yang dapat menunjang metode pembelajaran yang kreatif-inovatif dan mampu menarik sekaligus menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik. Sementara untuk saat ini dari hasil penelitian terbukti bahwa sarana prasarana maupun pembiayaan bagi kegiatan pembelajaran bagi kegiatan pembelajaran masih jauh dari harapan terutama dirasakan bagi SMK swasta dibandingkan SMK Negeri.

Disamping itu, untuk menyiapkan model-model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik dibutuhkan waktu, tenaga dan pemikiran yang lebih banyak. Sementara di sisi lain guru sering tidak terkonsentrasi pada tugas dan kewajibannya secara akademik yang justru menyita waktu lebih banyak. Maka meskipun mereka sebetulnya mampu dan mau untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, tapi kondisi “memaksa” mereka membagi perhatian pada banyak hal.

Untuk melaksanakan model pembelajaran pada peserta didik sebagai subjek tersebut sebagai terungkap dalam hasil penelitian, ternyata guru masih kesulitan dalam melaksankannya. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan sarana-prasarana, anggaran, keterbatasan waktu dan pengetahuan IPTEK bagi guru-guru yang senior. Kurangnya pengetahuan IPTEK bagi guru senior karena mereka sudah sedikit sulit untuk kembali harus belajar dari dasar.

Hambatan dalam profesionalitas guru kadang terkait dengan manajemen sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Berbagai kebijakan atau keputusan maupun program-program sekolah yang kurang demokratis dan tidak melibatkan partisipasi guru juga menghambat kinerja profesional guru. Tuntutan loyalitas pada pimpinan kadang berbenturan dengan kenyataan di lapangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru SMK se Kecamatan Depok baik. Karena dari 4 kompetensi guru hanya kompetensi sosial mengalami sedikit menghambat peningkatan kinerja guru, hal ini disebabkan ruang guru perjurusan terpisah maka sedikit komunikasi yang terjalin anatar guru jurusan dan guru yang tidak ada jam mengajar tidak hadir di sekolah. Akan tetapi hal ini akan tetap terus diupayakan peningkatannya agar profesionalitas guru dapat berjalan dengan baik.

### **3. Pengaruh Desentralisasi Pendidikan terhadap Profesionalitas Guru SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman**

Pada desentralisasi pendidikan, peranan guru lebih dititik beratkan dalam persiapan kerja siswa (menyiapkan pengalaman belajar bagi siswa) dan penilaian yang konstruktif, karena pada saat mengajar guru “hanya” bertindak sebatas memotivasi, mendorong dan memfasilitasi peserta didik. Dengan demikian guru



harus mampu mendesain suatu program pembelajaran yang menimbulkan aktifitas bagi peserta didik, memberikan pandangan yang efektif serta mengakomodir semua kebutuhan peserta didik.

Peran guru yang demikian itu memiliki konsekuensi yang menuntut guru harus punya banyak ide menarik, didukung oleh sarana-prasarana yang memadai meskipun tidak harus mahal, memiliki sikap telaten, sabar dan mau bekerja keras serta bersikap adil dan obyektif dalam melaksanakan penilaian hasil kerja peserta didik, akomodatif terhadap keberagaman persepsi dan partisipasi peserta didik serta bersikap demokratis.

Dengan adanya desentralisasi pendidikan, guru jelas membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran serta dukungan sarana-prasarana yang memadai. Selain itu guru harus demokratis dan kreatif selain menjadi teladan. Sementara peserta didik harus dapat dimotivasi agar bersikap aktif dan selalu diusahakan dalam kondisi aman, nyaman dan senang agar mampu membangun pengetahuan melalui pengalamannya.

Guru juga mempunyai kesempatan untuk melakukan berbagai kreatifitas dan inovasi pembelajaran sebagai upaya-upaya positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun hasil belajar peserta didik sekaligus maupun membuka ruang partisipasi yang luas bagi seluruh masyarakat.

Menurut pendapat para guru, desentralisasi pendidikan juga merupakan upaya untuk mengurangi maraknya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan melibatkan banyak pihak dalam hal pengawasan, pengambilan keputusan (termasuk guru, dewan sekolah dan komite sekolah serta masyarakat umum) dan

adanya transparansi serta pertanggung jawaban yang akuntabel, maka kebocoran anggaran, *mark-up* berbagai proyek, rekrutment yang menyalahi prinsip *merit system* (yang melahirkan guru-kepala sekolah yang kurang profesional), penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan kekuasaan (yang mengatasnamakan sekolah untuk mengedepankan kepentingan pribadi bukan kepentingan pendidikan) dan sebagainya, dapat ditekan.

Karena itu kesadaran dan itikad baik saja belum cukup untuk dapat mewujudkan sebuah sistem yang mampu bekerja secara optimal, diperlukan pembiasaan bagi para pelaksana kebijakan untuk mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan hal-hal yang baru. Hal tersebut biasanya memang terasa menjadi beban berat pada tahap-tahap awal dan juga dibutuhkan kemauan serta kerja keras baik guru yang bersangkutan dan pemerintah untuk terus-menerus memberi dukungan secara nyata dalam bidang anggaran maupun sarana dan prasarana serta pemberian penghargaan yang layak bagi para pelaku pendidikan. Sehingga keyakinan dari para pelaksana khususnya guru bahwa hal tersebut akan membawa dunia pendidikan pada kondisi yang lebih baik dapat menjadi modal bagi optimisme pelaksanaan desentralisasi pendidikan ke depan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, seluruh kompetensi untuk profesional guru dibutuhkan agar dapat menunjang sistem desentralisasi tersebut. Namun profesionalitas guru yang selama ini kurang berkembang dan diharapkan dapat lebih dikembangkan menurut responden adalah pengetahuan, kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran di kelas, partisipasi dari

para guru dalam menentukan program ataupun kebijakan sekolah serta tanggung jawab.

Profesionalitas guru dalam sistem apapun menurut idealisme dunia pendidikan senantiasa menyaratkan kondisi-kondisi terbaik bagi peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran. Guru senantiasa dituntut untuk dapat menciptakan kondisi terbaik tersebut. Namun yang jadi persoalannya adalah tidak setiap kompetensi profesional guru tersebut dapat dilaksanakan, dikembangkan ataupun dipertahankan dalam sistem dimana guru bekerja.

Kurang termotifasi melaksanakan karena tiadanya perhatian yang dianggap memadai terhadap upaya-upaya tersebut karena tidak ada semacam mekanisme *reward and punnish* dari pimpinan. Jadi meskipun guru dapat mendesain berbagai persiapan pembelajaran sebagaimana diharapkan dalam desentralisasi pendidikan, guru sering terbentur kurangnya dukungan pimpinan, sarana prasarana serta anggaran, sehingga guru tidak dapat berbuat maksimal dalam proses pembelajaran.

Sebagai kesimpulan tambahan mengenai kompetensi profesional guru dalam desentralisasi yang disampaikan semua responden, bahwa kalangan guru PNS, CPNS dan NON-PNS dan dengan masa kerja yang sudah bertahun-tahun maupun berbulan-bulan telah memiliki kesadaran kolektif terhadap profesinya sebagai guru.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN MASALAH, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMK Negeri dan Swasta Kecamatan Depok dikatakan cukup baik, pada sub variabel otonomisasi sekolah dan demokratisasi sekolah rata-rata menjawab setuju. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana-prasarana, dana dan pengetahuan yang kurang mendukung terutama bagi SMK swasta.
2. Profesionalitas guru SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Depok dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari empat kompetensi yang dimiliki guru, yaitu sub variabel kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Untuk kompetensi sosial mengalami kategori kurang baik karena kurangnya komunikasi guru yang disebabkan ruang guru antar jurusan terpisah dan guru tidak hadir jika tidak ada jam mengajar.
3. Pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap profesionalitas guru SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Depok sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari pengujian regresi sederhana pada SMK Negeri, besar pengaruh 13,5%, sedangkan pada SMK Swasta besar pengaruh 6,5%. Untuk 86,5% dari SMK Negeri dan 93,5% SMK Swasta antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan untuk dimotivasi, dihargai dan disejahterakan serta sarana-prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari penelitian ini belum sempurna, walupun penelitian telah dilakukan secara optimal. Ketidaksempurnaan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data menggunakan angket masih ada kelemahan-kelemahan seperti tidak kembali keseluruhannya angket yang telah disebarkan, responden kurang cermat, ketidakjujuran dalam menjawab, kerjasama dengan responden yang tidak tepat karena penelitian dilakukan pada persiapan ujian nasional.
2. Penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang.

Hal ini merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan penyusunan laporan yang mendekati sempurna.

## **3. Saran**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di dalam Bab IV, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya pengawas baik dari Dinas Pendidikan maupun dari sekolah lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sekolah seperti sarana-prasarana, inovasi dan SDM untuk peningkatan kualitas sekolah.
2. Pimpinan sekolah hendaknya memberikan dukungan nyata melalui penghargaan maupun sanksi terhadap kinerja guru, menciptakan iklim yang sehat dan demokratis, peningkatan sarana prasarana maupun anggaran

pendidikan yang memadai serta pemberian kesejahteraan yang layak sebagai penghargaan terhadap beban kerja yang semakin berat bagi guru.

3. Pimpinan sekolah harus memikirkan untuk membuat rencana pencapaian target-target yang harus dicapai bukan oleh peserta didik tetapi juga para pelaksana pendidikan seperti adanya tolak ukur penelitian berbasis kinerja, prestasi, kemandirian dan moralitas atau akhlak mulia. Evaluasi berkala dan mencari jalan keluar berbagai permasalahan pendidikan yang dilakukan sekolah secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh sivitas sekolah, masyarakat baik *stakeholder* maupun *user* pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Duhou, I.(2002). *School Based Management*. (Terjemahan Nyoman Aini,dkk). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Creswell, J.W. (2002). *Reseach Design: gualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 2<sup>nd</sup> Edition. Lincoln: University of Nebraska.
- Daulay, H.P. (2004). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. (2001). *Kewenangan Tiap Sekolah Dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Dirjen, Dikdasmen, Depdiknas.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas RI.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. (2009). *Daftar Normatif Guru SMA/SMK Keadaan 2009*. Yogyakarta: Diknas.
- Djohar. (1991). *Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- E. Mulyasa. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi. (2002). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicitra karya Nusa.
- Fiere, P. (2000). *Pendidikan yang Membebaskan* (terjemahan). Jakarta: Kencana.
- Harris, A. (2002). *School Improvement: What's in it for school?.* New York: Routledge Falmer.
- Ibrahim Bafadal. (2003). *Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kus Eddy Sartono, E., dkk. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UPT. MKU. UNY.
- Martinis Yamin. (2006). *Profesionalisasi Guru dan Implemantasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta, Gaung Persada Press.

- Moh. Uzer Usman. (2002). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Sudjana. (2002). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Teori-teori Belajar untuk Pengajaran*. Jakarta: FE UI Press.
- Oemar Hamalik. (2002). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Professional Recognition Program: applying the professional standards in annual review and probation-level 1*. Directorate of School Education.
- Postman, Neil. (1995). *The End of Education* (terjemahan). New York: Alfred A. Knopf.
- Rosyada. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Saifuddin Azwar. (2000). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan Danim. (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiharto & Siagian, D. (2003). *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supalan. (2005). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat.
- Suparno, Paul. (2004). *Guru Demokratis di Era Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto. *Dialog Interaktif Tentang Peran Profesionalisme Guru di LMP-UNY*. <http://pemda-diy.go.id/berita/article.phpo?sid=1184> Tanggal: 2009-06-13 jam 16:45:45.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adicitra Karya.



- Syaiful Bahri Djamarah. (2005). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar. H.A.R. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_(2001). *Perubahan Sosial dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Tulus Winarsunu. (2006). *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Zamroni. (2002). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Publishing.
- \_\_\_\_\_(2001). *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Publishing.

# LAMPIRAN

kepada

Yth. Bapak/Ibu Guru

Di Sekolah

Dengan hormat,

Dalam kesibukan Bapak/Ibu saat ini, perkenankanlah saya mohon Bapak/Ibu dapat menyisihkan waktu untuk mengisi angket penelitian seperti yang saya lampirkan. Angket penelitian ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) pada Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defie Lastriana

NIM : 05101244004

Judul Skripsi : Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Terhadap Profesionalitas Guru SMK di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Angket tidak ada pengaruhnya terhadap profesi Bapak/Ibu Guru saat ini. Oleh karena itu kesungguhan dan kesediaan dalam mengisi angket ini sangat berarti bagi kelancaran penelitian saya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan Bapak/Ibu mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamualikum. Wr. Wb

Hormat Saya,

Defie lastriana

## DESENTRALISASI PENDIDIKAN

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
<b>OTONOMISASI</b>					
1	Mata pelajaran sebagai muatan kurikulum ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional				
2	Ujian akhir nasional merupakan salah satu kebijakan untuk menetapkan standar mutu sekolah				
3	Keputusan standar kelulusan diseragamkan untuk semua sekolah, agar menyamaratakan standar pendidikan nasional				
4	Kepala sekolah membuat keputusan melalui kesepakatan bersama melalui kesepakatan				
5	Sekolah menentukan sendiri hari efektif dan hari libur				
6	Sekolah bersama komite sekolah berkualifikasi dalam memutuskan profesionalitas guru sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan <i>user</i> terhadap keluaran				
<b>DEMOKRATISASI</b>					
1	Kepala sekolah dan guru/pegawai yang mengurus bagian keuangan menangani penataan keuangan				
2	Kepala sekolah dan guru tertentu menangani penentuan anggaran kebutuhan sarana				
3	Kepala sekolah dan guru tertentu menangani penentuan anggaran kebutuhan prasarana				
4	Kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan kepentingan sekolah ada pihak dari komite sekolah yang mengkritisi				
5	Guru membela teman seprofesi yang diperlakukan tidak adil oleh sekolah				
6	Guru melaksanakan apapun kebijakan yang ditetapkan sekolah dengan baik				
7	Guru menguasai materi pelajaran 90% berdasarkan kurikulum yang ditetapkan				
8	Laporan pertanggung jawaban tahunan diberi tahukan kepada masyarakat				
9	Masyarakat mendapat apa saja info yang sedang terjadi di sekolah				

## PROFESIONALITAS GURU

KOMPETENSI PEDAGOGIK					
No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Guru memerlukan keleluasaan untuk membuat perencanaan pembelajaran				
2	Guru menyusun program tahunan setiap awal tahun pelajaran				
3	Setiap pokok bahasan yang direncanakan disusun secara tertulis dalam satuan pembelajaran				
4	Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dan merelevansinya dengan realitas kehidupan siswa				
5	Setiap awal semester Bapak/Ibu guru harus membuat program semester				
6	Guru membuat laporan secara periodik mengenai kebutuhan dan pengembangan dalam pembelajaran				
7	Guru menyampaikan manfaat atau kegunaan setiap pokok bahasan bagi kehidupan siswa				
8	Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang <i>relax</i> dengan menggunakan alat pendukung				
9	Guru memberikan materi lintas mata pelajaran agar siswa mendapat gambaran sebelum pelajaran dimulai				
10	Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di sekitar siswa				
11	Guru memberikan kesempatan siswa untuk memahami ide dan mencoba hal-hal baru				
12	Penggunaan sumber bahan dan media pembelajaran di sesuaikan dengan pemahaman siswa				
13	Guru menentukan apa yang harus dilakukan siswa selama proses belajar				
14	Pengembangan materi pelajaran sesuai dengan kreatifitas siswa agar siswa dapat mengaplikasikan pelajaran				
15	Guru menyesuaikan alokasi waktu yang telah ditentukan dan mengikuti kemampuan pemahaman siswa				
16	Guru melakukan evaluasi agar dapat mengetahui apa yang kurang dipahami siswa				
17	Guru memberikan penghargaan ( <i>reward</i> ) kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi				
18	Guru melakukan <i>remedial teaching</i> maupun <i>remedial test</i> bagi siswa yang tertinggal dalam prestasi				
KOMPETENSI KEPERIBADIAN					
19	Guru datang sebelum jam pelajaran dimulai				
20	Guru memberikan tugas kepada siswa jika memiliki kepentingan pribadi				
21	Guru tidak meninggalkan sekolah untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan atau guru piket				
22	Guru mengikuti rapat evaluasi KBM, supaya dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah				
23	Guru siap menerima teguran atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas				
24	Guru memberikan sikap yang baik di lingkungan dan luar lingkungan				
25	Guru berusaha berlaku adil kepada siswa yang mengikuti tata tertib sekolah				

## PROFESIONALITAS GURU

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
26	Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan				
<b>KOMPETENSI PROFESIONAL</b>					
27	Guru menggunakan Bahasa Indonesia jika berada di dalam kelas				
28	Lingkungan sekitar siswa dapat dijadikan sebagai sumber belajar				
29	Guru tetap berinovasi meskipun konsep dasar materi pelajaran yang disampaikan sama				
30	Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari				
31	Guru <i>tidak</i> harus terpaku pada juklak dan juknis dalam pembuatan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan				
32	Guru harus membuat perencanaan pembelajaran				
33	Guru dapat melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan				
34	Guru melakukan penelitian tindakan kelas ( <i>class action researsh</i> ) untuk memperbaiki pembelajaran				
35	Penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan bagian dari tugas Bapak/Ibu guru				
<b>KOMPETENSI SOSIAL</b>					
36	Guru berbahasa Indonesia jika berada dalam lingkungan sekolah sesama guru (teman sejawat), masyarakat sekitar				
37	Guru dan kepala sekolah berkomunikasi dengan baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran				
38	Guru berkomunikasi dengan sesama guru untuk kepentingan peningkatan pembelajaran				
39	Guru berusaha memahami bahwa setiap siswa mempunyai karakteristik, potensi dan latar belakang yang berbeda				
40	Guru berhubungan baik dengan guru lain (teman sejawat) di lingkungan dan luar sekolah				
41	Guru menciptakan hubungan kemitraan dengan orang tua wali untuk mempermudah kepentingan pendidikan				
42	Guru menerima masyarakat sekitar sebagai mitra untuk kepentingan pendidikan				

### Pedoman Wawancara

Pertanyaan	Uraian
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan desentralisasi di sekolah ini?	
2. Seperti apa pelaksanaan desentralisasi di sekolah telah dilakukan?	
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini di lingkungan sekolah sudah terwujud iklim yang demokratis dalam pembelajaran? Bagaimana gambaran model pembelajaran yang demokratis?	
4. Adakah faktor pendukung dan penghambat bagi terciptanya iklim yang demokratis dalam pembelajaran? Sebutkan?	
5. Apakah media dan sumber belajar yang digunakan semuanya tersedia di sekolah, jika tidak bagaimana upaya Bapak/Ibu?	
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada hambatan dalam penerapan desentralisasi pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya jika ada?	
7. Menurut Bapak/Ibu, kriteria apa saja yang harus dimiliki guru profesional?	
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana meningkatkan kualitas profesionalitas keguruan?	
9. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan profesionalitas guru?	
10. Bagaimana saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan profesionalitas guru ke depan?	
11. Dapatkah Bapak/Ibu melaksanakan semua peraturan sekolah. Adakah faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut, sebutkan?	

## Desentralisasi Pendidikan

[illegible]



Desentralisasi Pendidikan

		DP 13	DP 14	DP 15	DP 16	Tot
1		2	2	2	2	41
2		2	2	2	2	38
3		3	4	3	3	49
4		3	2	3	4	47
5		4	4	4	2	50
6		2	2	2	2	35
7		2	1	2	2	37
8		1	1	1	3	38
9		3	1	3	4	48
10		3	1	3	3	44
11		2	1	1	3	37
12		3	2	2	3	39
13		3	2	2	3	39
14		3	2	2	3	39
15		3	3	2	3	41
16		3	2	3	3	50
17		1	2	2	2	39
18		2	1	2	3	47
19		2	1	3	3	39
20		3	2	3	3	41
21		3	2	3	3	47
22		3	3	2	3	45
23		3	1	2	2	39
24		3	2	2	2	41
25		4	4	4	4	51
26		3	1	2	2	35
27		3	3	2	4	43
28		3	2	2	3	48
29		3	2	2	2	46
30		3	2	2	2	38
Total	N	30	30	30	30	30

# Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
DP1 Desentralisasi Pendidikan	39.20	21.062	.467	.755
DP2 Desentralisasi Pendidikan	39.53	20.464	.353	.764
DP3 Desentralisasi Pendidikan	40.37	21.482	.382	.761
DP4 Desentralisasi Pendidikan	40.23	21.426	.353	.763
DP5 Desentralisasi Pendidikan	40.30	21.183	.390	.760
DP6 Desentralisasi Pendidikan	40.57	21.220	.361	.762
DP7 Desentralisasi Pendidikan	40.50	21.224	.345	.763
DP8 Desentralisasi Pendidikan	38.97	23.137	.031	.785
DP9 Desentralisasi Pendidikan	38.90	21.610	.371	.762
DP10 Desentralisasi Pendidikan	39.07	21.857	.354	.763
DP11 Desentralisasi Pendidikan	39.30	20.217	.429	.756
DP12 Desentralisasi Pendidikan	38.90	21.679	.356	.763
DP13 Desentralisasi Pendidikan	39.67	20.368	.435	.755
DP14 Desentralisasi Pendidikan	40.37	19.964	.348	.767
DP15 Desentralisasi Pendidikan	40.03	19.413	.591	.740
DP16 Desentralisasi Pendidikan	39.60	20.869	.369	.761

# Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	44

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PG1 Profesionalisme Guru	123.53	101.844	.492	.882
PG2 Profesionalisme Guru	123.47	102.120	.429	.882
PG3 Profesionalisme Guru	123.43	102.323	.398	.883
PG4 Profesionalisme Guru	123.60	103.076	.396	.883
PG5 Profesionalisme Guru	123.40	102.800	.343	.884
PG6 Profesionalisme Guru	123.17	102.489	.381	.883
PG7 Profesionalisme Guru	123.27	102.064	.409	.883
PG8 Profesionalisme Guru	123.27	102.478	.367	.883
PG9 Profesionalisme Guru	124.53	104.809	.076	.889
PG10 Profesionalisme Guru	124.63	101.895	.357	.883
PG11 Profesionalisme Guru	124.93	104.202	.149	.887
PG12 Profesionalisme Guru	123.57	101.426	.416	.882
PG13 Profesionalisme Guru	123.33	102.092	.406	.883
PG14 Profesionalisme Guru	123.50	101.431	.445	.882
PG15 Profesionalisme Guru	123.53	100.257	.456	.882
PG16 Profesionalisme Guru	124.47	101.085	.375	.883
PG17 Profesionalisme Guru	124.83	102.420	.388	.883
PG18 Profesionalisme Guru	124.93	102.133	.351	.883
PG19 Profesionalisme Guru	124.37	100.930	.345	.884
PG20 Profesionalisme Guru	124.73	101.995	.354	.883
PG21 Profesionalisme Guru	123.23	101.082	.400	.883
PG22 Profesionalisme Guru	124.23	101.013	.369	.883
PG23 Profesionalisme Guru	123.67	100.161	.370	.884
PG24 Profesionalisme Guru	123.47	102.257	.358	.883
PG25 Profesionalisme Guru	123.70	100.355	.534	.881
PG26 Profesionalisme Guru	124.77	101.978	.376	.883
PG27 Profesionalisme Guru	123.30	102.355	.379	.883
PG28 Profesionalisme Guru	123.60	101.352	.438	.882
PG29 Profesionalisme Guru	123.77	102.599	.446	.883
PG30 Profesionalisme Guru	123.43	102.323	.398	.883
PG31 Profesionalisme Guru	124.63	103.137	.337	.884
PG32 Profesionalisme Guru	123.50	103.017	.346	.884
PG33 Profesionalisme Guru	123.77	101.426	.344	.884
PG34 Profesionalisme Guru	123.30	101.872	.427	.882
PG35 Profesionalisme Guru	123.43	102.599	.370	.883
PG36 Profesionalisme Guru	123.53	102.809	.384	.883
PG37 Profesionalisme Guru	124.67	101.747	.344	.884
PG38 Profesionalisme Guru	124.13	100.464	.360	.884
PG39 Profesionalisme Guru	124.70	102.976	.339	.884
PG40 Profesionalisme Guru	125.07	101.582	.351	.884
PG41 Profesionalisme Guru	123.33	102.368	.378	.883
PG42 Profesionalisme Guru	124.77	100.392	.361	.884
PG43 Profesionalisme Guru	124.43	101.220	.360	.883
PG44 Profesionalisme Guru	123.47	102.809	.357	.883

Frequency Table

DP1 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	6	7.1	7.1	7.1
	3 S	38	45.2	45.2	52.4
	4 SS	40	47.6	47.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

DP2 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	4	4.8	4.8	4.8
	2 TS	23	27.4	27.4	32.1
	3 S	33	39.3	39.3	71.4
	4 SS	24	28.6	28.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

DP3 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	6	7.1	7.1	7.1
	2 TS	31	36.9	36.9	44.0
	3 S	30	35.7	35.7	79.8
	4 SS	17	20.2	20.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

DP4 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	10	11.9	11.9	11.9
	2 TS	43	51.2	51.2	63.1
	3 S	19	22.6	22.6	85.7
	4 SS	12	14.3	14.3	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

DP5 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	9	10.7	10.7	10.7
	2 TS	43	51.2	51.2	61.9
	3 S	20	23.8	23.8	85.7
	4 SS	12	14.3	14.3	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP6 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	11	13.1	13.1	13.1
	2 TS	47	56.0	56.0	69.0
	3 S	24	28.6	28.6	97.6
	4 SS	2	2.4	2.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP7 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	15	17.9	17.9	17.9
	2 TS	45	53.6	53.6	71.4
	3 S	21	25.0	25.0	96.4
	4 SS	3	3.6	3.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP8 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	7	8.3	8.3	8.3
	3 S	44	52.4	52.4	60.7
	4 SS	33	39.3	39.3	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP9 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	2.4	2.4	2.4
	3 S	55	65.5	65.5	67.9
	4 SS	27	32.1	32.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP10 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	2	2.4	2.4	2.4
	2 TS	8	9.5	9.5	11.9
	3 S	56	66.7	66.7	78.6
	4 SS	18	21.4	21.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP11 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	6	7.1	7.1	7.1
	3 S	35	41.7	41.7	48.8
	4 SS	43	51.2	51.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP12 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	4	4.8	4.8	4.8
	2 TS	31	36.9	36.9	41.7
	3 S	38	45.2	45.2	86.9
	4 SS	11	13.1	13.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP13 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	15	17.9	17.9	17.9
	2 TS	43	51.2	51.2	69.0
	3 S	21	25.0	25.0	94.0
	4 SS	5	6.0	6.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP14 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	7	8.3	8.3	8.3
	2 TS	60	71.4	71.4	79.8
	3 S	13	15.5	15.5	95.2
	4 SS	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**DP15 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	3.6	3.6	3.6
	2 TS	27	32.1	32.1	35.7
	3 S	34	40.5	40.5	76.2
	4 SS	20	23.8	23.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

## Frequency Table

**PG1 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	3	3.6	3.6	3.6
	3 S	40	47.6	47.6	51.2
	4 SS	41	48.8	48.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG2 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	50	59.5	59.5	59.5
	4 SS	34	40.5	40.5	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG3 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	3	3.6	3.6	3.6
	3 S	54	64.3	64.3	67.9
	4 SS	27	32.1	32.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG4 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	1.2	1.2	1.2
	3 S	58	69.0	69.0	70.2
	4 SS	25	29.8	29.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG5 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	57	67.9	67.9	67.9
	4 SS	27	32.1	32.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	



**PG6 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	52	61.9	61.9	61.9
	4 SS	32	38.1	38.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG7 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	48	57.1	57.1	57.1
	4 SS	36	42.9	42.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG8 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	1.2	1.2	1.2
	3 S	44	52.4	52.4	53.6
	4 SS	39	46.4	46.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG9 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	10	11.9	11.9	11.9
	2 TS	61	72.6	72.6	84.5
	3 S	9	10.7	10.7	95.2
	4 SS	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG10 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	2	2.4	2.4	2.4
	2 TS	2	2.4	2.4	4.8
	3 S	45	53.6	53.6	58.3
	4 SS	35	41.7	41.7	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG11 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	53	63.1	63.1	63.1
	4 SS	31	36.9	36.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG12 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	1.2	1.2	1.2
	2 TS	2	2.4	2.4	3.6
	3 S	59	70.2	70.2	73.8
	4 SS	22	26.2	26.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG13 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	2	2.4	2.4	2.4
	2 TS	7	8.3	8.3	10.7
	3 S	57	67.9	67.9	78.6
	4 SS	18	21.4	21.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG14 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	11	13.1	13.1	13.1
	2 TS	54	64.3	64.3	77.4
	3 S	15	17.9	17.9	95.2
	4 SS	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG15 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	18	21.4	21.4	21.4
	2 TS	58	69.0	69.0	90.5
	3 S	5	6.0	6.0	96.4
	4 SS	3	3.6	3.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG16 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	15	17.9	17.9	17.9
	2 TS	45	53.6	53.6	71.4
	3 S	19	22.6	22.6	94.0
	4 SS	5	6.0	6.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG17 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	14	16.7	16.7	16.7
	2 TS	42	50.0	50.0	66.7
	3 S	18	21.4	21.4	88.1
	4 SS	10	11.9	11.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG18 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	23	27.4	27.4	27.4
	2 TS	40	47.6	47.6	75.0
	3 S	11	13.1	13.1	88.1
	4 SS	10	11.9	11.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG19 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	1.2	1.2	1.2
	2 TS	1	1.2	1.2	2.4
	3 S	41	48.8	48.8	51.2
	4 SS	41	48.8	48.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG20 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	6	7.1	7.1	7.1
	2 TS	32	38.1	38.1	45.2
	3 S	38	45.2	45.2	90.5
	4 SS	8	9.5	9.5	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG21 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	3.6	3.6	3.6
	2 TS	10	11.9	11.9	15.5
	3 S	53	63.1	63.1	78.6
	4 SS	18	21.4	21.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG22 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	1.2	1.2	1.2
	2 TS	2	2.4	2.4	3.6
	3 S	48	57.1	57.1	60.7
	4 SS	33	39.3	39.3	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG23 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	1.2	1.2	1.2
	3 S	58	69.0	69.0	70.2
	4 SS	25	29.8	29.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG24 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	11	13.1	13.1	13.1
	2 TS	59	70.2	70.2	83.3
	3 S	11	13.1	13.1	96.4
	4 SS	3	3.6	3.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG25 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	1.2	1.2	1.2
	3 S	56	66.7	66.7	67.9
	4 SS	27	32.1	32.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG26 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	4	4.8	4.8	4.8
	3 S	53	63.1	63.1	67.9
	4 SS	27	32.1	32.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG27 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	10	11.9	11.9	11.9
	3 S	57	67.9	67.9	79.8
	4 SS	17	20.2	20.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG28 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	2.4	2.4	2.4
	3 S	51	60.7	60.7	63.1
	4 SS	31	36.9	36.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG29 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	13	15.5	15.5	15.5
	2 TS	50	59.5	59.5	75.0
	3 S	21	25.0	25.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG30 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	2.4	2.4	2.4
	3 S	62	73.8	73.8	76.2
	4 SS	20	23.8	23.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG31 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	9	10.7	10.7	10.7
	3 S	55	65.5	65.5	76.2
	4 SS	20	23.8	23.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG32 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	1.2	1.2	1.2
	3 S	46	54.8	54.8	56.0
	4 SS	37	44.0	44.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG33 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	1.2	1.2	1.2
	2 TS	2	2.4	2.4	3.6
	3 S	46	54.8	54.8	58.3
	4 SS	35	41.7	41.7	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG34 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	3.6	3.6	3.6
	2 TS	3	3.6	3.6	7.1
	3 S	60	71.4	71.4	78.6
	4 SS	18	21.4	21.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG35 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	16	19.0	19.0	19.0
	2 TS	52	61.9	61.9	81.0
	3 S	12	14.3	14.3	95.2
	4 SS	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG36 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	5	6.0	6.0	6.0
	2 TS	40	47.6	47.6	53.6
	3 S	34	40.5	40.5	94.0
	4 SS	5	6.0	6.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG37 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	13	15.5	15.5	15.5
	2 TS	58	69.0	69.0	84.5
	3 S	13	15.5	15.5	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG38 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	21	25.0	25.0	25.0
	2 TS	59	70.2	70.2	95.2
	3 S	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG39 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	2.4	2.4	2.4
	3 S	45	53.6	53.6	56.0
	4 SS	37	44.0	44.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG40 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	10	11.9	11.9	11.9
	2 TS	39	46.4	46.4	58.3
	3 S	11	13.1	13.1	71.4
	4 SS	24	28.6	28.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG41 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	9	10.7	10.7	10.7
	2 TS	31	36.9	36.9	47.6
	3 S	26	31.0	31.0	78.6
	4 SS	18	21.4	21.4	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

**PG42 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	2.4	2.4	2.4
	3 S	46	54.8	54.8	57.1
	4 SS	36	42.9	42.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	



Frequencies

Statistics

		X	Y
		Desentralisasi Pendidikan	Profesionalisme Guru
N	Valid	84	84
	Missing	0	0
Mean		41.15	122.17
Median		41.00	121.50
Mode		41	114
Std. Deviation		4.020	8.288
Variance		16.156	68.695
Minimum		32	108
Maximum		49	138
Sum		3457	10262

Statistics - % Pencapaian

		X	Y
		Desentralisasi Pendidikan	Profesionalisme Guru
N	Valid	84	84
	Missing	0	0
Mean		68.5913	72.7183
Median		68.3333	72.3214
Mode		68.33	67.86
Std. Deviation		6.69919	4.93347
Variance		44.879	24.339
Minimum		53.33	64.29
Maximum		81.67	82.14
Sum		5761.67	6108.33

# Frequency Table

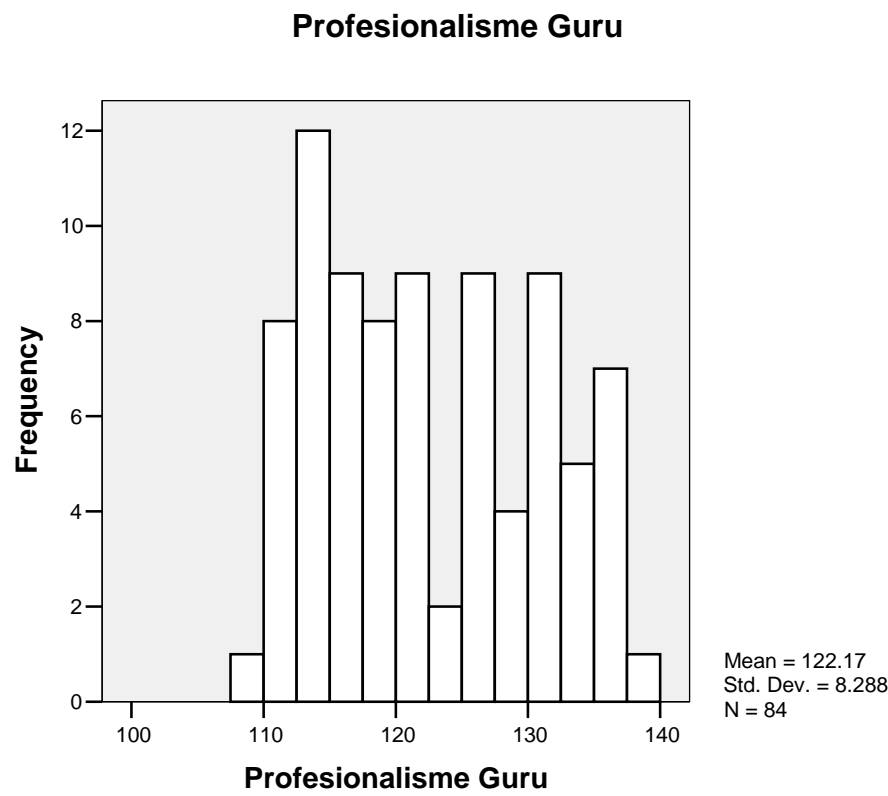
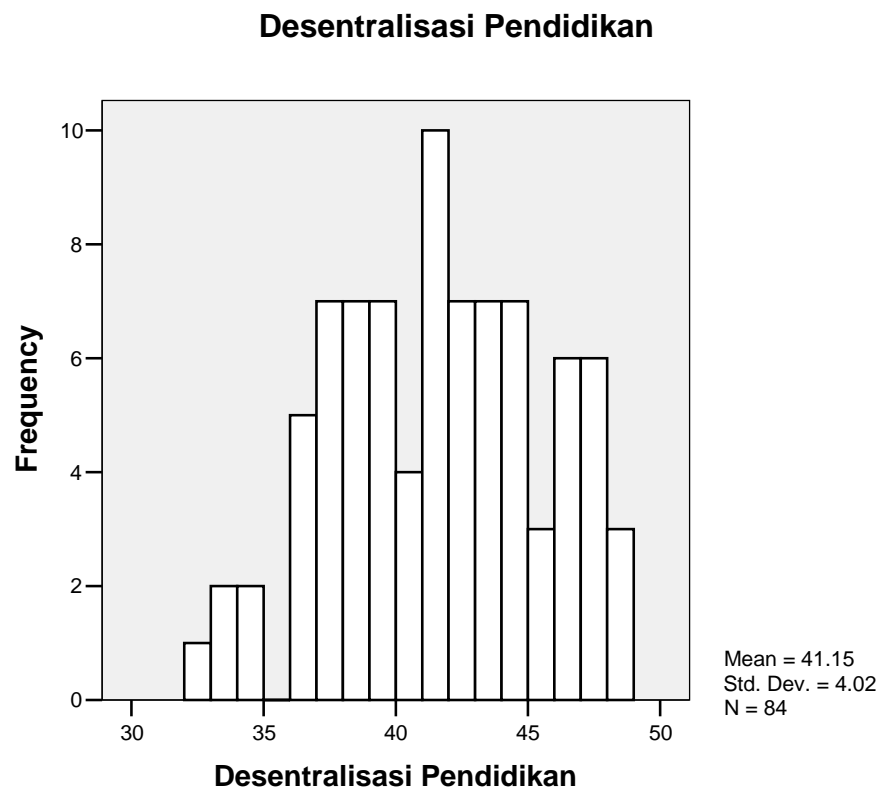
## X Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	32	1	1.2	1.2	1.2
	33	2	2.4	2.4	3.6
	34	2	2.4	2.4	6.0
	36	5	6.0	6.0	11.9
	37	7	8.3	8.3	20.2
	38	7	8.3	8.3	28.6
	39	7	8.3	8.3	36.9
	40	4	4.8	4.8	41.7
	41	10	11.9	11.9	53.6
	42	7	8.3	8.3	61.9
	43	7	8.3	8.3	70.2
	44	7	8.3	8.3	78.6
	45	3	3.6	3.6	82.1
	46	6	7.1	7.1	89.3
	47	6	7.1	7.1	96.4
	49	3	3.6	3.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

# Y Profesionalisme Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	108	1	1.2	1.2	1.2
	110	3	3.6	3.6	4.8
	111	2	2.4	2.4	7.1
	112	3	3.6	3.6	10.7
	113	5	6.0	6.0	16.7
	114	7	8.3	8.3	25.0
	115	5	6.0	6.0	31.0
	116	3	3.6	3.6	34.5
	117	1	1.2	1.2	35.7
	118	5	6.0	6.0	41.7
	119	3	3.6	3.6	45.2
	120	2	2.4	2.4	47.6
	121	2	2.4	2.4	50.0
	122	5	6.0	6.0	56.0
	123	1	1.2	1.2	57.1
	124	1	1.2	1.2	58.3
	125	4	4.8	4.8	63.1
	126	2	2.4	2.4	65.5
	127	3	3.6	3.6	69.0
	128	2	2.4	2.4	71.4
	129	2	2.4	2.4	73.8
	130	4	4.8	4.8	78.6
	131	2	2.4	2.4	81.0
	132	3	3.6	3.6	84.5
	133	4	4.8	4.8	89.3
	134	1	1.2	1.2	90.5
	135	5	6.0	6.0	96.4
	136	1	1.2	1.2	97.6
	137	1	1.2	1.2	98.8
	138	1	1.2	1.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Histogram



Frequency Table

**X Desentralisasi Pendidikan - % Pencapaian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	53.33	1	1.2	1.2	1.2
	55.00	2	2.4	2.4	3.6
	56.67	2	2.4	2.4	6.0
	60.00	5	6.0	6.0	11.9
	61.67	7	8.3	8.3	20.2
	63.33	7	8.3	8.3	28.6
	65.00	7	8.3	8.3	36.9
	66.67	4	4.8	4.8	41.7
	68.33	10	11.9	11.9	53.6
	70.00	7	8.3	8.3	61.9
	71.67	7	8.3	8.3	70.2
	73.33	7	8.3	8.3	78.6
	75.00	3	3.6	3.6	82.1
	76.67	6	7.1	7.1	89.3
	78.33	6	7.1	7.1	96.4
	81.67	3	3.6	3.6	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Y Profesionalisme Guru - % Pencapaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	64.29	1	1.2	1.2	1.2
	65.48	3	3.6	3.6	4.8
	66.07	2	2.4	2.4	7.1
	66.67	3	3.6	3.6	10.7
	67.26	5	6.0	6.0	16.7
	67.86	7	8.3	8.3	25.0
	68.45	5	6.0	6.0	31.0
	69.05	3	3.6	3.6	34.5
	69.64	1	1.2	1.2	35.7
	70.24	5	6.0	6.0	41.7
	70.83	3	3.6	3.6	45.2
	71.43	2	2.4	2.4	47.6
	72.02	2	2.4	2.4	50.0
	72.62	5	6.0	6.0	56.0
	73.21	1	1.2	1.2	57.1
	73.81	1	1.2	1.2	58.3
	74.40	4	4.8	4.8	63.1
	75.00	2	2.4	2.4	65.5
	75.60	3	3.6	3.6	69.0
	76.19	2	2.4	2.4	71.4
	76.79	2	2.4	2.4	73.8
	77.38	4	4.8	4.8	78.6
	77.98	2	2.4	2.4	81.0
	78.57	3	3.6	3.6	84.5
	79.17	4	4.8	4.8	89.3
	79.76	1	1.2	1.2	90.5
	80.36	5	6.0	6.0	96.4
	80.95	1	1.2	1.2	97.6
	81.55	1	1.2	1.2	98.8
	82.14	1	1.2	1.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Frequency Table

DP1 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	2.8	2.8	2.8
	2 TS	13	12.3	12.3	15.1
	3 S	61	57.5	57.5	72.6
	4 SS	29	27.4	27.4	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

DP2 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	7	6.6	6.6	6.6
	2 TS	21	19.8	19.8	26.4
	3 S	58	54.7	54.7	81.1
	4 SS	20	18.9	18.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

DP3 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	15	14.2	14.2	14.2
	2 TS	65	61.3	61.3	75.5
	3 S	22	20.8	20.8	96.2
	4 SS	4	3.8	3.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

DP4 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	18	17.0	17.0	17.0
	2 TS	63	59.4	59.4	76.4
	3 S	21	19.8	19.8	96.2
	4 SS	4	3.8	3.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP5 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	24	22.6	22.6	22.6
	2 TS	60	56.6	56.6	79.2
	3 S	14	13.2	13.2	92.5
	4 SS	8	7.5	7.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP6 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	33	31.1	31.1	31.1
	2 TS	54	50.9	50.9	82.1
	3 S	17	16.0	16.0	98.1
	4 SS	2	1.9	1.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP7 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	24	22.6	22.6	22.6
	2 TS	50	47.2	47.2	69.8
	3 S	30	28.3	28.3	98.1
	4 SS	2	1.9	1.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP8 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	3	2.8	2.8	2.8
	3 S	58	54.7	54.7	57.5
	4 SS	45	42.5	42.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP9 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	4	3.8	3.8	3.8
	3 S	60	56.6	56.6	60.4
	4 SS	42	39.6	39.6	100.0
	Total	106	100.0	100.0	



**DP10 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	2.8	2.8	2.8
	2 TS	28	26.4	26.4	29.2
	3 S	48	45.3	45.3	74.5
	4 SS	27	25.5	25.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP11 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	.9	.9	.9
	3 S	43	40.6	40.6	41.5
	4 SS	62	58.5	58.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP12 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	12	11.3	11.3	11.3
	2 TS	42	39.6	39.6	50.9
	3 S	35	33.0	33.0	84.0
	4 SS	17	16.0	16.0	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP13 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	21	19.8	19.8	19.8
	2 TS	58	54.7	54.7	74.5
	3 S	18	17.0	17.0	91.5
	4 SS	9	8.5	8.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**DP14 Desentralisasi Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	11	10.4	10.4	10.4
	2 TS	62	58.5	58.5	68.9
	3 S	28	26.4	26.4	95.3
	4 SS	5	4.7	4.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

DP15 Desentralisasi Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	6	5.7	5.7	5.7
	2 TS	33	31.1	31.1	36.8
	3 S	55	51.9	51.9	88.7
	4 SS	12	11.3	11.3	100.0
Total		106	100.0	100.0	

# Frequency Table

PG1 Profesionalisme Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	61	57.5	57.5	57.5
	4 SS	45	42.5	42.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

PG2 Profesionalisme Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	57	53.8	53.8	53.8
	4 SS	49	46.2	46.2	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

PG3 Profesionalisme Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	1.9	1.9	1.9
	3 S	75	70.8	70.8	72.6
	4 SS	29	27.4	27.4	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

PG4 Profesionalisme Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	3	2.8	2.8	2.8
	3 S	76	71.7	71.7	74.5
	4 SS	27	25.5	25.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

PG5 Profesionalisme Guru

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	1.9	1.9	1.9
	3 S	54	50.9	50.9	52.8
	4 SS	50	47.2	47.2	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG6 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	.9	.9	.9
	3 S	69	65.1	65.1	66.0
	4 SS	36	34.0	34.0	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG7 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	.9	.9	.9
	3 S	67	63.2	63.2	64.2
	4 SS	38	35.8	35.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG8 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	.9	.9	.9
	2 TS	1	.9	.9	1.9
	3 S	57	53.8	53.8	55.7
	4 SS	47	44.3	44.3	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG9 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	16	15.1	15.1	15.1
	2 TS	77	72.6	72.6	87.7
	3 S	12	11.3	11.3	99.1
	4 SS	1	.9	.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG10 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	1.9	1.9	1.9
	3 S	68	64.2	64.2	66.0
	4 SS	36	34.0	34.0	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG11 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	.9	.9	.9
	3 S	58	54.7	54.7	55.7
	4 SS	47	44.3	44.3	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG12 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	2	1.9	1.9	1.9
	2 TS	9	8.5	8.5	10.4
	3 S	64	60.4	60.4	70.8
	4 SS	31	29.2	29.2	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG13 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	2.8	2.8	2.8
	2 TS	27	25.5	25.5	28.3
	3 S	60	56.6	56.6	84.9
	4 SS	16	15.1	15.1	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG14 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	8	7.5	7.5	7.5
	2 TS	65	61.3	61.3	68.9
	3 S	28	26.4	26.4	95.3
	4 SS	5	4.7	4.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG15 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	10	9.4	9.4	9.4
	2 TS	81	76.4	76.4	85.8
	3 S	14	13.2	13.2	99.1
	4 SS	1	.9	.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG16 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	16	15.1	15.1	15.1
	2 TS	81	76.4	76.4	91.5
	3 S	9	8.5	8.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG17 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	5	4.7	4.7	4.7
	2 TS	75	70.8	70.8	75.5
	3 S	21	19.8	19.8	95.3
	4 SS	5	4.7	4.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG18 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	20	18.9	18.9	18.9
	2 TS	78	73.6	73.6	92.5
	3 S	5	4.7	4.7	97.2
	4 SS	3	2.8	2.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG19 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	6	5.7	5.7	5.7
	3 S	46	43.4	43.4	49.1
	4 SS	54	50.9	50.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG20 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	7	6.6	6.6	6.6
	2 TS	55	51.9	51.9	58.5
	3 S	39	36.8	36.8	95.3
	4 SS	5	4.7	4.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG21 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	3	2.8	2.8	2.8
	2 TS	7	6.6	6.6	9.4
	3 S	71	67.0	67.0	76.4
	4 SS	25	23.6	23.6	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG22 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	3	2.8	2.8	2.8
	3 S	65	61.3	61.3	64.2
	4 SS	38	35.8	35.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG23 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	.9	.9	.9
	3 S	74	69.8	69.8	70.8
	4 SS	31	29.2	29.2	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG24 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	10	9.4	9.4	9.4
	2 TS	72	67.9	67.9	77.4
	3 S	22	20.8	20.8	98.1
	4 SS	2	1.9	1.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG25 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	1.9	1.9	1.9
	3 S	66	62.3	62.3	64.2
	4 SS	38	35.8	35.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG26 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	4	3.8	3.8	3.8
	3 S	81	76.4	76.4	80.2
	4 SS	21	19.8	19.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG27 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	.9	.9	.9
	2 TS	14	13.2	13.2	14.2
	3 S	64	60.4	60.4	74.5
	4 SS	27	25.5	25.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG28 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 S	61	57.5	57.5	57.5
	4 SS	45	42.5	42.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG29 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	13	12.3	12.3	12.3
	2 TS	86	81.1	81.1	93.4
	3 S	7	6.6	6.6	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG30 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	.9	.9	.9
	2 TS	2	1.9	1.9	2.8
	3 S	64	60.4	60.4	63.2
	4 SS	39	36.8	36.8	100.0
	Total	106	100.0	100.0	



**PG31 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	2	1.9	1.9	1.9
	2 TS	24	22.6	22.6	24.5
	3 S	66	62.3	62.3	86.8
	4 SS	14	13.2	13.2	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG32 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	2	1.9	1.9	1.9
	3 S	54	50.9	50.9	52.8
	4 SS	50	47.2	47.2	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG33 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	1	.9	.9	.9
	3 S	61	57.5	57.5	58.5
	4 SS	44	41.5	41.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG34 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	1	.9	.9	.9
	2 TS	1	.9	.9	1.9
	3 S	71	67.0	67.0	68.9
	4 SS	33	31.1	31.1	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG35 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	13	12.3	12.3	12.3
	2 TS	73	68.9	68.9	81.1
	3 S	15	14.2	14.2	95.3
	4 SS	5	4.7	4.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG36 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	2	1.9	1.9	1.9
	2 TS	48	45.3	45.3	47.2
	3 S	50	47.2	47.2	94.3
	4 SS	6	5.7	5.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG37 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	12	11.3	11.3	11.3
	2 TS	83	78.3	78.3	89.6
	3 S	11	10.4	10.4	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG38 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	29	27.4	27.4	27.4
	2 TS	68	64.2	64.2	91.5
	3 S	8	7.5	7.5	99.1
	4 SS	1	.9	.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG39 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	7	6.6	6.6	6.6
	3 S	54	50.9	50.9	57.5
	4 SS	45	42.5	42.5	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG40 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	15	14.2	14.2	14.2
	2 TS	65	61.3	61.3	75.5
	3 S	10	9.4	9.4	84.9
	4 SS	16	15.1	15.1	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

**PG41 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 STS	10	9.4	9.4	9.4
	2 TS	61	57.5	57.5	67.0
	3 S	28	26.4	26.4	93.4
	4 SS	7	6.6	6.6	100.0
Total		106	100.0	100.0	

**PG42 Profesionalisme Guru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 TS	5	4.7	4.7	4.7
	3 S	67	63.2	63.2	67.9
	4 SS	34	32.1	32.1	100.0
Total		106	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		X	Y
		Desentralisasi Pendidikan	Profesionalisme Guru
N	Valid	106	106
	Missing	0	0
Mean		39.12	120.80
Median		39.00	120.00
Mode		37	112 <sup>a</sup>
Std. Deviation		3.697	8.344
Variance		13.671	69.627
Minimum		31	104
Maximum		49	142
Sum		4147	12805

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Statistics - % Pencapaian

		X	Y
		Desentralisasi Pendidikan	Profesionalisme Guru
N	Valid	106	106
	Missing	0	0
Mean		65.2044	71.9059
Median		65.0000	71.4286
Mode		61.67	66.67 <sup>a</sup>
Std. Deviation		6.16228	4.96683
Variance		37.974	24.669
Minimum		51.67	61.90
Maximum		81.67	84.52
Sum		6911.67	7622.02

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

# Frequency Table

## X Desentralisasi Pendidikan

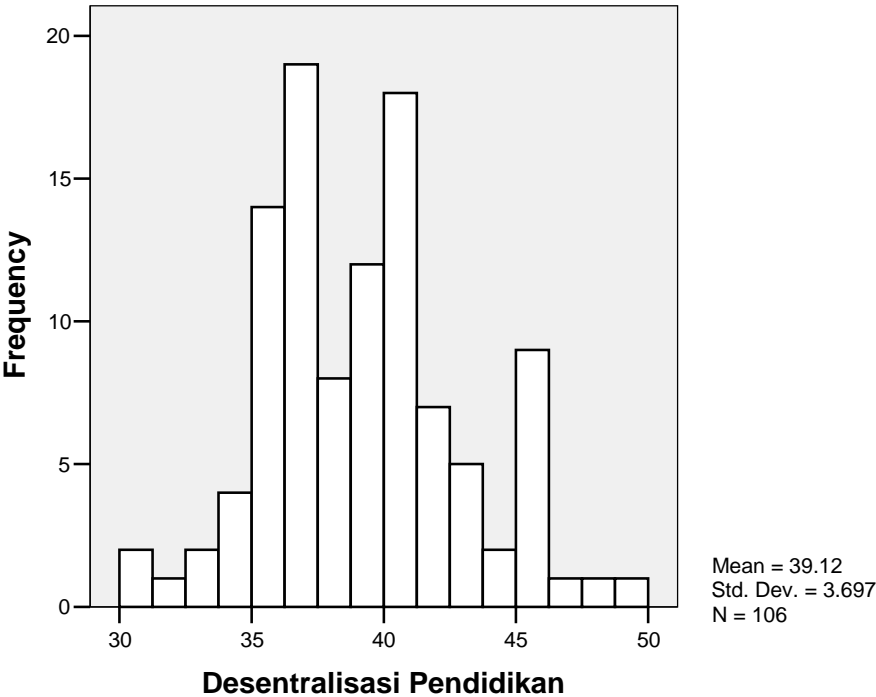
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31	2	1.9	1.9	1.9
	32	1	.9	.9	2.8
	33	2	1.9	1.9	4.7
	34	4	3.8	3.8	8.5
	35	6	5.7	5.7	14.2
	36	8	7.5	7.5	21.7
	37	19	17.9	17.9	39.6
	38	8	7.5	7.5	47.2
	39	12	11.3	11.3	58.5
	40	8	7.5	7.5	66.0
	41	10	9.4	9.4	75.5
	42	7	6.6	6.6	82.1
	43	5	4.7	4.7	86.8
	44	2	1.9	1.9	88.7
	45	7	6.6	6.6	95.3
	46	2	1.9	1.9	97.2
	47	1	.9	.9	98.1
	48	1	.9	.9	99.1
	49	1	.9	.9	100.0
Total		106	100.0	100.0	

# Y Profesionalisme Guru

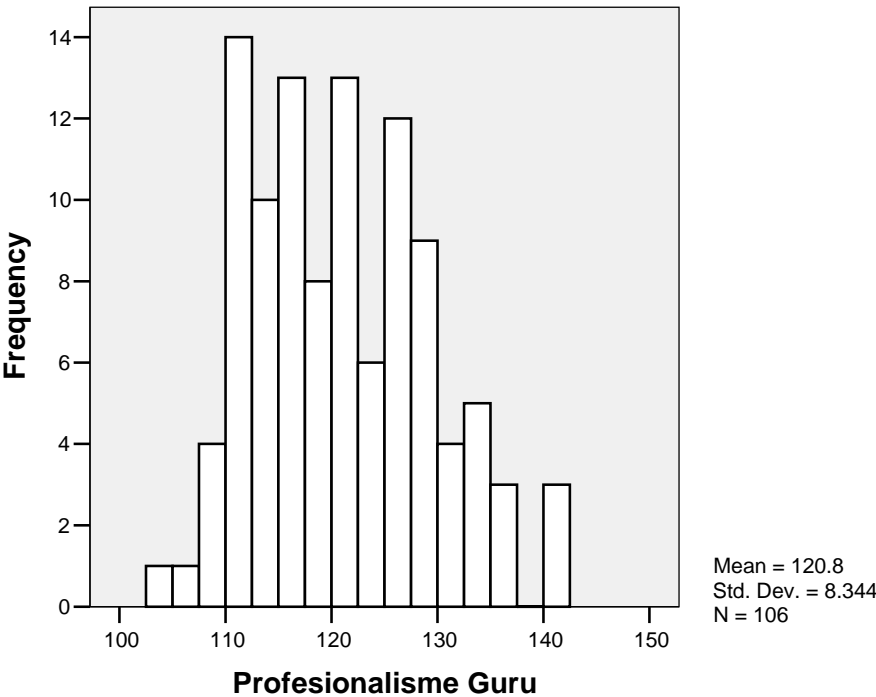
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	104	1	.9	.9	.9
	107	1	.9	.9	1.9
	108	3	2.8	2.8	4.7
	109	1	.9	.9	5.7
	110	1	.9	.9	6.6
	111	6	5.7	5.7	12.3
	112	7	6.6	6.6	18.9
	113	4	3.8	3.8	22.6
	114	6	5.7	5.7	28.3
	115	4	3.8	3.8	32.1
	116	4	3.8	3.8	35.8
	117	5	4.7	4.7	40.6
	118	5	4.7	4.7	45.3
	119	3	2.8	2.8	48.1
	120	4	3.8	3.8	51.9
	121	5	4.7	4.7	56.6
	122	4	3.8	3.8	60.4
	123	1	.9	.9	61.3
	124	5	4.7	4.7	66.0
	125	5	4.7	4.7	70.8
	126	2	1.9	1.9	72.6
	127	5	4.7	4.7	77.4
	128	2	1.9	1.9	79.2
	129	7	6.6	6.6	85.8
	130	2	1.9	1.9	87.7
	131	1	.9	.9	88.7
	132	1	.9	.9	89.6
	133	2	1.9	1.9	91.5
	134	3	2.8	2.8	94.3
	136	2	1.9	1.9	96.2
	137	1	.9	.9	97.2
	140	2	1.9	1.9	99.1
	142	1	.9	.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

# Histogram

Desentralisasi Pendidikan



Profesionalisme Guru



# Frequency Table

X Desentralisasi Pendidikan - % Pencapaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	51.67	2	1.9	1.9	1.9
	53.33	1	.9	.9	2.8
	55.00	2	1.9	1.9	4.7
	56.67	4	3.8	3.8	8.5
	58.33	6	5.7	5.7	14.2
	60.00	8	7.5	7.5	21.7
	61.67	19	17.9	17.9	39.6
	63.33	8	7.5	7.5	47.2
	65.00	12	11.3	11.3	58.5
	66.67	8	7.5	7.5	66.0
	68.33	10	9.4	9.4	75.5
	70.00	7	6.6	6.6	82.1
	71.67	5	4.7	4.7	86.8
	73.33	2	1.9	1.9	88.7
	75.00	7	6.6	6.6	95.3
	76.67	2	1.9	1.9	97.2
	78.33	1	.9	.9	98.1
	80.00	1	.9	.9	99.1
	81.67	1	.9	.9	100.0
	Total	106	100.0	100.0	



# Y Profesionalisme Guru - % Pencapaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	61.90	1	.9	.9	.9
	63.69	1	.9	.9	1.9
	64.29	3	2.8	2.8	4.7
	64.88	1	.9	.9	5.7
	65.48	1	.9	.9	6.6
	66.07	6	5.7	5.7	12.3
	66.67	7	6.6	6.6	18.9
	67.26	4	3.8	3.8	22.6
	67.86	6	5.7	5.7	28.3
	68.45	4	3.8	3.8	32.1
	69.05	4	3.8	3.8	35.8
	69.64	5	4.7	4.7	40.6
	70.24	5	4.7	4.7	45.3
	70.83	3	2.8	2.8	48.1
	71.43	4	3.8	3.8	51.9
	72.02	5	4.7	4.7	56.6
	72.62	4	3.8	3.8	60.4
	73.21	1	.9	.9	61.3
	73.81	5	4.7	4.7	66.0
	74.40	5	4.7	4.7	70.8
	75.00	2	1.9	1.9	72.6
	75.60	5	4.7	4.7	77.4
	76.19	2	1.9	1.9	79.2
	76.79	7	6.6	6.6	85.8
	77.38	2	1.9	1.9	87.7
	77.98	1	.9	.9	88.7
	78.57	1	.9	.9	89.6
	79.17	2	1.9	1.9	91.5
	79.76	3	2.8	2.8	94.3
	80.95	2	1.9	1.9	96.2
	81.55	1	.9	.9	97.2
	83.33	2	1.9	1.9	99.1
	84.52	1	.9	.9	100.0
Total		106	100.0	100.0	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y
		Desentralisasi Pendidikan	Profesionalisme Guru
N		84	84
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	41.15	122.17
	Std. Deviation	4.020	8.288
Most Extreme Differences	Absolute	.073	.117
	Positive	.073	.117
	Negative	-.068	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		.670	1.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.761	.202

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X Desentralisasi Pendidikan	Y Profesionalisme Guru
N		106	106
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	39.12	120.80
	Std. Deviation	3.697	8.344
Most Extreme Differences	Absolute	.113	.084
	Positive	.113	.084
	Negative	-.066	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		1.166	.868
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132	.438

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Report**

Y Profesionalisme Guru

X Desentralisasi Pendidikan	Mean	N	Std. Deviation
32	113.00	1	.
33	116.00	2	4.243
34	112.50	2	2.121
36	124.60	5	11.194
37	122.43	7	10.212
38	121.57	7	7.525
39	118.14	7	6.230
40	124.00	4	10.488
41	117.50	10	4.720
42	117.14	7	6.517
43	122.57	7	10.179
44	123.71	7	6.396
45	124.00	3	8.888
46	129.50	6	6.091
47	130.67	6	4.274
49	128.67	3	6.351
Total	122.17	84	8.288

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square
Y Profesionalisme Guru * X Desentralisasi Pendidikan	Between Groups	(Combined)	1811.681	15	120.779
		Linearity	771.036	1	771.036
		Deviation from Linearity	1040.645	14	74.332
	Within Groups		3889.986	68	57.206
	Total		5701.667	83	

ANOVA Table

			F	Sig.
Y Profesionalisme Guru * X Desentralisasi Pendidikan	Between Groups	(Combined)	2.111	.019
		Linearity	13.478	.000
		Deviation from Linearity	1.299	.231
	Within Groups			
	Total			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y Profesionalisme Guru * X Desentralisasi Pendidikan	.368	.135	.564	.318

**Report**

Y Profesionalisme Guru

X Desentralisasi Pendidikan	Mean	N	Std. Deviation
31	119.50	2	2.121
32	111.00	1	.
33	130.50	2	4.950
34	118.50	4	3.873
35	119.67	6	7.941
36	121.88	8	4.086
37	118.32	19	7.558
38	115.13	8	8.576
39	117.75	12	8.069
40	125.88	8	8.919
41	118.40	10	6.132
42	124.43	7	9.502
43	124.60	5	13.667
44	125.50	2	6.364
45	124.43	7	6.268
46	116.50	2	2.121
47	140.00	1	.
48	129.00	1	.
49	136.00	1	.
Total	120.80	106	8.344

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square
Y Profesionalisme Guru * X Desentralisasi Pendidikan	Between Groups	(Combined)	2080.497	18	115.583
		Linearity	472.533	1	472.533
		Deviation from Linearity	1607.964	17	94.586
	Within Groups		5230.342	87	60.119
	Total		7310.840	105	

ANOVA Table

			F	Sig.
Y Profesionalisme Guru * X Desentralisasi Pendidikan	Between Groups	(Combined)	1.923	.024
		Linearity	7.860	.006
		Deviation from Linearity	1.573	.089
	Within Groups			
	Total			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y Profesionalisme Guru * X Desentralisasi Pendidikan	.254	.065	.533	.285

# Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y Profesionalisme Guru	122.17	8.288	84
X Desentralisasi Pendidikan	41.15	4.020	84

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X Desentralisasi Pendidikan <sup>a</sup>	.	Enter

- a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y Profesionalisme Guru

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 <sup>a</sup>	.135	.125	7.754

- a. Predictors: (Constant), X Desentralisasi Pendidikan

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	771.036	1	771.036	12.823	.001 <sup>a</sup>
	Residual	4930.631	82	60.130		
	Total	5701.667	83			

- a. Predictors: (Constant), X Desentralisasi Pendidikan  
b. Dependent Variable: Y Profesionalisme Guru

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	90.960	8.756	
	X Desentralisasi Pendidikan	.758	.212	.368



Coefficients<sup>a</sup>

Model		t	Sig.
1	(Constant)	10.389	.000
	X Desentralisasi Pendidikan	3.581	.001

a. Dependent Variable: Y Profesionalisme Guru

# Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y Profesionalisme Guru	120.80	8.344	106
X Desentralisasi Pendidikan	39.12	3.697	106

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X Desentralisasi Pendidikan	.	Enter

- a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y Profesionalisme Guru

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.254 <sup>a</sup>	.065	.056	8.109

- a. Predictors: (Constant), X Desentralisasi Pendidikan

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	472.533	1	472.533	7.186	.009 <sup>a</sup>
	Residual	6838.307	104	65.753		
	Total	7310.840	105			

- a. Predictors: (Constant), X Desentralisasi Pendidikan  
b. Dependent Variable: Y Profesionalisme Guru

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	98.355	8.410	
	X Desentralisasi Pendidikan	.574	.214	.254

Coefficients<sup>a</sup>

Model		t	Sig.
1	(Constant)	11.695	.000
	X Desentralisasi Pendidikan	2.681	.009

a. Dependent Variable: Y Profesionalisme Guru